



DINKOMINFOMUBA  
MESSENGER OF MUBA



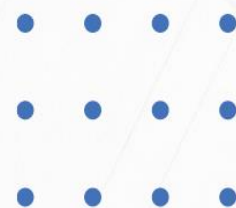
SATU DATA  
INDONESIA



# METADATA KEGIATAN & VARIABEL STATISTIK SEKTORAL

## PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

### KAB. MUSI BANYUASIN



[satudata.mubakab.go.id](http://satudata.mubakab.go.id)



[bidangstatistik.dinkominfomuba](https://www.instagram.com/bidangstatistik.dinkominfomuba)



DINKOMINFOMUBA  
MESSENGER OF MUBA



## TIM PENYUSUN



### **Pengarah**

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Muba

### **Pembina**

BPS Kab.Muba

### **Penanggung Jawab**

Hj. Nurzahrawati, S.Pd.,MT

Mustito, S.Pd

### **Tim Editor**

Pangku, SE.,M.Si

Adil Bustaman, SH

Lisa Agustim, SE.,M.Si

Faruk Apero, SH.,M.Si

### **Tim Pengelola Metadata**

Laras Niken Dwi Cahyani, S.Stat

Ratni Mayasari, SE

Susilorani

Suyanti

### **Diterbitkan Oleh**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Muba

### **Sumber Data**

Seluruh Perangkat Daerah di Kab. Mubi Banyuasin



# SAMBUTAN KEPALA DINAS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, kami haturkan kepada pembaca sekalian buku Metadata Statistik Sektoral Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023.

Metadata Statistik Sektoral Tahun 2023 merupakan publikasi yang menyajikan sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/ dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik dengan beragam jenis data statistik yang bersumber dari organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2023. Metadata statistik sektoral ini mengacu pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Juknis Statistik Sektoral Tahun 2021.

Penyusunan Metadata Statistik Sektoral Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk aktualisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Salah satu amanatnya yaitu menyelenggarakan sub urusan statistik sektoral. Selain itu, buku ini juga merupakan bagian dari implementasi Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kehadiran himpunan metadata kegiatan dan variabel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap data statistik agar angka yang tertera dapat diinterpretasikan dengan tepat. Dengan demikian, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.

Kelengkapan dan penyempurnaan data yang disajikan terus diupayakan sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan ke arah lebih baik pada publikasi yang akan datang. Penghargaan dan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga publikasi ini dapat terwujud.

Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kelancaran dan keberkahan, Aamiin yaa Robbal Aalamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Musi Banyuasin, September 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Musi Banyuasin

**Herryandi Sinulingga, AP**

# KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Buku Metadata Kegiatan dan Variabel Statistik Sektorial Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023. Adapun tujuan dari disusunnya buku ini adalah untuk memenuhi kebutuhan organisasi, instansi, akademisi, maupun masyarakat terhadap pemahaman yang baik tentang data statistik. Interpretasi yang tepat terhadap data statistik dapat mengakselerasi tercapainya tujuan. Sebaliknya, interpretasi yang keliru dapat menggiring pada keputusan yang menyesatkan.

Sebagai walidata statistik di tingkat daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin menyediakan informasi metadata yang tersaji dalam publikasi Buku Metadata Kegiatan dan Variabel Statistik Sektorial 2023 dan dalam bentuk publikasi digital e-katalog yang tersimpan di Portal Satu Data Musi Banyuasin, adapun untuk mengakses web tersebut yaitu <https://satudata.mubakab.go.id/> Buku ini menyajikan berbagai ringkasan Metadata Kegiatan dan Variabel Statistik Sektorial yang dikumpulkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2023.

Sementara itu, upaya pemutakhiran informasi Metadata Kegiatan dan Variabel Statistik Sektorial terus kami lakukan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun. Dengan demikian, diharapkan buku ini dapat bermanfaat bagi para penyelenggara kegiatan statistik maupun pengguna data (*data user*).

Mengingat banyaknya metadata yang dikumpulkan maka publikasinya ini kami simpulkan menjadi buku. Buku ini terwujud berkat kerjasama yang baik antara tim penyusun dan unit penyelenggara kegiatan statistik terkait. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerjasamanya. Namun demikian, ibarat pepatah "tiada gading yang tidak retak", kritik dan saran masih kami harapkan. Masukan tersebut dapat dikirim secara langsung kepada kami Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin atau melalui Portal Satu data Musi Banyuasin.

Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kelancaran dan keberkahan, Amin Yaa Robbal Aalamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Musi Banyuasin, September 2023  
Plt. Kepala Bidang Statistik Sektorial  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Musi Banyuasin  
**Mustito, S.Pd**

# DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA DINAS.....	I
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI	III
METADATA KEGIATAN.....	1
METADATA VARIABEL.....	68



# METADATA STATISTIK KEGIATAN

<b>Judul Kegiatan:</b>		<b>Tahun: 2023</b>	
<b>Kompilasi Data Sektoral Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin</b>			
<b>Kode Kegiatan :</b> <b>2.20.02.2.01.01</b>			
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik</b>			
<b>Cara Pengumpulan Data:</b>			<b>3</b>
Pencacahan Lengkap	- 1	Kompilasi Produk Administrasi	- 3
Survei	- 2	Cara lain sesuai dengan perkembangan TI	- 4
<b>Sektor Kegiatan:</b>			<b>3</b>
Pertanian dan Perikanan	- 1	Perdagangan Internasional dan Neraca Perdagangan	- 12
Demografi dan Kependudukan	- 2	Ketenagakerjaan	- 13
Pembangunan	- 3	Neraca Nasional	- 14
Proyeksi Ekonomi	- 4	Indikator Ekonomi Bulanan	- 15
Pendidikan dan Pelatihan	- 5	Produktivitas	- 16
Lingkungan	- 6	Harga dan Paritas Daya Beli	- 17
Keuangan	- 7	Sektor Publik, Perpajakan, dan Regulasi Pasar	- 18
Globalisasi	- 8	Perwilayahan dan Perkotaan	- 19
Kesehatan	- 9	Ilmu Pengetahuan dan Hak Paten	- 20
Industri dan Jasa	- 10	Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan	- 21
Teknologi Informasi dan Komunikasi	- 11	Transportasi	- 22
<b>Jenis Kegiatan Statistik :</b>			
Statistik Dasar	- 1	Statistik Sektoral	<b>- 2</b>
		Statistik Khusus	- 3
<b>Jika kegiatan statistik sektoral, apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?</b>			<b>1</b>
Ya	- 1		
Tidak	- 2		
Jika "Ya", <b>Identitas Rekomendasi:</b> V-21.1606.001			

## I. PENYELENGGARA

### 1.1. Instansi Penyelenggara:

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Musi Banyuasin

### 1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:

Jalan Kol. Wahid Udin No 254 Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin

Telepon : (0714) 321202 Faksimile : (0714)321202

E-mail : dinkominfo@mubakab.go.id

## II. PENANGGUNG JAWAB

### 2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1 : Sekretaris Daerah

Eselon 2 : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Musi Banyuasin

### 2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)

Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Musi Banyuasin

Alamat : Jalan Kol. Wahid Udin No 254 Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin

Telepon : (0714) 321202 Faksimile : (0714)321202

E-mail : dinkominfo@mubakab.go.id

## III. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN

### 3.1. Latar Belakang Kegiatan:

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 90 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Musi Banyuasin yang bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakai oleh instansi pusat dan daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan serta mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data.

### 3.2. Tujuan Kegiatan:

Untuk menyediakan data Statistik Sektor Perangkat Daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dibagipakaikan di wilayah Kab. Musi Banyuasin sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.

**3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:**

	Awal (tgl/bln/thn)				Akhir (tgl/bln/thn)		
<b>A. Perencanaan</b>							
1. Perencanaan Kegiatan	02	12	2022	s.d.	23	12	2022
2. Desain	26	12	2022	s.d.	30	12	2022
<b>B. Pengumpulan</b>							
3. Pengumpulan Data	02	01	2023	s.d.	12	01	2023
<b>C. Pemeriksaan</b>							
4. Pengolahan Data	16	01	2023	s.d.	20	01	2023
5. Analisis	23	01	2023	s.d.	31	01	2023
<b>D. Penyebarluasan</b>							
6. Diseminasi Hasil	02	02	2023	s.d.	10	02	2023
7. Evaluasi	13	02	2023	s.d.	24	02	2023

**3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:**

No	Judul Data	Konsep	Definisi	Referensi Waktu	OPD
1	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Pendataan jumlah jumlah desa dan kelurahan yang ada di kabupaten musu banyuasin	Didalam kabupaten musin banyuasin terdapat 227 desa dan 13 kelurahan .	Tahunan	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
2	Banyak Produk Hukum di Kabupaten	Produk Hukum	Produk hukum adalah setiap putusan, penetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya.	Tahunan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
3	Daftar Pejabat Struktural Inspektorat	Pejabat Struktural di Inspektorat	Pejabat Struktural didefinisikan sebagai profesi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kedudukan dalam suatu struktur yang terdapat beberapa tingkat-tingkat, mulai dari tingkat kedudukan yang paling rendah sampai tingkat kedudukan yang tertinggi.	Tahunan	Inspektorat

4	Daftar Pejabat Auditor Inspektorat	Pejabat Auditor di Inspektorat	Pejabat Auditor didefinisikan sebagai jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah daerah yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diduduki.	Tahunan	Inspektorat
5	Data Audit Kinerja Inspektorat Daerah	Audit Kinerja Inspektorat Daerah	Audit Kinerja didefinisikan sebagai pemeriksaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi, efisiensi dan aspek efektivitas serta ketaatan pada peraturan.	Tahunan	Inspektorat
6	Data Klinik Konsultasi Pengawasan	Klinik Konsultasi Pengawasan	Klinik Konsultasi Pengawasan didefinisikan sebagai Implementasi dari APIP dalam melakukan pembinaan dan pendampingan pada pengelola keuangan Perangkat Daerah dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan serta mempercepat proses pelaksanaan tindak lanjut.	Tahunan	Inspektorat
7	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	Pengawasan dan Pemeriksaan	Pengawasan dan Pemeriksaan di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin didefinisikan sebagai kegiatan pengamatan, pemeriksaan, penilaian dan pengoreksian serta pembinaan secara komprehensif terhadap Pengelolaan sumberdaya yang menjadi tanggung jawab obrik, dilakukan secara langsung dengan membandingkan antara kegiatan yang dilaksanakan dengan aturan/ketentuan yang seharusnya, agar obrik dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar.	Tahunan	Inspektorat
8	Data Institusi yang Berperan Aktif dalam Forum Dialog Kota Berkelanjutan	Forum Dialog Kota Berkelanjutan	merupakan Kota Berkelanjutan mencakup kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air bersih, pengolahan air limbah dan pengelolaan sampah ramah lingkungan, aksesibilitas dan mobilitas yang di dukung transportasi berkelanjutan, pemanfaatan energi baru terbarukan, persyaratan bangunan gedung hijau dan ruang terbuka hijau yang memadai.	Tahunan	Badan Perencanaan Dan Pembangunan

9	Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah di kabupaten Musi Banyuasin	Indikator Makro Pembangunan Daerah	Indikator umum (Makro) merupakan indikator gabungan (Komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, capaian kinerja indikator umum (makro) menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum.	Tahunan	Badan Perencanaan Dan Pembangunan
10	Kesesuaian Pola Ruang Menurut Fungsi Kawasan di Kabupaten Musi Banyuasin	Kesesuaian Pola Ruang	Kesesuaian Pola Ruang adalah Distribusi peruntukan Ruang Wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk Fungsi Lindung dan Budidaya yang di tuju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW (20 Tahun).	Tahunan	Badan Perencanaan Dan Pembangunan
11	Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Luas Daerah	Adalah Luas Wilayah berdasarkan luas gabungan kecamatan dalam kabupaten batas administrasi sesuai dengan keputusan Permendagri No. 79 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin di Kabupaten Menentukan Provinsi.	Tahunan	Badan Perencanaan Dan Pembangunan
12	Jumlah anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin	Anggota DPRD	Anggota DPR adalah anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota.	Tahunan	Sekretariat DPR
13	Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin	Anggota DPRD	Anggota DPR adalah anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota.	Tahunan	Sekretariat DPR

14	Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Komisi di Kabupaten Musi Banyuasin	Anggota dan komisi DPRD	Anggota DPRD adalah anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPRD berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota. Komisi DPRD adalah salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Sederhananya, komisi merupakan kelompok-kelompok yang berisi anggota DPR. Masing-masing komisi memiliki wewenang dan ruang lingkup tugas tersendiri.	Tahunan	Sekretariat DPR
15	Jumlah Keputusan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin	keputusan DPRD	Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan DPRD kabupaten/kota. Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan Final.	Tahunan	Sekretariat DPR
16	Komposisi Anggota DPRD berdasarkan Agama	Komposisi Anggota DPRD	Susunan anggota DPRD.	Tahunan	Sekretariat DPR
17	Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Dan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.	Tahunan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
18	Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah per Golongan menurut Organisasi Perangkat Daerah	Pegawai Negeri Sipil Per Jenis Golongan Menurut OPD	Mendapatkan Jumlah Pegawai Negeri Sipil per Golongan berdasarkan OPD.	Tahunan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
19	Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir	Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat Pendidikan Terakhir	Mendapatkan Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir (SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, D4/S1, S2, S3).	Tahunan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
20	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja per	egawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Mendapatkan Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja per Golongan menurut OPD	Tahunan	Badan Kepegawaian Dan

	Golongan menurut OPD	per Golongan menurut OPD			Pengembangan SDM
21	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Usia menurut OPD	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Usia menurut OPD	Mendapatkan Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Rentang Usia 20-30,31-40, 41-50, dan >50 menurut OPD.	Tahunan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
22	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah berdasarkan Usia menurut Organisasi Perangkat Daerah	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah berdasarkan Usia menurut Organisasi Perangkat Daerah	Mendapatkan Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Rentang Usia 20-30,31-40, 41-50, dan >50 menurut OPD.	Tahunan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
23	Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah berdasarkan Rumpun Jabatan	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah berdasarkan Rumpun Jabatan	Mendapatkan Jumlah Fungsional Tertentu (JFT) Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Rumpun Jabatan Guru, Kesehatan dan Teknis.	Tahunan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
24	Jumlah Fungsional Umum (Staf) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir	Fungsional Umum (Staf) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir	Mendapatkan Jumlah Fungsional Umum (Staf) Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir (SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, D4/S1, S2, S3).	Tahunan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
25	Jumlah Fungsional Tertentu (JFT) Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir	Fungsional Tertentu (JFT) Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir	Mendapatkan Jumlah Jumlah Fungsional Tertentu (JFT) Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir (SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, D4/S1, S2, S3).	Tahunan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
26	Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah per Jenis Jabatan menurut Organisasi Perangkat Daerah	Pegawai Negeri Sipil Per Jenis Jabatan Menurut OPD	Mendapatkan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Per Jenis Jabatan (Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum) berdasarkan OPD .	Tahunan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
27	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah berdasarkan Agama per Organisasi Perangkat Daerah	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah berdasarkan Agama per Organisasi Perangkat Daerah	Mendapatkan Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Agama Islam, Kristen, Khatolik, Hindu dan Budha Menurut OPD.	Tahunan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM

28	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Per Jenis Jabatan Menurut Organisasi Perangkat Daerah	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Per Jenis Jabatan Menurut Organisasi Perangkat Daerah	Mendapatkan Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja per Jenis Jabatan (Teknis, Kesehatan dan Guru) menurut OPD.	Tahunan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
29	Jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Menurut Organisasi Perangkat Daerah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan Pada Perangkat Daerah.	Tahunan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
30	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin	Pegawai Negeri Sipil Menurut jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin	Mendapatkan Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Jabatan (Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum) dan Jenis Kelamin Pria dan Wanita .	Tahunan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
31	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin	Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	Mendapatkan Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan (SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, D4/S1, S2, S3) dan Jenis Kelamin Pria dan Wanita.	Tahunan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
32	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di kabupaten Musi Banyuasin	Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin	Mendapatka Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin Pria dan Wanita.	Tahunan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
33	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja per Tingkat Pendidikan Terakhir	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja per Tingkat Pendidikan Terakhir	Mendapatkan Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja per Tingkat Pendidikan Terakhir (SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, D4/S1, S2, S3).	Tahunan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
34	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Organisasi Perangkat Daerah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin	Pegawai Negeri Sipil	Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pada Perangkat Daerah.	Tahunan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM

35	Jumlah Pejabat Struktural Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir	Pejabat Struktural Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir.	Mendapatkan Jumlah Pejabat Struktural Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir (SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, D4/S1, S2, S3).	Tahunan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
36	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Agama menurut OPD	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Agama menurut OPD	Mendapatkan Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Agama Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, dan Budha menurut OPD.	Tahunan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
37	Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin Menurut OPD	Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin Menurut OPD	Mendapatkan Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin Pria dan Wanita Menurut OPD.	Tahunan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
38	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Jenis Kelamin Menurut OPD	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Jenis Kelamin Menurut OPD	Mendapatkan Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Jenis Kelamin Pria dan Wanita Menurut OPD.	Tahunan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
39	Jumlah Realisasi Pendapatan Pemerintah Menurut Jenis Pendapatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Realisasi Pendapatan Pemerintah Menurut Jenis Pendapatan	Laporan yang menyajikan informasi Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah, Pendapatan Taranfer Antar Daerah, Pendapatan Hibah dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan, yang masing-masing di perbandingkan dengan anggarannya dalam satu Periode.	Tahunan	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
40	Jumlah Realisasi Pengeluaran Pembangunan Menurut Urutan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Realisasi Pengeluaran Pembangunan Menurut Urutan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan	Laporan yang menyajikan informasi di bidang Layanan Umum, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Lingkungan Hidup, Perumahan dan Pasilitas Umum, Kesehatan, Parieisata dan Kebudayaan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial.	Tahunan	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
41	Jumlah Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menurut Jenis Belanja (Rupiah)	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menurut Jenis Belanja (Rupiah)	Laporan realisasi yang menyajikan informasi tentang Belanja Opersasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Tranfer.	Tahunan	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

42	Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Laporan yang menyajikan informasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air dan Tanah, Pajak Burung Sarang Walet, Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.	Tahunan	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
43	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kab Musi Banyuasin	Pajak Daerah	Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.	Tahunan	Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
44	Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah (Unaudited)	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tahunan	Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
45	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumidan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sector perkotaan dan perdesaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunana, perhutanan dan pertambangan.	Tahunan	Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
46	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Retribusi Daerah	Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.	Tahunan	Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
47	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Berdasarkan Bidang Pelayanan Per-Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ormas dan LSM terdaftar sebagaimana dimaksud pada Permendagri Nomor 57 Tahun 2017.	Tahunan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politi

48	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Berdasarkan Badan Hukum Per-Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang sudah berbadan hukum dan melapor ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ormas dan LSM berbadan hukum yang melapor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2016.	Tahunan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politi
49	Pembinaan Politik Kabupaten Musi Banyuasin	Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Politik dan Demokrasi	Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Politik dan Demokrasi Bagi Masyarakat Umum.	Tahunan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politi
50	Organisasi Politik, Keagamaan, Pendidikan, Kepemudaan, Masyarakat dan Profesi	Organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai kegiatan di bidang Politik, Keagamaan, Pendidikan, Kepemudaan dan Profesi yang terdaftar atau melapor di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai kegiatan di bidang Politik, Keagamaan, Pendidikan, Kepemudaan dan Profesi yang terdaftar atau melapor sesuai Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2016 .	Tahunan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politi
51	Daftar Kepengurusan Partai Politik menurut Jenis Kelamin	Daftar Kepengurusan Partai Politik yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin.	Daftar Kepengurusan Partai Politik yang dilaporkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	Tahunan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politi
52	Jumlah Kejadian Bencanan Menurut Jenisnya	Kejadian Bencana	Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan ataupun kerusakan, jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.	Tahunan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
53	Jumlah Daerah Rawan Bencana Menurut Jenisnya	Daerah Rawan Bencana	Daerah rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakter geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.	Tahunan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

54	Jumlah Kejadian Kebakaran Menurut Bulan	Kejadian Kebakaran Bulanan	Kejadian kebakaran bulanan adalah kejadian kebakaran yang dibuat pada saat tanggap darurat dengan memmuat waktu dan lokasi kejadian bencana, penyebab bencana, cakupan wilayah dampak bencana, penyebab kejadian bencana, dampak bencana (jumlah korban jiwa dan kerusakan/kerugian serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan), upaya penanganan yang dilakukan, bantuan yang diperlukan, kendala yang dihadapi.	Tahunan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
55	Rekapitulasi Kejadian Kebakaran di Kab Musi Banyuasin	Rekapitulasi Kejadian Kebakaran	Rekapitulasi kejadian kebakaran adalah jumlah kejadian, dampak bencana yang disajikan dalam tabulasi	Tahunan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
56	Jumlah Korban yang diakibatkan Bencana Alam	Korban Bencana Alam	Korban bencana alam adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana	Tahunan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
57	Rekapitulasi Kejadian NON Kebakaran di Kab Musi Banyuasin	Rekapitulasi Kejadian NON Kebakaran	Rekapitulasi Kejadian NON Kebakaran adalah jumlah kejadian, dampak bencana yang disajikan dalam tabulasi	Tahunan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
58	Desa Tangguh Bencana dan Satuan Pendidikan Aman Bencana	Desa Tangguh Bencana dan Satuan Pendidikan	Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang telah diberikan pelatihan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memiliki kemampuan mengenali ancaman di wilayahnya sehingga mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana dan pendidikan pelatihan diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan geladi.	Tahunan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
59	Jumlah Daerah Bencana Kebakaran Hutan Menurut Jenis Topografi Dan Kecamatan	Daerah Bencana Kebakaran Berdasarkan Topografi	Daerah Bencana Kebakaran dapat dilihat melalui topografi, Topografi merupakan bentuk permukaan bumi, Tempat yang rendah dapat berpotensi tinggi terhadap bencana kebakaran hutan. Tinggi rendahnya kerawanan kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat dari nilai kerawanan berdasarkan tingkatnya.	Tahunan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

60	Jumlah Kejadian Kebakaran Berdasarkan Bulan	Jumlah Kebakaran	Untuk mengetahui kebakaran perbulan pada suatu wilayah tidak menentu maka perlu di pahami bahwa didefinisikan kebakaran ialah suatu peristiwa bencana yang berasal dari api yang tidak dapat dikehendaki yang dapat menimbulkan kerugian, baik kerugian materi (berupa harta benda, bangunan fisik, depot, fasilitas, sarana dan prasarana) maupun keruguan non-materi (seperti rasa takut dan trauma) hingga kehilangan nyawa atau cacat tubung yang ditimbulkan akibat kebakaran.	Tahunan	Satuan Polisi Pamong Praja
61	Jumlah Korban dan Tafsiran Kerugian Akibat Kebakaran	Dampak Kebakaran	Korban Kebakaran (Janiari-Desember) disatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun.	Tahunan	Satuan Polisi Pamong Praja
62	Jumlah Pelanggaran Pemasangan Reklame dan Pelanggaran Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Bulan	Pelanggaran Reklame	Reklame adalah badan, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau benda yang dapat dilihat,dibaca,didengar,dirasakan dan atau sering disebut PKL merupakan sebuah komunikasi pedagang yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya, mereka menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir perlintasan jalan raya.	Tahunan	Satuan Polisi Pamong Praja
63	Jumlah Tenaga Bantuan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Tenaga Bantuan	Tenaga Bantuan Pada Satuan Polisi Pemong Praja Sangat dibutuhkan karena dapat membantu plaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin .	Tahunan	Satuan Polisi Pamong Praja
64	Data Jumlah Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Anggota Limas	Jumlah Satuan Limas Dibagi jumlah RT atau sebutan lainnya maka dapat didefinisikan Data jumlah Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin .	Tahunan	Satuan Polisi Pamong Praja

65	Jumlah Zona Pedagang Kaki Lima Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Zona Pedagang Kaki Lima	Bahwa Pedagang Kaki Lima sebagai bentuk usaha masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah, maka dipandang perlu melakukan pemetaan dan pembinaan demi kemajuan usahanya yang diharapkan mampu menunjang perekonomian masyarakat dan mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, rapi dan indah.	Tahunan	Satuan Polisi Pamong Praja
66	Data Zona hijau Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Musi Banyuasin	Zona Hijau Pedagang Kaki Lima	Zona hijau sebagaimana yang dimaksud dan telah diatur dalam peraturan Daerah merupakan wilayah-wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival, dan konsep pujasera dengan ketentuan yang berlaku.	Tahunan	Satuan Polisi Pamong Praja
67	Data Zona Merah Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Musi Banyuasin	Zona Merah Pedagang Kaki Lima	Zona merah sebagaimana yang dimaksud merupakan wilayah sekitar tempat ibadah, rumah sakit, komlek militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan daerah ini.	Tahunan	Satuan Polisi Pamong Praja
68	Jumlah Pegawai ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah ASN	Pegawai ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin sangat menunjang untuk terciptannya ketentaraman dan ketertiban Umum Masyarakat dan Melaksanakan tugas pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Musi Banyuasin.	Tahunan	Satuan Polisi Pamong Praja
69	Data Zona Kuning Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Musi Banyuasin	Zona Kuning Pedagang Kaki Lima	Zona Kuning sebagaimana dimaksud yaitu yang berdasarkan waktu adalah seluruh pasar tumpah di Daerah hanya boleh berdagang pada jam tertentu yaitu mulai pukul ; 22.00 Wib s/d pukul 06.00 Wib, Zona Kuning yang berdasarkan waktu dari pukul 17.00 Wib s/d 04.00 Wib adalah pedagang kuliner sedangkan zona kuning berdasarkan tempat yaitu kantor- kantor pemerintah daerah yang sudah tidak digunakan, depan mall dan sekitar lapangan olahraga yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .	Tahunan	Satuan Polisi Pamong Praja

70	Jumlah Tempat Tidur Rawat Inap per Bangsal / Ruang pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin	Angka penggunaan Tempat Tidur Rawat Inap Per bangsal/ruang	Angka penggunaan Tempat Tidur Rawat Inap Per bangsal/ruang Adalah Jumlah Tempat tidur Rawat Inap yang tersedia per bangsal / ruang rumah sakit.	Tahunan	RSUD Sekayu
71	Jumlah Pemeriksaan Radiologi per Bulan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin	Angka / jumlah pemeriksaan radiologi	Angka / jumlah pemeriksaan radiologi Adalah Prosedur medis yang dilakukan untuk mendiagnosis atau menangani suatu penyakit menggunakan sejumlah media.	Tahunan	RSUD Sekayu
72	Jumlah Kematian menurut Jenis Penyakit per Bulan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin	Angka Kematian menurut jenis penyakit	Angka Kematian menurut jenis penyakit Adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian menurut jenis penyakit yang terjadi di RSUD Sekayu.	Tahunan	RSUD Sekayu
73	Jumlah Kelahiran Bayi per Bulan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin	Angka Kelahiran Bayi	Angka Kelahiran Bayi Adalah angka yang menunjukkan jumlah kelahiran bayi di Rumah Sakit.	Tahunan	RSUD Sekayu
74	Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan, Rawat Inap dan UGD per Bulan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin	Angka Kunjungan Pasien	Angka Kunjungan Pasien Adalah angka yang menunjukkan jumlah Kunjungan Pasien Ke Rumah sakit baik Rawat Jalan, Rawat Inap dan UGD.	Tahunan	RSUD Sekayu
75	Jumlah Tenaga Kesehatan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin	Tenaga Kesehatan	Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.	Tahunan	RSUD Sekayu

76	Jumlah Tempat Tidur Tindakan per Bangsal / Ruang pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin	Angka penggunaan Tempat Tidur Tindakan Per bangsal/ruang	Angka penggunaan Tempat Tidur Tindakan Per bangsal/ruang Adalah Jumlah Tempat tidur tindakan yang tersedia per bangsal / ruang rumah sakit.	Tahunan	RSUD Sekayu
77	Daftar 10 Penyakit Terbesar Rawat Inap pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin	Penyakit terbanyak yang di derita pasien	Pasien yang menerima proses perawatan Rawat Inap oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu.	Tahunan	RSUD Sekayu
78	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin	Angka SDM	Angka SDM Adalah Angka yang merujuk pada SDM yang terkait dengan tenaga kerja atau karyawan yang berkerja di Rumah Sakit.	Tahunan	RSUD Sekayu
79	Daftar 10 Penyakit Terbesar Rawat Jalan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin	Penyakit terbanyak yang di derita pasien	Pasien yang menerima proses perawatan rawat jalan oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu.	Tahunan	RSUD Sekayu
80	Jumlah Ruang Isolasi, Ruang Pengawasan / Intensif, Ruang Tindakan dan Jumlah Tempat Tidur per Bangsal / Ruang pada UPT Rumah Sakit Umum Sungai Lilin	Jumlah Tempat tidur per Bangsal/Ruang	Ruangan adalah bagian dari Ruang merupakan tempat yang dibatasi oleh bidang-bidang fisik maupun non fisik yang memiliki fungsi spesifik. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap	Tahunan	RSUD Sungai Lilin
81	Jumlah Bangsal / Ruang menurut Jenis Kelas pada UPT Rumah Sakit Umum Sungai Lilin	Ruanga Bangsal Menurut Kelas	Ruang adalah gabungan/ kumpulan dari ruanganruangan sesuai fungsi dalam pelayanan Rumah Sakit yang saling berhubungan dan terkait satu sama lain dalam rangka pencapaian tujuan pelayanan kesehatan dari suatu Ruang.	Tahunan	RSUD Sungai Lilin

82	Jumlah Pasien yang dirawat Jalan pada UPT Rumah Sakit Umum Sungai Lilin	Pasien yang dirawat Jalan	Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana sesuai standar.	Tahunan	RSUD Sungai Lilin
83	Jumlah Tenaga Kesehatan pada UPT Rumah Sakit Umum Sungai Lilin	Tenaga Kesehatan	Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.	Tahunan	RSUD Sungai Lilin
84	Jumlah Kejadian Luar Biasa per Kecamatan di Rumah Sakit Umum Sungai Lilin	Kejadian Luar Bisa	Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.	Tahunan	RSUD Sungai Lilin
85	Jumlah Bayi Lahir pada UPT Rumah Sakit Umum Sungai Lilin menurut Jenis Kelamin per Bulan	Bayi Lahir pada RSUD Sungai Lilin	Bayi Baru Lahir adalah bayi umur 0 sampai dengan 28 hari	Tahunan	RSUD Sungai Lilin
86	Jumlah Kematian Ibu dan Bayi pada RSUD Sungai Lilin Menurut Jenis Penyakit Per Bulan	Kematian Ibu dan Anak pada RSUD Sungai Lilin menurut Jenis Penyakit Per Bulan	Angka Kematian Ibu yang selanjutnya disingkat AKI adalah jumlah kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya per 100.000 kelahiran hidup.	Tahunan	RSUD Sungai Lilin
87	Jumlah Kematian pada UPT Rumah Sakit Umum Sungai Llin menurut Jenis Penyakit per Bulan	Kematian pada RSUD Sungai Lilin menurut Jenis Penyakit	Jumlah Kematian merupakan banyaknya pasien dinyatakan telah meninggal dunia dikarenakan berbagai penyakit atau kondisi medis yang tidak dapat diatasi atau karena sebab lainnya.	Tahunan	RSUD Sungai Lilin
88	Jumlah Pelayanan Photorontgen pada UPT Rumah Sakit Umum Lilin per Bulan	Pelayanan Photorontgen	Pelayanan Radiologi Klinik adalah pelayanan medik yang menggunakan semua modalitas yang menggunakan sumber radiasi pegion dan non pegion untuk diagnosis dan/atau terapi dengan panduan imejing.	Tahunan	RSUD Sungai Lilin
89	Jumlah Pelayanan Photorontgen pada UPT Rumah Sakit Umum Bayung per Bulan	Pelayanan Photorontgen	Jumlah Pelayanan Photorontgen Merupakan jumlah pelayanan pemeriksaan penunjang menggunakan mesin X-ray di rumah sakit	Tahunan	RSUD Bayung Lencir

90	Jumlah Pasien yang dirawat Inap pada UPT Rumah Sakit Umum Bayung Lencir	Pasien yang di Rawat Inap	Jumlah pasien rawat inap merupakan jumlah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang mendapatkan pelayanan rawat inap di rumah sakit.	Tahunan	RSUD Bayung Lencir
91	Jumlah Pasien yang dirawat Jalan pada UPT Rumah Sakit Umum Bayung Lencir	Pasien yang di Rawat Jalan	Jumlah pasien rawat jalan merupakan jumlah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang tidak mendapatkan pelayanan rawat inap di rumah sakit.	Tahunan	RSUD Bayung Lencir
92	Jumlah Tenaga Kesehatan pada UPT Rumah Sakit Umum Bayung Lencir	Tenaga Kesehatan	Tenaga Kesehatan merupa orang-orang yang secara profesional memberikan pelayanan kesehatan setelah menempuh pendidikan dan pelatihan formal dalam disiplin ilmu tertentu	Tahunan	RSUD Bayung Lencir
93	Jumlah Bayi Lahir pada UPT Rumah Sakit Umum Bayung Lencir menurut Jenis Kelamin per Bulan	Bayi Lahir	Jumlah bayi lahir merupakan bayi yang telah dilahirkan di rumah Sakit.	Tahunan	RSUD Bayung Lencir
94	Jumlah Kematian pada UPT Rumah Sakit Umum Bayung Lencir menurut Jenis Penyakit per Bulan	Kematian pada UPT RSUD Bayung Lencir Menurut Jenis Penyakit	Jumlah Kematian merupakan banyaknya pasien yang meninggal dirumah sakit dikarenakan penyakit tertentu maupun kematian alami di rumah sakit	Tahunan	RSUD Bayung Lencir
95	Jumlah Bangsal / Ruang menurut Jenis Kelas pada UPT Rumah Sakit Umum Bayung Lencir	Ruang Bangsal Menurut Kelas	Jumlah ruangan bangsal merupakan jumlah ruangan perawatan yang ditempati oleh banyak pasien rawat inap rumah sakit	Tahunan	RSUD Bayung Lencir
96	Jumlah Ruang Isolasi, Ruang Pengawasan / Intensif, Ruang Tindakan dan Jumlah Tempat Tidur per Bangsal / Ruang pada UPT Rumah Sakit Umum Bayung Lencir	Ruang Isolasi, Ruang Pengawasan / Intensif, Ruang Tindakan dan Jumlah Tempat Tidur per Bangsal / Ruang	Jumlah ruangan Isolasi, Ruang Pengawasan/Intensif, Ruang tindakan dan jumlah tempat tidur merupakan jumlah ruangan perawatan dan tempat tidur yang ditempati oleh banyak pasien rawat inap rumah sakit	Tahunan	RSUD Bayung Lencir
97	Jumlah Terkonfirmasi Covid-19 Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Terkonfirmasi Covid-19	Jumlah Terkonfirmasi Covid-19 Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Tahunan	Dinas Kesehatan

98	Indek Keluarga Sehat di Kabupaten Musi Banyuasin	Indeks Keluarga Sehat	Keluarga adalah suatu lembaga yang merupakan suatu(unit) terkecil dari masyarakat, terdiri atas ayah, ibu, anakn dan juga kakek atau nenek atau individu lain yang memiliki hubungan darah, bahkan juga tidak memiliki hubungan darah(misalnya pembantu rumah tangga).	Tahunan	Dinas Kesehatan
99	Angka Kesakitan di Kabupaten Musi Banyuasin	Angka Kesehatan	Angka Kesehatan/Morbiditas/Persentase Penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan, Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan Menenai Derajat Kesehatan suatu masyarakat dapat mmenjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan.	Tahunan	Dinas Kesehatan
100	Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Musi Banyuasin	Angka Usia Harapan Hidup	Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Musi Banyuasin	Tahunan	Dinas Kesehatan
101	Rumah Sakit Rujukan dan Jumlah Tempat Tidur (TT) di Kabupaten Musi Banyuasin	Tempat Tidir Rumah Sakit	Tempat Tidur Rumah sakit yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.	Tahunan	Dinas Kesehatan
102	Banyaknya Bidan PerKecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Bidan	Bidan di Sarana Kesehatan dan Bidan Praktik berdasarkan Kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin.	Tahunan	Dinas Kesehatan
103	Jumlah Stunting pada Balita di Kabupaten Musi Banyuasin	Stunting	Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar.	Tahunan	Dinas Kesehatan
104	Jumlah Puskesmas, RS/Klinik Bersalin, Klinik, Pustu dan Balai Pengobatan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Puskesmas, RS/Klinik Bersalin, Klinik, Pustu dan Balai Pengobatan .	Jumlah Puskesmas, RS/Klinik Bersalin, Klinik, Pastu Dan Balai Pengobatan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin.	Tahunan	Dinas Kesehatan

105	Jumlah Apotik dan Toko Obat Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Apotik dan Toko Obat	Apotik adalah sarana Pelayanan kefermasian tempat dilakukan praktek kefermasian oleh Apoteker, sedangkan Toko Obat dilakukan praktek kefermasian dilakukan oleh Tenaga Teknis Kefermasian	Tahunan	Dinas Kesehatan
106	Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu.	Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin.	Tahunan	Dinas Kesehatan
107	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenisnya di Kabupaten Musi Banyuasin	Tenaga Kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Tenaga Kesehatan (Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Sanitarian, Lainnya) berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin.	Tahunan	Dinas Kesehatan
108	Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Musi Banyuasin	Kasus Penyakit Terbanyak	Kasus Penyakit Terbanyak Yang Terjadi Di Kabupaten Musi Banyuasin	Tahunan	Dinas Kesehatan
109	Jumlah Bayi dan Kematian Bayi dan Balita Kabupaten Musi Banyuasin	Bayi dan Kematian Bayi dan Balita	Jumlah Bayi dan Kematian Bayi dan Balita menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Tahunan	Dinas Kesehatan
110	Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin	Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Musi Banyuasin	Puskesmas, Klinik Bersalin, Puskesmas Pembantu berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Musi Banyuasin..	Tahunan	Dinas Kesehatan
111	Jumlah Penduduk yang Mempunyai Jaminan Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin	Penduduk yang Mempunyai Jaminan Kesehatan	Penduduk yang Mempunyai Jaminan Kesehatan menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin .	Tahunan	Dinas Kesehatan
112	Jumlah Bayi Baru Lahir	Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Tahunan	Dinas Kesehatan
113	Jumlah Dokter di Kabupaten Musi Banyuasin	Dokter	Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin.	Tahunan	Dinas Kesehatan

114	Jumlah Tempat Praktek Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Musi Banyuasin	Tempat Praktek Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi.	Tempat Praktek Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Tahunan	Dinas Kesehatan
115	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Tenaga Kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Tenaga Kesehatan (Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Tenaga Gizi, Ahli Teknologi Laboratorium Medis) berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin.	Tahunan	Dinas Kesehatan
116	Jumlah Bayi Lahir dan Bayi Gizi Buruk Kabupaten Musi Banyuasin	Bayi Lahir, Bayi Gizi Buruk	Jumlah Bayi Lahir, Balita, dan Bayi Gizi Buruk Kabupaten Musi Banyuasin	Tahunan	Dinas Kesehatan
117	Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Musi Banyuasin	Tenaga Kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Tenaga Kesehatan (Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Sanitarian, Lainnya) berdasarkan Puskesmas di Kabupaten Musi Banyuasin.		Dinas Kesehatan
118	Campaign Penduduk Yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan UHC	Jaminan Kesehatan Universal Health Coverage (UHC)	Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dan biaya terjangkau.		Dinas Kesehatan
119	Jumlah Peserta Didik Menurut Kecamatan	Peserta didik	Peserta didik berdasarkan Kecamatan SD dan SMP	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
120	Jumlah Rombel Menurut Jenjang Pendidikan	Rombongan Belajar	Rombongan Belajar berdasarkan jenjang pendidikan SD dan SMP.	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
121	Jumlah Rombel Menurut Kecamatan	Rombongan Belajar	Rombongan Belajar berdasarkan jenjang pendidikan SD dan SMP per Kecamatan.	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

122	Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan	Sekolah	Sekolah berdasarkan jenjang pendidikan SD dan SMP.	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
123	Jumlah Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan	Peserta didik	Peserta didik berdasarkan jenjang pendidikan SD dan SMP.	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
124	Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan	Guru	Guru berdasarkan jenjang pendidikan S1/DIV, S2, S3.	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
125	Jumlah Guru Menurut Kecamatan	Guru	Guru berdasarkan Kecamatan.	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
126	Jumlah Sarana Prasarana Berdasarkan Kecamatan	Sarana Prasarana Pendidikan	Sarana Prasarana Pendidikan berdasarkan Kecamatan.	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
127	Jumlah Siswa Putus Sekolah Berdasarkan Kecamatan	Peserta didik	Peserta didik yang putus sekolah berdasarkan Kecamatan.	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
128	Jumlah Pegawai Menurut Kecamatan	Pegawai	Pegawai berdasarkan Kecamatan.	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
129	Jumlah Guru Berstatus PNS Berdasarkan Kecamatan	Guru	Guru berdasarkan Status PNS per Kecamatan.	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
130	Jumlah Siswa Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan	Peserta didik	Peserta didik yang putus sekolah berdasarkan jenjang pendidikan SD dan SMP.	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
131	Capaian Nilai Ujian Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	Rata-rata nilai ujian SMP	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
132	Jumlah Siswa Belajar Non Formal Kejar Paket	Peserta didik	Peserta didik yang belajar pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

133	Jumlah Guru Yang Bersertifikasi Berdasarkan Kecamatan	Guru	Guru yang mempunyai sertifikat pendidik.	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
134	Jumlah Sarana Prasarana Berdasarkan Jenjang Pendidikan	Sarana Prasarana	Sarana dan prasarana pendidikan pada SD dan SMP.	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
135	Jumlah Guru Berstatus Honorer Berdasarkan Kecamatan	Guru	Guru berdasarkan Status Honorer per Kecamatan.	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
136	Jumlah Organisasi Kesenian dan Kebudayaan	Organisasi Kesenian dan Kebudayaan	Organisasi Kesenian dalam Kab Muba.	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
137	Jumlah Objek Cagar Budaya	Organisasi Kebudayaan	Cagar Budaya dalam Kab Muba yang dimanfaatkan..	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
138	Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan	Sekolah	Sekolah berdasarkan jenjang pendidikan SD dan SMP per Kecamatan	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
139	Jumlah Guru Sekolah Negeri dan Swasta Berdasarkan Kecamatan	Guru	Guru berdasarkan sekolah negeri dan swasta per Kecamatan.	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
140	Data Komunitas Kebudayaan di Kabupaten Musi Banyuasin	Pegawai	Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan S1/DIV, S2, S3.	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
141	Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan	Komunitas Kebudayaan	Komunitas Kebudayaan yang terdata pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
142	Jumlah Peserta Didik Sekolah Negeri dan Swasta Berdasarkan Kecamatan TA 2021/2022	Peserta didik	Peserta didik pada sekolah Negeri dan Swasta berdasarkan Kecamatan tahun ajaran 2021/2022.	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
143	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi	Sekolah, Peserta didik dan Guru	Sekolah, Peserta didik dan Guru Taman Kanak-Kanak (TK) berdasarkan Kecamatan .	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

	Banyuasin TA 2022/2023				
144	Jumlah Peserta Didik Sekolah Negeri dan Swasta Berdasarkan Kecamatan TA 2022/2023	Peserta didik	Peserta didik pada sekolah Negeri dan Swasta berdasarkan Kecamatan tahun ajaran 2021/2022.	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
145	Jumlah Penghuni Panti Asuhan menurut Usia per Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin	Panti Asuhan / Panti Sosial	Rehabilitas sosial dasar anak adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial anak, keluarga anak, dan lingkungan sosial anak. Panti sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sarana untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.	Tahunan	Dinas Sosial
146	Jumlah Panti Asuhan dan Penghuni menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin	Panti Asuhan / Panti Sosial	Rehabilitas sosial dasar anak adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial anak, keluarga anak, dan lingkungan sosial anak. Panti sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sarana untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.	Tahunan	Dinas Sosial
147	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Musi Banyuasin	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.	Tahunan	Dinas Sosial
148	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Pemerdayaan Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan / masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan	Tahunan	Dinas Sosial

			hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.		
149	Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Musi Banyuasin	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerimaan bantuan dan pemerdaan sosial serta potensi dan subur kesejahteraan sosial (PSKS). DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah.	Tahunan	Dinas Sosial
150	Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Penerima Bantuan Iuran (PBI), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Bantuan Iuran Jasmani Kesehatan adalah Iuran program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayar oleh pemerintah. Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.	Tahunan	Dinas Sosial
151	Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Musi Banyuasin	Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	Tahunan	Dinas Sosial
152	Jumlah Program Keluarga Harapan (PKH)	Program Keluarga Harapan (PKH)	Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.	Tahunan	Dinas Sosial
153	Jumlah Penerima BPNT Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan	BPNT	Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warung.	Tahunan	Dinas Sosial

154	Jumlah Penerima PKH Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan	PKH	Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.	Tahunan	Dinas Sosial
155	Korban Bencana Alam	Bencana Alam	Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia, antara lain; Banjir, dan Tanah Longsor.	Tahunan	Dinas Sosial
156	Korban Bencana Sosial	Bencana Sosial	Bencana Sosial adalah bencana yang dilakukan oleh manusia antara lain: Kebakaran, Konflik Sosial, dan Korban Tindak Kekerasan	Tahunan	Dinas Sosial
157	Stok Cadangan Pangan daerah ( Beras (Kg))	Stok Cadangan Pangan daerah	Pengembalian cadangan pangan (beras) yang bertujuan memenuhi cadangan pangan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan
158	Keragaman dan Mutu Gizi Konsumsi Pangan Penduduk	Keragaman dan Mutu Gizi Konsumsi Pangan	Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil,merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan
159	Keragaman Jumlah Bahan Pangan Konsumsi Penduduk	Keragaman Bahan Pangan Konsumsi	Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil,merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan
160	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Musi Banyuasin	PPH	PPH merupakan susunan pangan yang benar-benar menjadi harapan baik di tingkat konsumsi maupun ketersediaan, sertadapat digunakan sebagai pedoman perencanaan dan evaluasi ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk.	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan
161	Persentase Komposisi sampah di Kabupaten Musi Banyuasin	Komposisi Sampah	Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan

162	Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kabupaten Musi Banyuasin	Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauranulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan
163	Perkiraan Jumlah Sampah Perhari Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Smpah Perhari	Perkiraan adalah Jumlah Sisa Kegiatansehari – hari dari manusia dan/atau Proses dari Kegiatan manusia.	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan
164	Jumlah Sarana Pengumpulan Sampah di Kabupaten Musi Banyuasin	Sarana Pengumpulan Sampah	Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi,dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan
165	Jumlah Sampah dan Sampah yang terangkut di Kabupaten Musi Banyuasin	Sampah Yang Terangkut	Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan
166	Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau	Ruang terbuka hijau adalah area memanjang / jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan
167	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Musi Banyuasin	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut.	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan
168	Kelompok Pengelola Sampah Mandiri	Pengelola Sampah Mandiri	Pengelola Sampah Mandiri adalah lembaga, kelompok masyarakat atau perseorangan yang peduli untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri di lingkungannya.	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan
169	Data Persentase Komposisi Sampah di Kab Musi Banyuasin	Data Persentase Komposisi Sampah	Data persentase komposisi sampah adalah data yang menunjukkan proporsi atau persen dari setiap jenis sampah yang terdapat dalam suatu timbunan sampah. Data ini	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan

			penting untuk mengetahui karakteristik, sumber, dan potensi pemanfaatan sampah. Data ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk merencanakan strategi pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.		
170	Data Jumlah Timbunan Sampah Per Kecamatan Berdasarkan Tingkat Penanganan	Data Jumlah Timbunan Sampah	Data jumlah timbunan sampah adalah data yang menggambarkan jumlah sampah yang menumpuk di suatu tempat, baik di tempat pembuangan akhir (TPA), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), maupun di lokasi lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Data ini penting untuk mengetahui kondisi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan efektivitas pengelolaan sampah.	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan
171	Lokasi Pengomposan Sampah Pasar di Kabupaten Musi Banyuasin	Lokasi Pengomposan Sampah Pasar	Lokasi pengomposan sampah pasar adalah tempat untuk mengolah sampah organik yang berasal dari pasar dengan menggunakan proses penguraian biologis. Pengomposan sampah pasar bertujuan untuk mengurangi volume dan berat sampah, menghasilkan pupuk organik, dan mencegah pencemaran lingkungan.	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan
172	Jumlah Sarana / Prasarana Pemrosesan Sampah di Kabupaten Musi Banyuasin	Sarana/Prasana Pemrosesan Sampah	Tempat Pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan
173	Jumlah Penduduk Meninggal Dunia Menurut Kecamatan	Jumlah Kematian	Kematian atau mortalitas menurut WHO adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup (Biro Pusat Statistik).	Tahunan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
174	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan	Penduduk	Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992).	Tahunan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
175	Kepadatan Penduduk per KM2 Menurut Kecamatan	Kepadatan Penduduk	Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan. Secara umum, tingkat kepadatan penduduk (population density) adalah perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah berdasarkan satuan luas tertentu.	Tahunan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

176	Jumlah Penduduk Pindah Pergi	Migrasi Penduduk Keluar	Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional). Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong (push factor) suatu wilayah dan daya tarik (pull factor) wilayah lainnya.	Tahunan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
177	Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama	Penduduk Berdasarkan Agama	Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama.	Tahunan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
178	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	Informasi tentang jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya.	Tahunan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
179	Jumlah Penduduk Pindah Datang	Migrasi Penduduk Masuk	Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional). Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong (push factor) suatu wilayah dan daya tarik (pull factor) wilayah lainnya.	Tahunan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
180	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin Kabupaten Musi Banyuasin	Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.</li> <li>2. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.</li> <li>3. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.</li> <li>4. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu</li> </ol>	Tahunan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

			<p>yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.</p> <p>5. Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya.</p>		
181	Jumlah Penduduk dan Presentase Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Penduduk dan Presentase Pertumbuhan Penduduk	Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Indonesia. Dan Presentase pertumbuhan penduduk adalah ukuran yang menunjukkan perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu.	Tahunan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
182	Jumlah Penduduk , Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun , Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk merupakan angka yang menggambarkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu (Badan Pusat Statistik). Angka pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah dan struktur penduduk beberapa tahun ke depan.	Tahunan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
183	Jumlah Penduduk Warga Negara Asing Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan	Warga Negara Asing (WNA)	Warga Negara Asing (WNA) yaitu seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu, tapi bukan berasal dari negara tersebut dan tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara.	Tahunan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
184	Jumlah Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Menurut Kecamatan	Rumah Tangga (Keluarga)	Keluarga dibentuk dari sekelompok orang yang terikat dan mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Unit keluarga menjadi hal penting untuk berbagai intervensi seperti penanganan kemiskinan, keluarga berencana, kesehatan dan lain sebagainya.	Tahunan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

185	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP Elektronik Menurut Kecamatan	KTP Elektronik	KTP Elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi.	Tahunan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
186	Kepemilikan KTP	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang berumur di bawah 17 tahun tetapi sudah pernah kawin atau disebut penduduk wajib KTP.	Tahunan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
187	Rasio Jenis Kelamin	Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)	Ratio Jenis Kelamin (Sex Ratio/ SR) adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita (Badan Pusat Statistik).	Tahunan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
188	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin	Jumlah penduduk adalah salah satu hal yang penting untuk diketahui oleh suatu negara, karena berkaitan dengan berbagai aspek pembangunan, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan lingkungan hidup. Dan Rasio Jenis Kelamin (RJK) adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan.	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
189	Jumlah dan Klasifikasi Bumdes Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Bumdes	BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
190	Jumlah Desa / Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Pendataan jumlah jumlah desa dan kelurahan yang ada di kabupaten musu banyuasin	Didalam kabupaten musin banyuasin terdapat 227 desa dan 13 kelurahan .	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

191	Jumlah Status Desa yang Mengalami Perkembangan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Desa yang mengalami perkembangan	Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Penentuan keadaan perkembangan desa melalui perhitungan dan penentuan status desa dalam bentuk IDM (Indeks Desa Membangun) dengan tolak ukur yang berkenaan dengan 1. Indeks Ketahanan Sosial 2. Indeks Ketahanan Ekonomi 3. Indeks Ketahanan Lingkungan Di 229 desa di kabupaten musu banyuasin .	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
192	Persentase Dana Desa untuk BLT dan Jumlah Penerima Manfaat Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Dana Desa dan BLT	Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan  Bantuan Langsung tunai dana desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem  BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
193	Jumlah Kelompok Industri Kerajinan Binaan DPMD Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Kelompok Industri Kerajinan	Pemberdayaan masyarakat desa dalam program pelatihan peningkatan keterampilan dan bantuan alat industri .	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
194	Jumlah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	kepala desa, Perangkat desa dan anggota BPD	Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.  Perangkat desa adalah unsur staf adalah unsur pendukung tugas	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

			<p>kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan</p> <p>Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</p>		
195	Jumlah Anggota LPM Menurut Kecamatan DI Kabupaten Musi Banyuasin	Data Anggota LPM yang ada di kabupaten musu banyuasin	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPM Desa adalah lembaga mitra strategis diluar Pemerintahan Desa yang membantu dalam meningkatkan partisipasi dan pelayanan penyelenggaraan masyarakat Desa.	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
196	Jumlah Dusun, RW dan RT Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Dusun, RW dan RT	Dusun, RW dan RT adalah istilah yang digunakan untuk menyebut unit-unit pemerintahan dan kemasyarakatan di tingkat terendah di Indonesia.	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
197	Indeks Desa Membangun (IDM) Per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi desa perkecamatan.	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
198	Indeks Desa Membangun (IDM) Per Desa di Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin	Indeks Desa Membangun (IDM) per desa	Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi per desa .	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
199	Jumlah Bantuan Yang Diberikan Ke Desa	Bantuan Dasa	Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten / kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
200	Jumlah Menara Telekomunikasi Kabupaten Musi Banyuasin	Kecamatan dan jumlah menara telekomunikasi	Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang didirikan untuk kepentingan umum diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan	Tahunan	Dinas Komunikasi Dan Informatika

			umum yang struktur fisiknya dapat berupa bentuk tunggal tapa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.		
201	Jumlah Informasi yang di Publikasi melalui Berbagai Media (Website, Media Sosial, Radio)	Media (website, media sosial, radio) dan Jumlah Media	Penyebarluasan Informasi pada media massa menimbulkan keserempakan artinya suatu pesan dapat diterima oleh komunikan yang jumlah relatif banyak. Jadi untuk menyebarkan informasi, media massa sangat efektif yang dapat mengubah sikap, pendapat dan prilaku komunikasi.	Tahunan	Dinas Komunikasi Dan Informatika
202	Aplikasi Sistem Informasi di Kabupaten Musi Banyuasin	Aplikasi Sistem Informasi	Aplikasi Sistem Informasi adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyajikan data atau informasi secara elektronik	Tahunan	Dinas Komunikasi Dan Informatika
203	Jaringan Backbone Kabupaten Musi Banyuasin	Nama instansi dan IP Jaringan Backbone	merupakan penyediaan jaringan backbone internet yang bertujuan sebagai jaringan intra pemerintah yang menghubungkan seluruh perangkat daerah di kota sekayu.	Tahunan	Dinas Komunikasi Dan Informatika
204	Media Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat	surat kabar (nasional, regional, lokal)	Terdapat beberapa media yang mampu menghubungkan komunikasi antar pemerintah dan masyarakat diantaranya media sosial. Berita muba, pemkab muba, dinkominfo, radio gema randik.	Tahunan	Dinas Komunikasi Dan Informatika
205	Daftar Perangkat Daerah yang Telah Merealisasikan PPID	Perangkat Daerah	perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.	Tahunan	Dinas Komunikasi Dan Informatika
206	Jumlah Wartawan Menurut Media Massa	Media massa dan jumlah wartawan	Surat Penawaran dan Kerjasama Media	Tahunan	Dinas Komunikasi Dan Informatika
207	Jumlah Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi (Wifi, CCTV, Website)	Pelayanan publik (wifi, cctv, website) dan jumlah pelayanan publik	Layanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.	Tahunan	Dinas Komunikasi Dan Informatika

208	Jumlah Kerjasama dengan Media Massa (Elektronik dan Online)	Kerjasama dengan media massa (elektronik dan online)	Merupakan alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, TV.	Tahunan	Dinas Komunikasi Dan Informatika
209	Jumlah Stasiun Radio Menurut Nama Stasiun, Nama Perusahaan dan Tahun Berdiri	Nama stasiun, nama perusahaan, tahun berdiri, frekuensi	Jumlah Stasiun Radio didefinisikan sebagai jumlah radio yang masih aktif beroperasi dan memiliki izin siar berdasarkan frekuensi yang telah diatur dalam undang undang yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik.	Tahunan	Dinas Komunikasi Dan Informatika
210	Jumlah Pengaduan Masyarakat Menurut SP4N-LAPOR!	SP4N-LAPOR	SP4N-LAPOR! adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap Penyelenggara pelayanan publik dan dikelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan Kantor Staf Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia.	Tahunan	Dinas Komunikasi Dan Informatika
211	Sistem Informasi di Kabupaten Musi Banyuasin	Sistem Informasi	Sistem Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.	Tahunan	Dinas Komunikasi Dan Informatika
212	Fasilitas Wifi Publik di Kecamatan Sekayu	Titik Lokasi Wifi	Wifi Publik merupakan program penyediaan jaringan internet gratis bagi masyarakat yang tersebar di beberapa titik di kota sekayu seperti taman, tempat umum, dan tempat perkumpulan masyarakat lainnya.	Tahunan	Dinas Komunikasi Dan Informatika
213	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Izin Usaha Mikro (IUMK) Perseorangan di kabupaten musu Banyuasin	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Izin Usaha Mikro (IUMK) Perseorangan	Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha dan merupakan tanda legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha berskala mikro dan kecil yang menjalankan kegiatan ekonomi secara perorangan. (Berdasarkan PP No. Tahun 2021 SIUP diganti dengan NIB).	Tahunan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

214	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Izin Usaha Mikro (IUMK) Badan Usaha di kabupaten Musi Banyuasin	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Izin Usaha Mikro (IUMK) Badan Usaha	Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha dan merupakan tanda legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha berskala mikro dan kecil yang menjalankan kegiatan ekonomi secara perorangan. (Berdasarkan PP No. Tahun 2021 SIUP diganti dengan NIB).	Tahunan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
215	Izin Reklame di Kabupaten Musi Banyuasin	Izin Reklame	Izin yang dilakukan untuk penyelenggaraan reklame.	Tahunan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
216	Rekapitulasi Penerbitan Izin Tertentu	Penerbitan Izin Tertentu	Non Perizinan.	Tahunan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
217	Jumlah Izin Tanda Daftar	Izin yang terdaftar	Izin Tanda Daftar merupakan dokumen pengesahan bahwa suatu usaha telah melakukan kewajiban pendaftaran perusahaan. (tidak diberlakukan lagi Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021).	Tahunan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
218	Jumlah Izin Sarana Kesehatan	Izin Sarana Kesehatan	Izin yang diterbitkan bagi pelaku usaha yang menyediakan usaha sarana kesehatan.	Tahunan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
219	Jumlah Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Musi Banyuasin	Izin Mendirikan Bangunan	IMB adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan yang memiliki bangunan untuk melakukan usaha untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, merawat atau merobohkan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.(Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 IMB diganti menjadi PBG, dan kewenangan kepada Dinas Perkim) .	Tahunan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
220	Jumlah Izin Usaha di Kab Musi Banyuasin	Izin Usaha	Jumlah Izin Usaha di Kab Musi Banyuasin sebanyak 368 jenis izin usaha .	Tahunan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

221	Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kabupaten Musi Banyuasin	Nomor Induk Berusaha (NIB)	NIB merupakan identitas izin usaha yang diterbitkan lembaga OSS.	Tahunan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
222	Unmet Need	Unmet Need	Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi.	Tahunan	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
223	Persentase Peserta KB Aktif Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Peserta KB Aktif	Pasangan Usia Subur yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa di selingi kehamilan.	Tahunan	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
224	Persentase Peserta KB Baru Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Persentase Peserta KB Baru	Banyaknya pasangan usia subur yang pertama kali mendapat kan pelayanan KB .	Tahunan	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
225	Jumlah Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin .	Jumlah Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	Jumlah Peserta KB Baru yang menggunakan salah satu metode kontrasepsi jangka panjang seperti implant, MOW, dan MOP.	Tahunan	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
226	Jumlah Pasangan Usia Subur Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Pasangan Usia Subur	Pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 th sampai dengan 50 tahun	Tahunan	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
227	Persentase Peserta KB Aktif MKJP di Kabupaten Musi Banyuasin	Peserta KB Aktif MKJP	Pasangan Usia Subur yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi Jangka Panjang tanpa di selingi kehamilan	Tahunan	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
228	Jumlah Drop Out KB Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Drop Out KB	Akseptor yang menghentikan kontrasepsi lebih dari 3 bulan .	Tahunan	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

229	Jumlah Fasilitas Kesehatan KB Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Fasilitas Kesehatan KB	Fasilitas kesehatan yang mampu memberikan pelayanan kontrasepsi	Tahunan	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
230	Jumlah Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi tanpa di selingi kehamilan lebih dari 3 bulan sampai seumur hidup	Tahunan	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
231	Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pembantu pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin .	Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pembantu pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	Fasilitas dan atau tempat pelayanan KB	Tahunan	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
232	Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif	Jumlah Pasangan Suami istri yang usia perempuannya 15-49 tahun. Akseptor yang pada saat ini sedang memakai kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan dan masih terlindungi efek kontrasepsinya.	Tahunan	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
233	Jumlah Peserta KB Baru yang Dilayani Faskes KB Swasta	Peserta KB Baru	Pasangan usia subur yang baru pertama kali mendapatkan pelayanan KB di fasilitas kesehatan swasta.	Tahunan	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
234	Data Jumlah PUS dan Kesertaan JKN	PUD dan JKN	Pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 th sampai dengan 50 tahun JKN merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory).	Tahunan	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
235	Jumlah Peserta KB Baru yang Dilayani Faskes KB Pemerintah	Peserta KB Baru yang Dilayani Faskes KB Pemerintah	Pasangan usia subur yang baru pertama kali mendapatkan pelayanan KB di fasilitas kesehatan pemerintah.	Tahunan	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

236	Jumlah Posyandu Balita dan Posyandu Lansia per Kecamatan	Posyandu Balita dan Posyandu Lansia	Pelayanan kepada balita dan anak dengan melakukan penimbangan agar bisa di pntau pertumbuhan dan perkembangan balita dan anak	Tahunan	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
237	Jumlah Akseptor Baru Menurut Jenis Kontrasepsi dan Bulan di Kabupaten Musi Banyuasin	Akseptor Baru	pengertian akseptor baru adalah pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi dan/atau pasangan usia subur yang menggunakan kembali salah satu cara/alat kontrasepsi setelah mereka berakhir masa kehamilannya (baik kehamilan yang berakhir dengan keguguran, lahir mati ataupun lahir hidup).	Tahunan	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
238	Jumlah Akseptor Baru Menurut Jenis Kontrasepsi dan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Akseptor Baru	pengertian akseptor baru adalah pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi dan /atau pasangan usia subur yang menggunakan kembali salah satu cara/alat kontrasepsi setelah mereka berakhir masa kehamilannya (baik kehamilan yang berakhir dengan keguguran, lahir mati ataupun lahir hidup).	Tahunan	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
239	Total Fertility Rate	Total Fertility Rate	Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seseorang perempuan usia 15-49 tahun.	Tahunan	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
240	Pasangan Usia Subur (PSU)	Pasangan Usia Subur (PSU)	Pasangan suami istri yang istrinya berusia 15-49 tahun dan masih haid atau pasangan suami istri yang istrinya kurang dari 15 tahun dan sudah haid	Tahunan	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
241	Peserta KB Aktif	Peserta KB Aktif	Akseptor yang pada saat ini sedang memakai kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan dan masih terlindungi oleh efek kontarepsinya.	Tahunan	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
242	Jumlah Pasangan Usia Subur (PA)	Pasangan Usia Subur (PA)	Jumlah pasangan usia subur yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan atau keguguran	Tahunan	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

243	Persentase Unmet Need	Persentase Unmet Need	Persentase pasangan usia subur yang menikah atau hidup bersama (seksual aktif) yang tidak ingin punya anak lagi atau yang ingin menjarangkan kehamilan tetapi tidak menggunakan alat atau cara kontrasepsi.	Tahunan	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
244	Persentase Peserta KB Baru MKJP di Kabupaten Musi Banyuasin	Persentase Peserta KB Baru MKJP	Persentase Peserta KB Baru yang menggunakan salah satu metode kontrasepsi jangka panjang seperti implant, MOW, dan MOP.	Tahunan	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
245	Data Hotel di Kabupaten Musi Banyuasin	Hotel	Data usaha penyedia penginapan meliputi nama hotel, alamat, kelas hotel, jumlah kamar, jumlah tempat tidur, jumlah tenaga kerja laki-laki, jumlah tenaga kerja perempuan dan total jumlah tenaga kerja.	Tahunan	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata
246	Banyaknya Atlet Menurut Cabang Olahraga	Atlet	Atlet atau Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.	Tahunan	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata
247	Banyaknya Perolehan Medali Bidang Olah Raga yang diraih oleh Atlet	Prestasi	Prestasi minimal tingkat provinsi yang diraih oleh atlet atau peolahraga yang dibina maupun secara mandiri, termasuk namun tidak terbatas pada atlet olahraga pelajar, olahraga prestasi dan atau olahraga rekreasi/masyarakat.	Tahunan	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata
248	Jumlah Pelatih Olahraga	Pelatih	Pelatih berlisensi berdasarkan peraturan yang berlaku pada cabang olahraga yang bersangkutan	Tahunan	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata
249	Banyaknya Wasit Olah Raga	Wasit	Wasit berlisensi berdasarkan peraturan yang berlaku pada cabang olahraga yang bersangkutan.	Tahunan	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata
250	Jumlah National Paralympic Committee Indonesia	Atlet	Jumlah atlet NPC berdasarkan cabang olahraga dan jenis Kelamin.	Tahunan	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata
251	Restoran dan Rumah Makan di Kabupaten Musi Banyuasin	Rumah Makan/Restoran	Rumah Makan / Restoran merupakan suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial	Tahunan	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata
252	Data Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Musi Banyuasin	Organisasi Kepemudaan	Organisasi kepemudaan yang masih aktif dan terdaftar yang beroperasi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin	Tahunan	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata

253	Data Tempat Rekreasi di Kabupaten Musi Banyuasin	Tempat Rekreasi	Data nama-nama tempat rekreasi beserta alamatnya.	Tahunan	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata
254	Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Akomodasi	Akomodasi merupakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha ini meliputi jumlah Hotel, Motel, Guest House, Wisma, Penginapan, Vila, Rumah Wisata, Apartemen dan lain-lain.	Tahunan	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata
255	Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Rumah Makan/Restoran	Rumah Makan / Restoran merupakan suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial	Tahunan	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata
256	Jumlah Objek Wisata Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Objek Wisata	Objek daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.	Tahunan	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata
257	Akomodasi Hotel Menurut Jumlah Kamar dan Tempat Tidur di Kabupaten Musi Banyuasin	Akomodasi	Akomodasi merupakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Data ini meliputi jumlah kamar dan jumlah kasur di tiap hotel	Tahunan	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata
258	Jumlah Fasilitas Pariwisata	Fasilitas Pariwisata	Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata, seperti akomodasi (hotel/ penginapan, restoran/ tempat makan), fasilitas pendukung (musholla, tempat parkir, toilet) dan fasilitas penunjang (papan petunjuk arah).	Tahunan	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata
259	Data Desa Wisata	Desa Wisata	Jumlah desa wisata yang lokasinya telah ditetapkan dengan Surat Keputusan.	Tahunan	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata
260	Banyaknya Sarana Olah Raga per Kecamatan	Sarana Olahraga	Sarana olahraga berupa lapangan olahraga baik indoor maupun outdoor, gedung olahraga baik tertutup maupun terbuka,	Tahunan	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata

261	Jumlah OPD Menurut Katagori Nilai Pengawasan Arsip	Pengawasan Kearsipan	Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan	Tahunan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
262	Jumlah Anggota Perpustakaan Menurut Bulan	Anggota Perpustakaan	Pengunjung Perpustakaan yang telah mendaftar jadi anggota perpustakaan baik secara online maupun offline yang memilih hak dan kewajiban sebagai anggota perpustakaan	Tahunan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
263	Koleksi Buku Perpustakaan Elektronik	Buku Elektronik	Koleksi buku elektronik buku yang berbentuk elektronik atau digital yang berisi informasi atau panudan,tutorial,novel,layaknya buku pada umumnya e Book (Elektronik book) ini hanya bisa dibuka dan dibaca dengan menggunakan perangkat gadget, tablet dan handphone pintar.	Tahunan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
264	Koleksi Buku Perpustakaan Konvensional	Buku Konvensional	Buku Konvensional adalah buku yang dicetak pada kertas dan dapat dipegang secara fisik	Tahunan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
265	Jumlah Koleksi Perpustakaan Umum	Jumlah Koleksi Perpustakaan Umum	Jumlah koleksi perpustakaan umum adalah jumlah bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan umum untuk dipinjam atau dibaca oleh masyarakat. Jumlah koleksi perpustakaan umum dapat bervariasi tergantung pada jenis, ukuran, dan kebutuhan perpustakaan umum tersebut.	Tahunan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
266	Jumlah Perpustakaan Menurut Sekolah dan Kecamatan	Perpustakaan Menurut Sekolah Dan Kecamatan	Perpustakaan Sekolah adalah Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan sedangkan perpustakaan Kecamatan adalah perpustakaan yang ada diwilayah pemerintahan tingkat kecamatan yang memenuhi standar perpustakaan.	Tahunan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
267	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum per Bulan	Pengunjung Perpustakaan	Pengunjung Perpustakaan adalah Pengguna Perpustakaan yaitu perorangan, kelompok, orang , masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.	Tahunan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

268	Jumlah Koleksi Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data Jumlah Koleksi Arsip	Himpunan arsip dan/atau menuaskrip yang dikumpulkan dari berbagai sumber sehingga merupakan suatu khsanah informasi mengenai seseorang/keluarga /institusi/tema/topik/peristiwa tertentu.pada umumnya merupakan hasil pengumpulan yang dilakukan karena minat pada sesuatu tema orang, peristiwa atau jenis dokumen.	Tahunan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
269	Perpustakaan yang Terakreditasi	Perpustakaan Terakreditasi	Perpustakaan Terakreditasi adalah rangkaian kegiatan proses pengakuan formal oleh LAP-PNRI yang menyatakan bahwa suatu lembaga perpustakaan telah memenuhi persyaratan minimal untuk melakukan kegiatan pengelolaan perpustakaan.	Tahunan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
270	Jumlah Arsip Digital	Arsip Digital	Arsip digital adalah arsip yang dapat disimpan dan ditransmisikan dalam bentuk terputus-putus atau dalam bentuk kode-kode biner yang dapat dibuka,dibuat atau dihapus dengan alat komputasi yang dapat membaca atau mengolah data dalam bentuk biner, sehingga arsip dapat digunakan atau di manfaatkan.	Tahunan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
271	Titik Layanan Perpustakaan Keliling	Layanan Perpustakaan	Layanan Perpustakaan adalah pemberian informasi dan fasilitas perpustakaan kepada pengguna dengan cepat,tepat waktu dan benar baik yang datang langsung ke perpustakaan maupun melalui perpustakaan keliling.	Tahunan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
272	Jumlah Arsip yang di pelihara	Arsip yang di pelihara	Arsip yang dipelihara arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang ahrus dijaga keutuhan, keamanan dan keselamatannya.	Tahunan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
273	Jumlah Produksi (Ton) Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Produksi	Data Jumlah Produksi (Ton) perikanan tangkap merupakan hasil penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap dari sumber perikanan alami, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Volume Produksi dihitung dalam bentuk berat basa ikan hasil tangkap.	Tahunan	Dinas Perikanan

274	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Rumah Tangga	Rumah tangga yang melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual.	Tahunan	Dinas Perikanan
275	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya (Unit) per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Rumah Tangga	Data ini merupakan Data Rumah tangga yang melakukan kegiatan usaha budidaya perikanan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual.	Tahunan	Dinas Perikanan
276	Luas Area (Ha) Rumah Tangga Perikanan Budidaya Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Musi Banyuasin	Luas	Data Luas Area (Ha) Rumah Tangga Perikanan Budidaya Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Musi Banyuasin.	Tahunan	Dinas Perikanan
277	Jumlah Produksi Ikan Budidaya (Ton) Perjenis Ikan Dengan Metode Budidaya Di Tambak Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Musi Banyuasin	Produksi	Jumlah Produksi Ikan Budidaya (Ton) Perjenis Ikan Dengan Metode Budidaya Di Tambak Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Musi Banyuasin.	Tahunan	Dinas Perikanan
278	Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Musi Banyuasin (ton)	Produksi	Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Musi Banyuasin (ton) 2022.	Tahunan	Dinas Perikanan
279	Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Musi Banyuasin (ton)	Produksi	Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Musi Banyuasin (ton), 2022.	Tahunan	Dinas Perikanan
280	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Musi Banyuasin	Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2022.	Tahunan	Dinas Perikanan
281	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut	Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Musi Banyuasin	Tahunan	Dinas Perikanan

	Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Musi Banyuasin				
282	Jumlah Produksi Ikan Budidaya (Ton) Perjenis Ikan Dengan Metode Budidaya Di Keramba Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Musi Banyuasin	Produksi	Jumlah Produksi Ikan Budidaya (Ton) Perjenis Ikan Dengan Metode Budidaya Di Keramba Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Musi Banyuasin.	Tahunan	Dinas Perikanan
283	Jumlah Produksi Ikan Budidaya (Ton) Perjenis Ikan Dengan Metode Budidaya Di Kolam Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Musi Banyuasin	Produksi	Jumlah Produksi Ikan Budidaya Perjenis Ikan Dengan Metode Budidaya Di Kolam Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Musi Banyuasin.	Tahunan	Dinas Perikanan
284	Jumlah Luas Tanaman Puso Karena Serangan OPT dan DPI Tanaman Pangan (Padi) di Kabupaten Musi Banyuasin	Tanaman Puso Karena Serangan OPT dan DPI Tanaman Pangan (Padi)	Luas tanaman yang mengalami puso/kerusakan yang diakibatkan oleh serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan/atau sebab lainnya (gempa bumi, dll), sedemikian rupa sehingga hasilnya kurang dari atau sama dengan 11% dari keadaan normal tanpa melihat kerusakan terjadi sebelum atau sesudah masa generatif.	Tahunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan
285	Jumlah Produksi Tanaman Sayuran Cabai Besar (Ton) dan Cabai Rawit (Ton) di Kabupaten Musi Banyuasin	Produksi Tanaman Sayuran Cabai Besar (Ton) dan Cabai Rawit (Ton)	Luas tanaman yang mengalami puso/kerusakan yang diakibatkan oleh serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan/atau sebab lainnya (gempa bumi, dll), sedemikian rupa sehingga hasilnya kurang dari atau sama dengan 11% dari keadaan normal tanpa melihat kerusakan terjadi sebelum atau sesudah masa generatif.	Tahunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan
286	Jumlah Produksi Telur dan Daging di Kabupaten Musi Banyuasin	Produksi Telur dan Daging	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah produksi telur unggas (ayam buras, ayam ras petelur, burung puyuh, dan itik) selama setahun, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan ke orang lain</li> <li>- Karkas hasil pemotongan ternak di wilayah tersebut ditambah dengan bagian yang dapat dimakan (edible portion) selama waktu tertentu.</li> </ul>	Tahunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan

287	Luas Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Musi Banyuasin	Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B)	Bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.	Tahunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan
288	Produksi Tanaman Pangan Padi dan Jagung di Kabupaten Musi Banyuasin	Tanaman Pangan Padi dan Jagung	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan.	Tahunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan
289	Jumlah Produksi Tanaman Buah-Buahan di Kabupaten Musi Banyuasin	Produksi Tanaman Buah-Buahan	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/ semester laporan.	Tahunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan
290	Jumlah Populasi Ternak Kecil, Ternak Besar dan Unggas di Kabupaten Musi Banyuasin	Populasi Ternak Kecil, Ternak Besar dan Unggas	Kumpulan atau jumlah ternak yang hidup pada wilayah dan waktu tertentu, kecuali ayam ras pedaging	Tahunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan
291	Luas Panen Tanaman Pangan Padi dan Jagung di Kabupaten Musi Banyuasin	Panen Tanaman Pangan Padi dan Jagung	Luas areal yang dipanen dalam satuan Hektar (Ha).	Tahunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan
292	Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (kuintal)	Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan.	Tahunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan
293	Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (ha)	Panen Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman	Luas areal yang dipanen dalam satuan Hektar (Ha).	Tahunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan
294	Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Musi	Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan.	Tahunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan

	Banyuasin (kuintal)				
295	Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (m2)	Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman	Luas areal yang dipanen dalam satuan Hektar (Ha).	Tahunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan
296	Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (m2)	Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman	Luas areal yang dipanen dalam satuan Hektar (Ha).	Tahunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan
297	Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (kg)	Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan.	Tahunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan
298	Luas Panen Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (m2)	Panen Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman	Luas areal yang dipanen dalam satuan Hektar (Ha).	Tahunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan
299	Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (ha)	Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman	Luas areal yang dipanen dalam satuan Hektar (Ha).	Tahunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan
300	Luas Panen Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (m2)	Panen Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman	Luas areal yang dipanen dalam satuan Hektar (Ha).	Tahunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan
301	Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (kuintal)	Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan.	Tahunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan

302	Produksi Buah–Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (ton)	Produksi Buah–Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan.	Tahunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan
303	Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Musi Banyuasin	Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak	Kumpulan atau jumlah ternak yang hidup pada wilayah dan waktu tertentu, kecuali ayam ras pedaging	Tahunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan
304	Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Musi Banyuasin	Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas	Kumpulan atau jumlah ternak yang hidup pada wilayah dan waktu tertentu, kecuali ayam ras pedaging	Tahunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan
305	Luas Panen Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin (ha)	Luas Panen Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kecamatan	Luas areal yang dipanen dalam satuan Hektar (Ha).	Tahunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan
306	Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin (ton)	Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kecamatan	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan.	Tahunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan
307	Luas Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin (ha)	Luas Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar	Luas areal yang dipanen dalam satuan Hektar (Ha).	Tahunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan
308	Produksi Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin (ton)	Produksi Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan.	Tahunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan
309	Tabel Produksi Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (tangkai)	Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan.	Tahunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan

310	Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (tangkai)	Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan.	Tahunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan
311	Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Sawit Menurut Kecamatan	Tanaman Perkebunan Sawit	Data keseluruhan Luas dari Perkebunan Kelapa Sawit (ha) dan Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Sawit (Ton) di pada setiap Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin.	Tahunan	Dinas Perkebunan
312	Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Kelapa Menurut Kecamatan	Tanaman Perkebunan Kelapa	Data keseluruhan Luas dari Perkebunan Kelapa (ha) dan Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Kelapa (Ton) di pada setiap Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Tahunan	Dinas Perkebunan
313	Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Kakao Menurut Kecamatan	Tanaman PerkebunaKokoa	Data keseluruhan Luas dari Perkebunan Kokoa (ha) dan Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Kokoa (Ton) di pada setiap Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin.	Tahunan	Dinas Perkebunan
314	Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Karet Menurut Kecamatan	Tanaman PerkebunaKaret	Data Keseluruhan Luas Dari Perkebunan Karet (ha) dan Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Karet (Ton) pada setiap Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin.	Tahunan	Dinas Perkebunan
315	Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Kopi Menurut Kecamatan	Tanaman Perkebunan Kopi	Data Keseluruhan Luas Dari Perkebunan Kopi (ha) dan Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Kopi (Ton) pada setiap Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin.	Tahunan	Dinas Perkebunan
316	Luas Areal Tanaman Perkebunan dan Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Komoditas	Perkebunan Rakyat	Data Keseluruhan Luas dari Perkebunan Milik Rakyat/Masyarakat (ha) dan Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Milik Rakyat/Masyarakat (Ton) pada seetiap Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin.	Tahunan	Dinas Perkebunan

317	Jumlah Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) Menurut Kecamatan	Pabrik Pengolahan Kalapa Sawit (PKS)	Data Keseluruhan Luas Dan Perkebunan Sawit (ha) dan Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Sawit (Ton) pada setiap Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin .	Tahunan	Dinas Perkebunan
318	Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Gambir Menurut Kecamatan	Tanaman Perkebunan Gambir	Data Keseluruhan Luas dari Peremajaan Perkebunan (ha) dan jumlah Produksi Tanaman Peremajaan Perkebunan Gambir (Ton) Pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin.	Tahunan	Dinas Perkebunan
319	Jumlah Lahan Peremajaan Perkebunan	Peremajaan Perkebunan	Jumlah Lahan Peremajaan Perkebunan.	Tahunan	Dinas Perkebunan
320	Jumlah Kelompok Unit Usahan Pengolahan & Pemasaran Bokar (UPPB) Menurut Kecamatan	Kelompok Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB)	Data Dari Kelompok Unit Usaha Pemasara Bokar (UPPB) pada setiap Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin.	Tahunan	Dinas Perkebunan
321	Luas Areal Tanaman Perkebunan dan Produksi Perkebunan Rakyat, Inti, dan Plasma Menurut Komoditas	Perkebunan Rakyat, Inti, dan Plasma	Data Keseluruhan Luas, dari Tanaman Perkebunan dan Produksi Perkebunan Rakyat, Inti, dan Plasma (ha) dan Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan dan Produksi Perkebunan Rakyat, Inti, Plasma (Ton) pada Kabupaten Musi Banyuasin.	Tahunan	Dinas Perkebunan
322	Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (ha)	Tanaman Perkebunan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (ha)	Data Keseluruhan dari Setiap Tanaman Perkebunan di Kabupaten Musi Banyuasin (ha).	Tahunan	Dinas Perkebunan
323	Luas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin (hektar)	Luas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit	Data Keseluruhan Luas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dan Prusahaan di Kabupaten Musi Banyuasin .	Tahunan	Dinas Perkebunan
324	Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (ton)	Produksi Perkebunan	Data Keseluruhan Perproduksi dari Setiap Tanaman Perkebunan di Kabupaten Musi Banyuasin.	Tahunan	Dinas Perkebunan

325	Luas Tanaman Perkebunan Tanaman Karet Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin (ha)	Perkebunan Tanaman Karet	Data Keseluruhan Luas Tanaman Perkebunan Karet Rakyat dan Perusahaan di Kabupaten Musi Banyuasin.	Tahunan	Dinas Perkebunan
326	Jumlah Industri Besar	Industri Besar yang ada di Kabupten Musi Banyuasin	Mendapatkan Jumlah Industri Besar pada periode tertentu disuatu wilayah sehingga diperoleh gambaran jumlah Jumlah Industri Besar di daerah tersebut.	Tahunan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
327	Jumlah Investasi Industri per Kecamatan	Investasi Industri Perkecamatan	Untuk Jumlah Investasi industri per kecamatan sehingga diperoleh gambaran potensi Investasi industri wilayah tersebut.	Tahunan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
328	Jumlah Industri Kecil	Data Jumlah Industri Kecil	Mendapatkan Jumlah Industri Kecil pada periode tertentu disuatu wilayah sehingga diperoleh gambaran jumlah Jumlah Industri Kecil di daerah tersebut	Tahunan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
329	Jumlah Nilai Produksi Industri per Kecamatan (Jutaan Rupiah)	Nilai produksi Industri perkecamatan	Mendapatkan Jumlah nilai produksi pada periode tertentu disuatu wilayah sehingga diperoleh gambaran produksi perusahaan industri di daerah tersebut.	Tahunan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
330	Harga Sayur Mayur Per Bulan	Data Harga sayur mayur	Mendapatkan Jumlah Industri Besar pada periode tertentu disuatu wilayah sehingga diperoleh gambaran jumlah Jumlah Industri Besar di daerah tersebut.	Tahunan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
331	Harga Bahan Pokok per Bulan	Data Harga Bahan Pokok	Tujuan : untuk mengetahui perkembangan harga rata - rata bahan pokok. manfaat : data bahan kebutuhan pokok merupakan data pendukung untuk menghitung laju inflasi.	Tahunan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
332	Jumlah Pedagang Menurut Jenis dan Kecamatan	Data Jumlah dan jenis Pedagang	Untuk mengetahui jumlah Pedagang	Tahunan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

333	Jumlah Pasar Tradisional di Kab Musi Banyuasin	Data Jumlah Pasar Tradisional	Mendapatkan Jumlah Pasar Tradisional di Kab Musi Banyuasin.	Tahunan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
334	Jumlah Kelompok Pengrajin Kain Gambo	Data Kelompok Pengrajin Kain Gambo	Untuk mengetahui jumlah Kelompok Pengrajin Kain Gambo.	Tahunan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
335	Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Data jumlah pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin 2022	Untuk mengetahui jumlah Pedagang .	Tahunan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
336	Jumlah Pasar Menurut Jenis Pasar di Kabupaten Musi Banyuasin	Data Jumlah Pasar Menurut Jenis pasar di Kabupaten Musi Banyuasin	Untuk Mendapatkan Data Jumlah Pasar Menurut jenis Pasar di Kabupaten Musi Banyuasin	Tahunan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
337	Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Musi Banyuasin	Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Musi Banyuasi	Mendapatkan Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Musi Banyuasin	Tahunan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
338	Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Musi Banyuasin	Sarana perdagangan	Sarana perdagangan adalah fasilitas atau tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan dalam negeri, seperti pasar, toko, mall, supermarket, dan sebagainya	Tahunan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
339	Jumlah Pasar Menurut Jenisnya di Kecamatan	Data Pasar Menurut Jenis di Kecamatan	Untuk Mengetahui Jumlah Pasar Menurut Jenis di Kecamatan	Tahunan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
340	Jumlah Sentra Industri	Data Sentra Industri	Mendapatkan Jumlah sentra Industri	Tahunan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

341	Jumlah Unit Usaha Industri per Kecamatan	Unit Usaha Industri per Kecamatan	Mendapatkan Jumlah sentra Industri	Tahunan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
342	Jumlah industri per Kecamatan	Industri per kecamatan	Mendapatkan Jumlah jenis industri pada periode tertentu di suatu wilayah sehingga diperoleh gambaran potensi industri wilayah tersebut	Tahunan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
343	Jumlah Perusahaan dan jumlah tenaga kerja perkecamatan di kabupaten Musi Banyuasin	Prusahaan	Data ini merupakan Jumlah Perusahaan dan jumlah tenaga kerja perkecamatan di kabupaten Musi Banyuasin, yang dikumpulkan pertahun berjumlah 60.198 Orang	Tahunan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
344	Jumlah Perusahaan sesuai klasifikasi Klui berdasarkan wajib lapor ketenagakerjaan di kabupaten musu banyuasin	Prusahaan	Data ini merupakan Jumlah Perusahaan sesuai klasifikasi Klui berdasarkan wajib lapor ketenagakerjaan di kabupaten musu banyuasin, yang dikumpulkan pertahun dengan jumlah 9 (sembilan) Klui antara lain Pertanian, peternakan. Kehutanan, pemburuan, dan perikanan 82 Perusahaan; Pertambangan dan penggalian 212 Perusahaan; Industri pengolahan 35 Perusahaan; Listrik, gas dan Air 10 Perusahaan; Bangunan 8 Perusahaan; Perdagangan Besar, eceran, rumah makan dan Hotel 34 Perusahaan; angkutan, penggudangan, dan komunikasi 5 Perusahaan; Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan bangunan, tanah dan jasa Perusahaan 47 Perusahaan; jasa Kemasyarakatan sosial dan perorangan 0 Perusahaan.	Tahunan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
345	Jumlah pencari kerja terdaftar berdasarkan jenis kelamin per bulan di kabupaten musu banyuasin	Pencari Kerja	Data ini merupakan Jumlah pencari kerja terdaftar berdasarkan jenis kelamin per bulan di kabupaten musu banyuasin dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dengan pencari kerja laki-laki 704 orang dan pencari kerja perempuan 224 orang.	Tahunan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
346	Jumlah data serikat pekerja yang terdaftar pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi	Serikat Pekerja	Data ini merupakan Jumlah data serikat pekerja yang terdaftar pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi yang dikumpulkan pertahun berjumlah 10 perusahaan	Tahunan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

347	Jumlah tenaga kerja asing	Tenaga Kerja	Data ini merupakan Jumlah tenaga kerja asing di kabupaten Musi Banyuasin, yang dikumpulkan pertahun berjumlah 32 Orang	Tahunan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
348	Jumlah Pencari kerja terdaftar menurut tingkat Pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin	Pencari Kerja	Data ini merupakan Jumlah Pencari kerja berdasarkan tingkat Pendidikan menurut jenis kelamin 2022, yang dikumpulkan pertahun berjumlah 928 Orang	Tahunan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
349	Jumlah keluarga Transmigrasi di kabupaten musu banyuasin	Transmigran	Data ini merupakan Jumlah keluarga Transmigrasi di kabupaten musu banyuasin n, yang dikumpulkan pertahun berjumlah 185 KK	Tahunan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
350	Transmigrasi Umum menurut Daerah Asal	Transmigran	Data ini merupakan Jumlah Transmigrasi Umum menurut Daerah Asal di kabupaten Musi Banyuasin, yang dikumpulkan pertahun berjumlah 8 Daerah.	Tahunan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
351	Kegiatan Pembinaan tenaga kerja lansia dan penyandang cacat 2017-2021	Pembinaan	Data ini merupakan Jumlah Kegiatan pembinaan tenaga kerja lansia dan penyandang cacat 2017-2021 ,berjumlah 1 Kegiatan Pelatihan Operator Komputer.	Tahunan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
352	Pekerja atau buruh peserta Jamsostek per Kecamatan	Tenaga Kerja	Data ini merupakan Jumlah Pekerja atau buruh peserta Jamsostek per Kecamatan di kabupaten Musi Banyuasin, yang dikumpulkan pertahun berjumlah 60.198 Orang.	Tahunan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
353	Jumlah Pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan menurut jenis kelamin	Pendidikan	Data ini merupakan Jumlah Jumlah Pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan menurut jenis kelamin di kabupaten Musi Banyuasin.	Tahunan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
354	Sengketa Hubungan Industrial yang Terselesaikan	Prusahaan	Data ini merupakan Jumlah Sengketa Hubungan Industrial yang Terselesaikan di kabupaten Musi Banyuasin, yang dikumpulkan pertahun berjumlah 24 Sengketa yang terselesaikan (100%).	Tahunan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

355	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Tempat Kejadian	Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Tempat Kejadian	Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 pada Pasal 1 Upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya..	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
356	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak per Kecamatan	Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak per Kecamatan	Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 pada Pasal 1 Upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
357	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak per Bulan	Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak per Bulan	Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 pada Pasal 1 Upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
358	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Usia	Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Usia	Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 pada Pasal 1 Upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
359	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kasus	Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kasus	Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 pada Pasal 1 Upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, perlindungan khu.	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
360	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Tingkat Pendidikan Korban	Kasus Kekerasan	Kekerasan adalah sebuah tindakan yang memang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menindas yang lemah agar terus mendapatkan penderitaan. Kekerasan ini bisa dalam bentuk fisik atau bisa juga dalam bentuk psikis.	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

361	Angka Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Musi Banyuasin	Indeks Pembangunan Gender	Indeks Komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dengan indeks pembanguna manusia (IPM), namun diarahkan untuk mengungkapkan ketimbangan antara laki-laki dan perempuan.	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
362	Jumlah Kendaraan Bermotor menurut Jenisnya di Kabupaten Musi Banyuasin	Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya	Kendaraan Bermotor ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel	Tahunan	Dinas Perhubungan
363	Jumlah Kendaraan Bermotor yang melaksanakan Uji Berkala menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Musi Banyuasin	Kendaraan Bermotor yang melaksanakan Uji Berkala Menurut Jenis Kendaraan	Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (1) huruf a (kendaraan Bermotor) dikelompokkan berdasarkan jenis: a. Sepeda Motor; b. Mobil; c. Mobil bus; d. Mobil barang ; dan e. Kendaraan khusus.	Tahunan	Dinas Perhubungan
364	Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor	Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor	Kegiatan Teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau oleh Dinas/Unit Kerja yang ditunjuk untuk menjamin agar kendaraan bermotor selalu dalam keadaan laik jalan.	Tahunan	Dinas Perhubungan
365	Prasarana Lalu Lintas Di Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin	Prasarana Lalu Lintas	Ruang Lalu Lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.	Tahunan	Dinas Perhubungan
366	Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib di uji untuk menentukan kelaikan jalan yaitu Mobil bus, Mobil penumpang umum, Mobil barang, Kendaraan khusus, Kereta gandengan dan Kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.	Tahunan	Dinas Perhubungan
367	Jumlah Koperasi Menurut Kelompok Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Koperasi menurut kelompok koperasi	Jumlah Koperasi menurut kelompok koperasi adalah jumlah koperasi yang ada menurut kelompok koperasi dari hasil pengesahan Badan Hukum Koperasi di setiap Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
368	Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Koperasi menurut jenis koperasi	Jumlah koperasi menurut jenis koperasi adalah jumlah koperasi yang ada menurut jenis koperasi di tiap-tiap Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

369	Jumlah Usaha Koperasi Dan Anggota Menurut Kecamatan di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Jenisnya	Usaha Koperasi Dan Anggota Menurut Kecamatan Serta menurut Jenisnya	Keoperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang/badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
370	Jumlah Modal Assets, Volume Usaha dan SHU Koperasi menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Musi Banyuasin	Modal Assets, Volume Usaha dan SHU Koperasi menurut Jenis Koperasi	Nilai yang dihasilkan oleh Badan Usaha Koperasi, Volume usaha adalah jumlah barang/jasa yang terjual dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan unit atau rupiah, SHU pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku.	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
371	Jumlah Modal Usaha Koperasi dan Usaha Andalan Menurut Jenis Koperasi di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin	Modal Usaha Koperasi dan Usaha Andalan Menurut Jenis Koperasi	Jumlah/barang atau jasa yang terjual dalam waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan unit atau rupiah, atau total nilai penjualan atau pendapatan yang diperoleh selama satu tahun buku dari hasil usaha andalan dan jenis koperasi.	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
372	Jumlah Anggota Usaha Koperasi Menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Musi Banyuasin	Anggota Usaha Koperasi Menurut Jenis Koperasi	Jumlah anggota, Usaha koperasi menurut jenis koperasi adalah jumlah anggota koperasi, dan usaha koperasi menurut jenis koperasi di tiap-tiap Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
373	Pertumbuhan Jumlah UMKM di Kabupaten Musi Banyuasin	Pertumbuhan UMKM	UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pertumbuhan UMKM dalam Kabupaten Muba meningkat dari tahun 2019 s.d 2022	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
374	Koperasi Berbadan Hukum Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Koperasi yang berbadan hukum	Jumlah Koperasi yang sudah memiliki pengesahan badan Hukum di tiap-tiap Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
375	Data UMKM yang mendapatkan bantuan	UMKM yang mendapatkan bantuan	UMKM yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah, baik dari Pemerintah Pusat/Daerah berupa dana BLT dan BPUM serta bantuan hibah berupa barang.	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
376	Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Koperasi Aktif Menurut Kecamatan	Jumlah koperasi yang aktif adalah koperasi yang masih aktif dan setiap tahun melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAP) serta menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan di tiap-tiap Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

377	Persentase Jumlah Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi (Air Limbah) yang Layak di Kabupaten Musi Banyuasin	Persentase Jumlah Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi (Air Limbah) yang Layak	Sinitasi adalah upayah yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan Kesehatan melalui pembangunan sinitasi.	Tahunan	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
378	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyediaan Jamban dan Tangki Septik Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Sarana dan Prasarana Penyediaan Jamban dan Tangki Septik Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Sinitasi adalah upayah yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan Kesehatan melalui pembangunan sinitasi.	Tahunan	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
379	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni (RLH) di Kabupaten Musi Banyuasin	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni (RLH)	Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, serta pembinaan keluarga, cerminan harkat dan mertabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.	Tahunan	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
380	Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani di Kabupaten Musi Banyuasin	Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani di Kabupaten Musi Banyuasin	Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan Kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.	Tahunan	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
381	Jumlah Rumah Layak Huni (RLH) Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Rumah Layak Huni (RLH) Menurut Kecamatan	Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, serta pembinaan keluarga, cerminan harkat dan mertabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.	Tahunan	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
382	Data Perumahan Kab Musi Banyuasin	Data Perumahan Kabupaten Musi Banyuasin	Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, serta pembinaan keluarga, cerminan harkat dan mertabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.	Tahunan	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

383	Akses Sanitasi Kabupaten Musi Banyuasin	Akses Sanitasi Kabupaten Musi Banyuasin	Sinitasi adalah upayah yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan Kesehatan melalui pembangunan sinitasi.	Tahunan	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
384	Pengurangan Kawasan Kumuh	Pengurangan Kawasan Kumuh	Perumahan Kumah adalah Perumahan yang mengalami penurunan Kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Permukiman Kumah adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.	Tahunan	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
385	Persentase Jumlah KK yang Terlayani Air Bersih	Persentase Jumlah KK yang Terlayani air Bersih	Air Buku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Buku adalah air yang berasal dari sumber air permukiman, air tanah, air hujan, dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum. Air Minum adalah Air Minim Rumah Tangga yang memulai proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum.	Tahunan	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
386	Jumlah Kepala Keluarga yang Terlayani Air Bersih Menurut Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga yang Terlayani Air Bersih Menurut Kecamatan	Air Buku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Buku adalah air yang berasal dari sumber air permukiman, air tanah, air hujan, dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum. Air Minum adalah Air Minim Rumah Tangga yang memulai proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum..	Tahunan	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
387	Jumlah Laka Lantas	Laka Lantas	Laka lantas adalah Suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.	Tahunan	Kepolisian Resort

388	Jumlah Tindak pidana menurut Jenis Kejahatan	Tindak Pidana	Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.	Tahunan	Kepolisian Resort
389	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	Pelanggaran Lalu Lintas	pelanggaran lalu lintas bisa adalah pelanggaran atas aturan yang berlaku di lalu lintas, khususnya jalan raya.	Tahunan	Kepolisian Resort
390	Jumlah Tindak Pidana	Tindak Pidana	Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.	Tahunan	Kepolisian Resort
391	Jumlah Perkara dan Terdakwa Perkara Pidana (termasuk pelanggaran Lalu Lintas) di Pengadilan Negeri	Perkara dan Terdakwa	Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.	Tahunan	Kepolisian Resort
392	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA)	Sekolah, Murid dan Guru Madrasah Aliyah (MA) dibawah naungan Depatemen Agama Kota sekayu.	Tahunan	Departemen Kementerian Agama Sekayu
393	Jumlah Siswa/Peserta Didik Madrasah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Kecamatan	Siswa/Peserta Didik Madrasah Berdasarkan Jenjang Pendidikan	Siswa/Peserta Didik Madrasah Berdasarkan Jenjang Pendidikand dibawah naungan Departemen Agama. Madrasah adalah suatu pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan Agam Islam yang mencakup Raudhatul Alhfal, Madrahsah Ibtidaiyah, Madrahsah Tasanawiyah, Madrahsah Aliyah dan Madrahsah Aliyah Kejujuran.	Tahunan	Departemen Kementerian Agama Sekayu
394	Jumlah Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Kecamatan	Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan	Guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar memimbing mengarahkan, melatih, menilai, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada RA, MI, MTS, MA, MAK.	Tahunan	Departemen Kementerian Agama Sekayu
395	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru RA/TK Islam Berdasarkan Kecamatan	Sekolah, Murid dan Guru RA/TK Islam	Sekolah, Murid dan Guru RA/TK Islam dibawah naungan Depatemen Agama Kota sekayu.	Tahunan	Departemen Kementerian Agama Sekayu

396	Jumlah Guru Madrasah berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan	Guru Madrasah berdasarkan Jenis Kelamin	Guru madrasah berdasarkan jenis kelamin Laki-Laki dan Perempuan dibawah naungan Departemen Agama Kota sekayu.	Tahunan	Departemen Kementerian Agama Sekayu
397	Jumlah Siswa/ Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan	Siswa/Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin	Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, Jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.	Tahunan	Departemen Kementerian Agama Sekayu
398	Jumlah Jamaah Haji per Kecamatan	Jamaah Haji	Jamaah haji terdiri dari jamaah haji reguler dan jamaah haji khusus. Jamaah haji reguler adalah jamaah haji yang menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh menteri. Dan Jamaah haji Khusus adalah jamaah haji yang menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus..	Tahunan	Departemen Kementerian Agama Sekayu
399	Jumlah Tempat Peribadatan Berdasarkan Kecamatan	Tempat Peribadatan	Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.	Tahunan	Departemen Kementerian Agama Sekayu
400	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Raudatul Athfal (RA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Sekolah, Guru, dan Murid Raudatul Athfal (RA) di Bawah Kementerian Agama	Sekolah, Murid dan Guru Raudatul Athfal (RA) dibawah naungan Departemen Agama Kota sekayu.	Tahunan	Departemen Kementerian Agama Sekayu
401	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementerian Agama	Sekolah, Murid dan Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) dibawah naungan Departemen Agama Kota sekayu.	Tahunan	Departemen Kementerian Agama Sekayu
402	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementerian Agama	Sekolah, Murid dan Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) dibawah naungan Departemen Agama Kota sekayu.	Tahunan	Departemen Kementerian Agama Sekayu

403	Realisasi NR Kantor dan Nikah Kantor	Nikah Rujuk (NR) Luar Kantor dan Nikah Kantor	Nikah Rujuk (NR) Luar Kantor dan Nikah Kantor yang dilakukan di Depatemen Agama Kota sekayu.	Tahunan	Departemen Kementerian Agama Sekayu
404	Daftar Pondok Pesantren di Kabupaten Musi Banyuasin	Pondok Pesantren	Tempat pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran agama islam bagi santri, yang diasuh oleh kiai yang tinggal atau mukim bersama-sama dalam satu lokasi.	Tahunan	Departemen Kementerian Agama Sekayu
405	Jumlah Pelanggan Per Kecamatan	Pelanggan Listrik	Pelanggan Listrik adalah seseorang atau lembaga yang menggunakan (memakai) jasa listrik yang digunakan sehari-hari menurut kebutuhannya dan sudah terikat saling membutuhkan antara Produsen dan pelanggan.	Tahunan	PT. Muba Electric Power
406	Jumlah Pelanggan dan Air Yang Disalurkan Menurut Pelanggan	Data nama pelanggan, alamat dan tanggal menjadi pelanggan	Jumlah pelanggan aktif yang menerima air bersih berdasarkan DRD.	Tahunan	PDAM
407	Jumlah Pelanggan Menurut Kelompok Non Niaga	Data Pelanggan Domestik Non Niaga	Jumlah pelanggan konsumsi domestik diniaga .	Tahunan	PDAM
408	Jumlah Air Bersih	Jumlah air yang disalurkan	Jumlah air yang disalurkan kepada seluruh golongan pelanggan.	Tahunan	PDAM
409	Jumlah Pelanggan, Air yang disalurkan dan nilai menurut pelanggan di Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah pelanggan berdasarkan air yang disalurkan	Jumlah pelanggan dan jumlah pemakaian serta jumlah tagihan yang harus di bayar.	Tahunan	PDAM
410	Jumlah Pelanggan dan Air Yang Disalurkan menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah pelanggan berdasarkan Kecamatan	Jumlah Pelanggan di Kecamatan sesuai unit pengolahan distribusi Air.	Tahunan	PDAM

411	Jumlah Pe;anggan Air Yang di Salurkan dan Nilai Menurut Bulan di Kabupaten Musi Bnyuasin	Jumlah pelanggan berdasarkan bulan tagihan	jumlah tagihan pelanggan yang ditagih berdasrkan DRD setiap bulan.	Tahunan	PDAM
412	Jumlah pendapatan dan biaya produksi PDAM Kabupaten Musi Banyuasin	Biaya Oprasional	Jumlah biaya oprasional dan penadapatan yang belum ditagih.	Tahunan	PDAM
413	Data Jumlah Desa yang telah terjangkau layanan PDAM dalam Kabupaten Musi Banyuasin	Wilayah Pelayanan	Jumlah desa yang terlayani berdasarkan pengelohan yang ada di Kecamatan .	Tahunan	PDAM

#### IV. DESAIN KEGIATAN

##### 4.1. Kegiatan ini dilakukan:

Hanya sekali - 1 → *langsung ke R.4.3.* Berulang - 2

2

##### 4.2. Jika “berulang” (R.4.1. berkode 2), Frekuensi Penyelenggaraan:

Harian	- 1	Empat Bulanan	- 5
Mingguan	- 2	Semesteran	- 6
Bulanan	- 3	Tahunan	- 7
Triwulanan	- 4	> Dua Tahunan	- 8

7

##### 4.3. Tipe Pengumpulan Data:

Longitudinal Panel	- 1
Cross Sectional	- 2
Longitudinal Cross Sectional	- 3

3

##### 4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:

Seluruh Wilayah Indonesia	- 1 → <i>langsung ke R.4.6.</i>
Sebagian Wilayah Indonesia	- 2

2

**4.5. Jika “sebagian wilayah Indonesia” (R.4.4. berkode 2), Wilayah Kegiatan:**

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
1	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin

**4.6. Metode Pengumpulan Data:**

Wawancara	- 1
Mengisi kuesioner sendiri (swacacah)	- 2
Pengamatan (observasi)	- 4
Pengumpulan data sekunder	- 8
Lainnya (sebutkan) .....	- 16

8

**4.7. Sarana Pengumpulan Data:**

<i>Pencil-and-Paper Interviewing (PAPI)</i>	- 1
<i>Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)</i>	- 2
<i>Computer-assisted Telephones Interviewing (CATI)</i>	- 4
<i>Computer Aided Web Interviewing (CAWI)</i>	- 8
<i>Mail</i>	- 16
Lainnya (sebutkan) .....	- 32

8

**4.8. Unit Pengumpulan Data:**

Individu	- 1
Rumah tangga	- 2
Usaha/perusahaan	- 4
Lainnya (sebutkan) Organisasi Perangkat Daerah	- 8

8

**V. DESAIN SAMPEL**

Diisi jika cara pengumpulan data adalah survei

**5.1. Jenis Rancangan Sampel:**

<i>Single Stage/Phase</i>	- 1
<i>Multi Stage/Phase</i>	- 2

-

**5.2. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir:**

Sampel Probabilitas	- 1 → ke R.5.3.a
Sampel Nonprobabilitas	- 2 → ke R.5.3.b

-

**5.3. a. Jika “sampel probabilitas” (R.5.2. berkode 1), Metode yang Digunakan:**

<i>Simple Random Sampling</i>	- 1	} → ke R.5.4
<i>Systematic Random Sampling</i>	- 2	
<i>Stratified Random Sampling</i>	- 3	
<i>Cluster Sampling</i>	- 4	
<i>Probability Proportional to Size Sampling</i>	- 5	

-

<b>b. Jika “sampel nonprobabilitas” (R.5.2. berkode 2), Metode yang Digunakan:</b>		
<i>Quota Sampling</i>	- 6	} → ke R.5.7
<i>Accidental Sampling</i>	- 7	
<i>Purposive Sampling</i>	- 8	
<i>Snowball Sampling</i>	- 9	
<i>Saturation Sampling</i>	- 10	

<b>5.4. Kerangka Sampel Tahap Terakhir:</b>	-
<i>List Frame</i>	- 1
<i>Area Frame</i>	- 2

**5.5. Fraksi Sampel Keseluruhan:-**

**5.6. Nilai Perkiraan *Sampling Error* Variabel Utama: -**

**5.7. Unit Sampel: -**

**5.8. Unit Observasi: -**

**VI. PENGUMPULAN DATA**

<b>6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (<i>Pilot Survey</i>)?</b>	2
Ya	- 1
Tidak	- 2

<b>6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:</b>	2		
Kunjungan kembali ( <i>revisit</i> )	- 1	<i>Task Force</i>	- 4
Supervisi	- 2	Lainnya (sebutkan) .....	- 8

<b>6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?</b>	2
Ya	- 1
Tidak	- 2

**Pertanyaan 6.4 – 6.7 ditanyakan jika sarana pengumpulan data adalah PAPI, CAPI, atau CATI (Pilihan R.4.7. kode 1, 2, dan/atau 4 dilingkari)**

<b>6.4. Petugas Pengumpulan Data:</b>	1
Staf instansi penyelenggara	- 1
Mitra/tenaga kontrak	- 2
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak	- 3

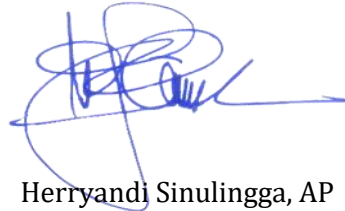
<b>6.5. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data:</b>				4
≤ SMP	- 1			
SMA/SMK	- 2			
Diploma I/II/III	- 3			
Diploma IV/S1/S2/S3	- 4			
<b>6.6. Jumlah Petugas:</b>				
Supervisor/penyelia/pengawas	1 Orang			
Pengumpul data/enumerator	8 Orang			
<b>6.7. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?</b>				1
Ya	- 1			
Tidak	- 2			
<b>VII. PENGOLAHAN DAN ANALISIS</b>				
<b>7.1. Tahapan Pengolahan Data:</b>				1
Penyuntingan ( <i>Editing</i> )	Ya - 1	Tidak - 2		2
Penyandian ( <i>Coding</i> )	Ya - 1	Tidak - 2		1
<i>Data Entry</i>	Ya - 1	Tidak - 2		1
Penyahihan (Validasi)	Ya - 1	Tidak - 2		1
<b>7.2. Metode Analisis:</b>				1
Deskriptif	- 1			
Inferensia	- 2			
Deskriptif dan Inferensia	- 3			
<b>7.3. Unit Analisis:</b>				8
Individu - 1	Usaha/perusahaan - 4			
Rumah tangga - 2	Lainnya (sebutkan) Organisasi Perangkat Daerah - 8			
<b>7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:</b>				4
Nasional - 1	Kecamatan - 8			
Provinsi - 2	Lainnya (sebutkan) ..... - 16			
Kabupaten/Kota - 4				
<b>VIII. DISEMINASI HASIL</b>				
<b>8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum:</b>				2
Tercetak ( <i>hardcopy</i> )	Ya - 1	Tidak - 2		1
Digital ( <i>softcopy</i> )	Ya - 1	Tidak - 2		2
Data Mikro	Ya - 1	Tidak - 2		

**8.2. Jika pilihan R.8.1. kode 1, Judul dan Rencana Rilis Produk Kegiatan:**

Jenis Diseminasi	Rencana Rilis		
	Tanggal	Bulan	Tahun
Tercetak	-	-	-
Digital	23	02	2023
Data Mikro	-	-	-

Sekayu, September 2023

Mengetahui,  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Musi Banyuasin



Herryandi Sinulingga, AP  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 197503021994021002



Badan Pusat Statistik

## METADATA STATISTIK VARIABEL

MS-Var

### Keterangan Kegiatan Statistik

<b>Nama Kegiatan</b>	Kompilasi Data Sektoral Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	<b>Peyelenggara</b>	<b>Instansi</b>	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Musi Banyuasin
<b>Kode Kegiatan</b>	2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik		<b>Unit Kerja Eselon I</b>	: Sekretaris Daerah
			<b>Unit Kerja Eselon II</b>	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
			<b>Unit Kerja Eselon III</b>	: Sekretasi Dinas Komunikasi dan Informatika

No	OPD	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Kolom (2) Dapat Diakses Umum?
1	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Jumlah Desa / Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Pendataan jumlah jumlah desa dan kelurahan yang ada di kabupaten musu banyuasin	Didalam kabupaten musin banyuasin terdapat 227 desa dan 13 kelurahan	Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Tahunan	Integer	-	-	Berapakah Jumlah Desa dan Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
2	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Banyak Produk Hukum di Kabupaten	-	Produk Hukum	Produk hukum adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan	PERMENDAGRI NO. 1 TH 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Banyak Produk Hukum di Kabupaten?	1

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku untuk tujuan komersial tanpa ijin tertulis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin

					kewajibannya.							
3	Inspektorat	Daftar Pejabat Struktural Inspektorat	-	Pejabat Struktural di Inspektorat	Pejabat Struktural didefinisikan sebagai profesi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kedudukan dalam suatu struktur yang terdapat beberapa tingkat-tingkat, mulai dari tingkat kedudukan yang paling rendah sampai tingkat kedudukan yang tertinggi.	Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 285 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Pejabat Struktural Inspektorat?	1
4	Inspektorat	Daftar Pejabat Auditor Inspektorat	-	Pejabat Auditor di Inspektorat	Pejabat Auditor didefinisikan sebagai jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah daerah yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diduduki.	Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 285 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Pejabat Auditor Inspektorat?	1
5	Inspektorat	Data Audit Kinerja Inspektorat Daerah	-	Audit Kinerja Inspektorat Daerah	Audit Kinerja didefinisikan sebagai pemeriksaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas pemeriksaan	Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 18/KPTS-ITDA/2022 tentang Program	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Audit Kinerja Inspektorat Daerah?	1

					aspek ekonomi, efisiensi dan aspek efektivitas serta ketaatan pada peraturan.	Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.						
6	Inspektorat	Data Klinik Konsultasi Pengawasan	-	Klinik Konsultasi Pengawasan	Klinik Konsultasi Pengawasan didefinisikan sebagai Implementasi dari APIP dalam melakukan pembinaan dan pendampingan pada pengelola keuangan Perangkat Daerah dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan serta mempercepat proses pelaksanaan tindak lanjut.	Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 18/KPTS-ITDA/2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Klinik Konsultasi Pengawasan?	1
7	Inspektorat	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	-	Pengawasan dan Pemeriksaan	Pengawasan dan Pemeriksaan di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin didefinisikan sebagai kegiatan pengamatan, pemeriksaan, penilaian dan pengoreksian serta pembinaan secara komprehensif terhadap Pengelolaan sumberdaya yang menjadi tanggung jawab obrik, dilakukan	Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 18/KPTS-ITDA/2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Daerah	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ?	1

					secara langsung dengan membandingkan antara kegiatan yang dilaksanakan dengan aturan/ketentuan yang seharusnya, agar obrik dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar.	Kabupaten Musi Banyuasin.						
8	Badan Perencanaan Dan Pembangunan	Data Institusi yang Berperan Aktif dalam Forum Dialog Kota Berkelanjutan	-	Forum Dialog Kota Berkelanjutan	merupakan Kota Berkelanjutan mencakup kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air bersih, pengolahan air limbah dan pengelolaan sampah ramah lingkungan, aksesibilitas dan mobilitas yang di dukung transportasi berkelanjutan, pemanfaatan energi baru terbarukan, persyaratan bangunan gedung hijau dan ruang terbuka hijau yang memadai.	Praturan Presiden No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.	Tahunan	Integer	-	-	Daftar Institusi yang Berperan Aktif dalam Forum Dialog Kota Berkelanjutan di kabupaten musu banyuasin?	1
9	Badan Perencanaan Dan Pembangunan	Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah di kabupaten Musu Banyuasin	-	Indikator Makro Pembangunan Daerah	Indikator umum (Makro) merupakan indikator gabungan (Komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020.	Tahunan	Desimal	-	-	Berapa capaian Indikator Makro Pemangunan Daerah di kabupaten Musu Banyuasin Tahun 2022?	1

					Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, capaian kinerja indikator umum (makro) menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum							
10	Badan Perencanaan Dan Pembangunan	Kesesuaian Pola Ruang Menurut Fungsi Kawasan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Kesesuaian Pola Ruang	Kesesuaian Pola Ruang adalah Distribusi peruntukan Ruang Wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk Fungsi Lindung dan Budidaya yang di tuju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW (20 Tahun)	Perda No.08 Tahun 2016 Tentang RTRW Kabupaten Musi Banyuasin, 2016 - 2036	Tahunan	Integer	-	-	Bagaimana kesesuaian Pola Ruang Menurut Fungsi Kawasan di kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022?	1
11	Badan Perencanaan Dan Pembangunan	Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Luas Daerah	Adalah Luas Wilayah berdasarkan luas gabungan kecamatan dalam kabupaten batas administrasi sesuai dengan keputusan Permendagri No. 79 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin di Kabupaten	- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.50 Tahun 2014 - Permendagri No. 76 Tahun 2016---Cek kembali dasarnya	Tahunan	Desimal	-	-	Berapa Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022?	1

					Menentukan Provinsi							
12	Sekretariat DPR	Jumlah anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Anggota DPRD	Anggota DPR adalah anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota	undang-undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
13	Sekretariat DPR	Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Anggota DPRD	Anggota DPR adalah anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota	undang-undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
14	Sekretariat DPR	Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Komisi di Kabupaten Musi	-	Anggota dan komisi DPRD	Anggota DPR adalah anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat	undang-undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD juncto Undang-Undang	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Komisi di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1

		Banyuasin			provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota. Komisi DPRD adalah salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Sederhananya, komisi merupakan kelompok-kelompok yang berisi anggota DPR. Masing-masing komisi memiliki wewenang dan ruang lingkup tugas tersendiri.	Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD, Dan UU No. 17 / 2014 (UU MD3)						
15	Sekretariat DPR	Jumlah Keputusan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin	-	keputusan DPRD	Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan DPRD kabupaten/kota. Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final	Permendagri 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Keputusan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
16	Sekretariat DPR	Komposisi Anggota DPRD berdasarkan Agama	-	Komposisi Anggota DPRD	Susunan anggota DPRD	undang-undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD juncto	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Komposisi Anggota DPRD berdasarkan Agama ?	1

						Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD,						
17	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	-	Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Dan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.	Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja?	1
18	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah per Golongan menurut Organisasi Perangkat Daerah	-	Pegawai Negeri Sipil Per Jenis Golongan Menurut OPD	Mendapatkan Jumlah Pegawai Negeri Sipil per Golongan berdasarkan OPD	Melalui Aplikasi SAPK	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Pegawai Negeri Sipil Per Jenis Golongan Menurut OPD?	1
19	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan	Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada	-	Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat Pendidikan	Mendapatkan Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir	Melalui Aplikasi SAPK	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan	1

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku untuk tujuan komersial tanpa ijin tertulis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin

	SDM	Pemerintah berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir		Terakhir	(SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, D4/S1, S2, S3).						Tingkat Pendidikan Terakhir?	
20	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja per Golongan menurut OPD	-	egawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja per Golongan menurut OPD	Mendapatkan Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja per Golongan menurut OPD	Melalui Aplikasi SAPK	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja per Golongan menurut OPD	1
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Usia menurut OPD	-	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Usia menurut OPD	Mendapatkan Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Rentang Usia 20-30,31-40, 41-50, dan >50 menurut OPD	Melalui Aplikasi SAPK	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Usia menurut OPD?	1
22	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah berdasarkan Usia menurut Organisasi Perangkat Daerah	-	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah berdasarkan Usia menurut Organisasi Perangkat Daerah	Mendapatkan Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Rentang Usia 20-30,31-40, 41-50, dan >50 menurut OPD	Melalui Aplikasi SAPK	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah berdasarkan Usia menurut Organisasi Perangkat Daerah ?	1
23	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah	-	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah berdasarkan	Mendapatkan Jumlah Fungsional Tertentu (JFT) Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Rumpun Jabatan Guru, Kesehatan dan Teknis	Melalui Aplikasi SAPK	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah berdasarkan	1

		berdasarkan Rumpun Jabatan		Rumpun Jabatan							Rumpun Jabatan ?	
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Jumlah Fungsional Umum (Staf) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir	-	Fungsional Umum (Staf) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir	Mendapatkan Jumlah Fungsional Umum (Staf) Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir (SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, D4/S1, S2, S3).	Melalui Aplikasi SAPK	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Fungsional Umum (Staf) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir ?	1
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Jumlah Fungsional Tertentu (JFT) Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir	-	Fungsional Tertentu (JFT) Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir	Mendapatkan Jumlah Jumlah Fungsional Tertentu (JFT) Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir (SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, D4/S1, S2, S3).	Melalui Aplikasi SAPK	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Fungsional Tertentu (JFT) Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir ?	1
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah per Jenis Jabatan menurut Organisasi Perangkat Daerah	-	Pegawai Negeri Sipil Per Jenis Jabatan Menurut OPD	Mendapatkan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Per Jenis Jabatan (Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum) berdasarkan OPD	Melalui Aplikasi SAPK	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah Pegawai Negeri Sipil Per Jenis Jabatan Menurut OPD?	1
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah berdasarkan	-	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah berdasarkan Agama per Organisasi	Mendapatkan Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Agama Islam, Kristen, Khatolik, Hindu dan Budha	Melalui Aplikasi SAPK	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah berdasarkan Agama per	1

	SDM	Agama per Organisasi Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Menurut OPD						Organisasi Perangkat Daerah ?	
28	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Per Jenis Jabatan Menurut Organisasi Perangkat Daerah	-	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Per Jenis Jabatan Menurut Organisasi Perangkat Daerah	Mendapatkan Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja per Jenis Jabatan (Teknis, Kesehatan dan Guru) menurut OPD	Melalui Aplikasi SAPK	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Per Jenis Jabatan Menurut Organisasi Perangkat Daerah?	1
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Menurut Organisasi Perangkat Daerah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin	-	PPPK	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan Pada Perangkat Daerah.	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK,	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Menurut Organisasi Perangkat Daerah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
30	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Pegawai Negeri Sipil Menurut jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin	Mendapatkan Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Jabatan (Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum) dan Jenis Kelamin Pria dan Wanita	Melalui Aplikasi SAPK	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1

31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	Mendapatkan Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan (SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, D4/S1, S2, S3) dan Jenis Kelamin Pria dan Wanita.	Melalui Aplikasi SAPK	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin?	1
32	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di kabupaten Musi Banyuasin	-	Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin	Mendapatka Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin Pria dan Wanita.	Melalui Aplikasi SAPK	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin ?	1
33	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja per Tingkat Pendidikan Terakhir	-	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja per Tingkat Pendidikan Terakhir	Mendapatkan Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja per Tingkat Pendidikan Terakhir (SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, D4/S1, S2, S3).	Melalui Aplikasi SAPK	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja per Tingkat Pendidikan Terakhir ?	1
34	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Organisasi Perangkat Daerah dan Jenis Kelamin	-	PNS	Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Organisasi Perangkat Daerah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Musi	1

		di Kabupaten Musi Banyuasin			diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pada Perangkat Daerah.						Banyuasin ?	
35	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Jumlah Pejabat Struktural Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir	-	Pejabat Struktural Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir.	Mendapatkan Jumlah Pejabat Struktural Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir (SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, D4/S1, S2, S3).	Melalui Aplikasi SAPK	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Pejabat Struktural Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir	1
36	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Agama menurut OPD	-	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Agama menurut OPD	Mendapatkan Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Agama Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, dan Budha menurut OPD	Melalui Aplikasi SAPK	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Agama menurut OPD ?	1
37	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin Menurut OPD	-	Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin Menurut OPD	Mendapatkan Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin Pria dan Wanita Menurut OPD	Melalui Aplikasi SAPK	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin Menurut OPD?	1
38	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian	-	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Jenis	Mendapatka Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjiaan Kerja berdasarkan Jenis Kelamin Pria dan	Melalui Aplikasi SAPK	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjiaan	1

	SDM	Kerja berdasarkan Jenis Kelamin Menurut OPD		Kelamin Menurut OPD	Wanita Menurut OPD						Kerja berdasarkan Jenis Kelamin Menurut OPD?	
39	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jumlah Realisasi Pendapatan Pemerintah Menurut Jenis Pendapatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Realisasi Pendapatan Pemerintah Menurut Jenis Pendapatan	Laporan yang menyajikan informasi Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah, Pendapatan Taranfer Antar Daerah, Pendapatan Hibah dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan, yang masing-masing di perbandingkan dengan anggarannya dalam satu Periode.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020	Tahunan	Desimal	-	-	Berapa Jumlah Realisasi Pendapatan Pemerintah Menurut Jenis Pendapatan di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
40	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jumlah Realisasi Pengeluaran Pembangunan Menurut Urutan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Realisasi Pengeluaran Pembangunan Menurut Urutan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan	Laporan yang menyajikan informasi di bidang Layanan Umum, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Lingkungan Hidup, Perumahan dan Pasilitas Umum, Kesehatan, Parieisata dan Kebudayaan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2021	Tahunan	Desimal	-	-	Berapa Jumlah Realisasi Pengeluaran Pembangunan Menurut Urutan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1

41	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jumlah Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menurut Jenis Belanja (Rupiah)	-	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menurut Jenis Belanja (Rupiah)	Laporan realisasi yang menyajikan informasi tentang Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Tranfer.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2022	Tahunan	Desimal	-	-	Berapa Jumlah Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menurut Jenis Belanja (Rupiah) ?	1
42	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	-	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Laporan yang menyajikan informasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air dan Tanah, Pajak Burung Sarang Walet, Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2023	Tahunan	Desimal	-	-	Berapa Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
43	Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kab Musi Banyuasin	-	Pajak Daerah	Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat	Undang Undang No 28 tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tahunan	integer	-	-	Apa saja yang berkaitan Pendapatan Pajak Daerah Kab Musi Banyuasin ?	1

					memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.							
44	Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah (Unaudited)	-	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah (Unaudited) ?	1
45	Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumidan bangunan yang dimiliki dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sector perkotaan dan perdesaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunana, perhutanan dan pertambangan	Perda Nomor 06 Tahun 2018	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
46	Badan Pengelola Pajak Dan	Target dan Realisasi	-	Retribusi Daerah	Retribusi Daerah adalah pungutan	Undang Undang No 28 tahun	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Target dan Realisasi	1

	Retribusi Daerah	Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin			daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.	2010 tentang Pajak Daerah dan Ritribusi Daerah					Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ?	
47	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politi	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Berdasarkan Bidang Pelayanan Per-Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ormas dan LSM terdaftar sebagaimana dimaksud pada Permendagri Nomor 57 Tahun 2017	Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan	Tahunan	Integer	-	-	Ada Berapa Ormas dan LSM yang terdaftar pada Badan Kesbangpol berdasarkan bidang kegiatan..?	1
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politi	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Berdasarkan Badan Hukum Per-Kecamatan di Kabupaten Musi	-	Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang sudah berbadan hukum dan melapor ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ormas dan LSM berbadan hukum yang melapor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2016	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan	Tahunan	Integer	-	-	Ada Berapa Ormas dan LSM yang sudah berbadan hukum melapor pada Badan Kesbangpol..?	1

		Banyuasin										
49	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politi	Pembinaan Politik Kabupaten Musi Banyuasin	-	Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Politik dan Demokrasi	Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Politik dan Demokrasi Bagi Masyarakat Umum	Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik	Tahunan	Integer	-	-	Berapa peserta yang mengikuti sosialisasi Pembinaan Politik pada tahun ini..?	1
50	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politi	Organisasi Politik, Keagamaan, Pendidikan, Kepemudaan, Masyarakat dan Profesi	-	Organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai kegiatan di bidang Politik, Keagamaan, Pendidikan, Kepemudaan dan Profesi yang terdaftar atau melapor di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai kegiatan di bidang Politik, Keagamaan, Pendidikan, Kepemudaan dan Profesi yang terdaftar atau melapor sesuai Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2016	Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan	Tahunan	Integer	-	-	Ada berapa Organisasi Politik, Keagamaan, Pendidikan, Kepemudaan, Masyarakat dan Profesi yang sudah melapor atau mendaftarkan pada Badan Kesbangpol..?	1
51	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politi	Daftar Kepengurusan Partai Politik menurut Jenis Kelamin	-	Daftar Kepengurusan Partai Politik yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin	Daftar Kepengurusan Partai Politik yang dilaporkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	Tahunan	Integer	-	-	Berapa persentase antara laki-laki dan perempuan di kepengurusan	1

											partai xxxx..?	
52	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Kejadian Bencanan Menurut Jenisnya	-	Kejadian Bencana	Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan ataupun kerusakan, jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.	Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Menyebutkan definisi bencana	Tahunan	Integer	-	-	Beraupa Jumlah Kejadian Bencanan Menurut Jenisnya ?	1
53	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Daerah Rawan Bencana Menurut Jenisnya	-	Daerah Rawan Bencana	Daerah rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakter geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.	Peraturan Kepala BPBD Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Bencanapedia.id / Daerah_Rawan_bencana	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Daerah Rawan Bencana Menurut Jenisnya ?	1
54	Badan Penanggulangan	Jumlah Kejadian	-	Kejadian Kebakaran	Kejadian kebakaran bulanan adalah	Peraturan Kepala BPBD	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Kejadian	1

	n Bencana Daerah	Kebakaran Menurut Bulan		Bulanan	kejadian kebakaran yang dibuat pada saat tanggap darurat dengan memmuat waktu dan lokasi kejadian bencana, penyebab bencana, cakup wilayah dampak bencana, penyebab kejadian bencana, dampak bencana (jumlah korban jiwa dan kerusakan/kerugian seta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan), upaya penanganan yang dilakukan, bantuan yang diperlukan, kendala yang dihadapi.	Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah					Kebakaran Menurut Bulan ?	
55	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rekapitulasi Kejadian Kebakaran di Kab Musi Banyuasin	-	Rekapitulasi Kejadian Kebakaran	Rekapitulasi kejadian kebakaran adalah jumlah kejadian, dampak bencana yang disajikan dalam tabulasi	Peraturan Kepala BPBD Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Rekapitulasi Kejadian Kebakaran di Kab Musi Banyuasin ?	1
56	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Korban yang diakibatkan Bencana Alam	-	Korban Bencana Alam	Korban bencana alam adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia kaibat bencana	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pelanggaran Penanggulangan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Korban yang diakibatkan Bencana Alam ?	1

						n Bencana						
57	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rekapitulasi Kejadian NON Kebakaran di Kab Musi Banyuasin	-	Rekapitulasi Kejadian NON Kebakaran	Rekapitulasi Kejadian NON Kebakaran adalah jumlah kejadian, dampak bencana yang disajikan dalam tabulasi	Peraturan Kepala BPBD Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Rekapitulasi Kejadian NON Kebakaran di Kab Musi Banyuasin ?	1
58	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Tangguh Bencana dan Satuan Pendidikan Aman Bencana	-	Desa Tangguh Bencana dan Satuan Pendidikan	Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang telah diberikan pelatihan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memiliki kemampuan mengenali ancaman diwilayahnya sehingga mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana dan pendidikan pelatihan diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis,	Peraturan Kepala BPBD 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pelanggaran Penanggulangan Bencana	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Desa Tangguh Bencana dan Satuan Pendidikan Aman Bencana?	1

					simulasi dan geladi.							
59	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Daerah Bencana Kebakaran Hutan Menurut Jenis Topografi Dan Kecamatan	-	Baerah Bencana Kebakaran Berdasarkan Topografi	Daerah Bencana Kebakaran dapat dilihat melalui topografi, Topografi merupakan bentuk permukaan bumi, Tempat yang rendah dapat berpotensi tinggi terhadap bencana kebakaran hutan. Tinggi rendahnya kerawanan kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat dari nilai kerawanan berdasarkan tingkatnya.	Bluetin Ilmiah Math, Star, dan Terapannya (Bimaster) Vol 11, No 5 (2022), Hal 697-704	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Daerah Bencana Kebakaran Hutan Menurut Jenis Topografi Dan Kecamatan?	1
60	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kejadian Kebakaran Berdasarkan Bulan	-	Jumlah Kebakaran	Untuk mengetahui kebakaran perbulan pada suatu wilayah tidak menentu maka perlu di pahami bahwa didefinisikan kebakaran ialah suatu peristiwa bencana yang berasal dari api yang tidak dapat dikehendaki yang dapat menimbulkan kerugian, baik kerugian materi (berupa harta benda, bangunan fisik, depot, fasilitas, sarana dan prasarana) maupun keruguan non-materi (seperti rasa takut dan trauma) hingga kehilangan nyawa atau cacat tubung yang	Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Nemenklatur Pemadam Kebakaran dan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N)	Tahunan		-	-	Berapakah Jumlah Kejadian Kebakaran Dalam Kurun Waktu Satu Tahun?	1

					ditimbulkan akibat kebakaran.							
61	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Korban dan Tafsiran Kerugian Akibat Kebakaran	-	Dampak Kebakaran	Korban Kebakaran (Janiari-Desember) disatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun.	Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Nemenklatur Pemadam Kebakaran	Tahunan		-	-	Adakah Koban Jiwa dalam Kejadian Kebakaran Dalam Satu Tahun?	1
62	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pelanggaran Pemasangan Reklame dan Pelanggaran Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Bulan	-	Pelanggaran Reklame	Reklame adalah badan, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau benda yang dapat dilihat,dibaca,didengar, dirasakan dan atau sering disebut PKL merupakan sebuah komunikasi pedagang yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya, mereka menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir	Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 tahun 2010 Tentang Pajak Reklame Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 tahun 2016 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima	Tahunan		-	-	Berapa Banyak Jumlah pelanggaran pemasangan reklame yang tidak memiliki izin?	1

					perlintasan jalan raya.							
63	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Tenaga Bantuan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin	-	Jumlah Tenaga Bantuan	Tenaga Bantuan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Sangat dibutuhkan karena dapat membantu pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 Tentang Tenaga Honorer atau Tenaga Bantuan di Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan		-	-	Berapakah Jumlah Tenaga Bantuan di Satuan Polisi Pamong Praja?	1
64	Satuan Polisi Pamong Praja	Data Jumlah Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Jumlah Anggota Limas	Jumlah Satuan Limas Dibagi jumlah RT atau sebutan lainnya maka dapat didefinisikan Data jumlah Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin	Berdasarkan Pemendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	Tahunan		-	-	Bagaimana Cara mengetahui Anggota Limas Pada Satu Kabupaten ?	1
65	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Zona Pedagang Kaki Lima Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Zona Pedagang Kaki Lima	Bahwa Pedagang Kaki Lima sebagai bentuk usaha masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah, maka dipandang perlu melakukan pemetaan dan pembinaan demi kemajuan usahanya yang diharapkan mampu menunjang perekonomian masyarakat dan mewujudkan	Berdasarkan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 tahun 2016 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima	Tahunan		-	-	Apa yang dimaksud dengan zona pedagang kaki lima?	1

					lingkungan kota yang bersih, sehat, rapi dan indah.							
66	Satuan Polisi Pamong Praja	Data Zona hijau Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Zona Hijau Pedagang Kaki Lima	Zona hijau sebagaimana yang dimaksud dan telah diatur dalam peraturan Daerah merupakan wilayah-wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival, dan konsep pujasera dengan ketentuan yang berlaku.	Berdasarkan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 tahun 2016 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima	Tahunan		-	-	Jelaskan yang dimaksud dengan zona hijau pedagang kaki lima?	1
67	Satuan Polisi Pamong Praja	Data Zona Merah Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Zona Merah Pedagang Kaki Lima	Zona merah sebagaimana yang dimaksud merupakan wilayah sekitar tempat ibadah, rumah sakit, komlek militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan daerah ini.	Berdasarkan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 tahun 2016 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima	Tahunan		-	-	Jelaskan yang dimaksud dengan zona Merah pedagang kaki lima?	1
68	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pegawai ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin	-	Jumlah ASN	Pegawai ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin sangat menunjang untuk terciptanya ketentraman dan ketertiban Umum	Berdasarkan Pemandagri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong	Tahunan		-	-	Berapakah Jumlah Pegawai ASN di Sat Pol PP	1

					Masyarakat dan Melaksanakan tugas pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Musi Banyuasin.	Praja di Provinsi Kabupaten Kota						
69	Satuan Polisi Pamong Praja	Data Zona Kuning Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Zona Kuning Pedagang Kaki Lima	Zona Kuning sebagaimana dimaksud yaitu yang berdasarkan waktu adalah seluruh pasar tumpah di Daerah hanya boleh berdagang pada jam tertentu yaitu mulai pukul ; 22.00 Wib s/d pukul 06.00 Wib, Zona Kuning yang berdasarkan waktu dari pukul 17.00 Wib s/d 04.00 Wib adlah pedagang kuliner sedangkan zona kuning berdasarkan tempat yaitu kantor- kantor pemerintah daerah yang sudah tidak digunakan, depan mall dan sekitar lapangan olahraga yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Berdasarkan Pemandagri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Kabupaten Kota	Tahunan		-	-	Jelaskan yang dimaksud dengan zona kuninga pedagang kaki lima?	1
70	RSUD Sekayu	Jumlah Tempat Tidur Rawat Inap per Bangsal / Ruang pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah	-	Angka penggunaan Tempat Tidur Rawat Inap Per bangsal/ruang	Angka penggunaan Tempat Tidur Rawat Inap Per bangsal/ruang Adalah Jumlah Tempat tidur Rawat Inap yang tersedia per bangsal / ruang rumah sakit	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/MENKES/PER/IV/2011 tentang Sistem Informasi	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah tempat tidur rawat inap per bangsal/ruangan yang tersedia di RSUD Sekayu Kabupaten Musi	1

		Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin				Rumah Sakit 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis					Banyuasin ?	
71	RSUD Sekayu	Jumlah Pemeriksaan Radiologi per Bulan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Angka / jumlah pemeriksaan radiologi	Angka / jumlah pemeriksaan radiologi Adalah Prosedur medis yang dilakukan untuk mendiagnosis atau menangani suatu penyakit menggunakan sejumlah media	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/MENKES/PER/IV/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah pemeriksaan radiologi per bulan di RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
72	RSUD Sekayu	Jumlah Kematian menurut Jenis Penyakit per Bulan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu di Kabupaten Musi	-	Angka Kematian menurut jenis penyakit	Angka Kematian menurut jenis penyakit Adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian menurut jenis penyakit yang terjadi di RSUD Sekayu	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/MENKES/PER/IV/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit 2. Peraturan Menteri Kesehatan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah kematian pasien per bulan di RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin ?	1

		Banyuasin				Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis						
73	RSUD Sekayu	Jumlah Kelahiran Bayi per Bulan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Angka Kelahiran Bayi	Angka Kelahiran Bayi Adalah angka yang menunjukkan jumlah kelahiran bayi di Rumah Sakit	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/MENKES/PER/IV/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah kelahiran bayi per bulan di RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
74	RSUD Sekayu	Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan, Rawat Inap dan UGD per Bulan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Angka Kunjungan Pasien	Angka Kunjungan Pasien Adalah angka yang menunjukkan jumlah Kunjungan Pasien Ke Rumah sakit baik Rawat Jalan, Rawat Inap dan UGD	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/MENKES/PER/IV/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah kunjungan pasien rawat jalan, Rawat Inap dan UGD per bulan di RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin ?	1

						tentang Rekam Medis						
75	RSUD Sekayu	Jumlah Tenaga Kesehatan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Tenaga Kesehatan	Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Tenaga Kesehatan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
76	RSUD Sekayu	Jumlah Tempat Tidur Tindakan per Bangsal / Ruang pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Angka penggunaan Tempat Tidur Tindakan Per bangsal/ruang	Angka penggunaan Tempat Tidur Tindakan Per bangsal/ruang Adalah Jumlah Tempat tidur tindakan yang tersedia per bangsal / ruang rumah sakit	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/MENKES/PER/IV/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah tempat tidur tindakan per bangsal/ruangan yang tersedia di RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
77	RSUD Sekayu	Daftar 10 Penyakit Terbesar Rawat Inap pada UPT	-	Penyakit terbanyak yang di derita pasien	Pasien yang menerima proses perawatan Rawat Inap oleh tenaga kesehatan profesional	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/MENKES/	Tahunan	Integer	-	-	Penyakit apa saja yang diderita oleh pasien rawat inap di RSUD	1

		Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin			akibat penyakit tertentu	PER/IV/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis					Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin ?	
78	RSUD Sekayu	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Angka SDM	Angka SDM Adalah Angka yang merujuk pada SDM yang terkait dengan tenaga kerja atau karyawan yang berkerja di Rumah Sakit	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/MENKES/PER/IV/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah Sumber Daya Manusia (Tenaga Kerja) di RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
79	RSUD Sekayu	Daftar 10 Penyakit Terbesar Rawat Jalan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu di Kabupaten	-	Penyakit terbanyak yang di derita pasien	Pasien yang menerima proses perawatan rawat jalan oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/MENKES/PER/IV/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit	Tahunan	Integer	-	-	Penyakit apa saja yang diderita oleh pasien rawat jalan di RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin ?	1

		Musi Banyuasin				2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis						
80	RSUD Sungai Lilin	Jumlah Ruang Isolasi, Ruang Pengawasan / Intensif, Ruang Tindakan dan Jumlah Tempat Tidur per Bangsal / Ruang pada UPT Rumah Sakit Umum Sungai Lilin	-	Jumlah Tempat tidur per Bangsal/Ruang	Ruangan adalah bagian dari Ruang merupakan tempat yang dibatasi oleh bidang-bidang fisik maupun non fisik yang memiliki fungsi spesifik. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah tempat tidur per bangsal pada RSUD Sungai Lilin?	1
81	RSUD Sungai Lilin	Jumlah Bangsal / Ruang menurut Jenis Kelas pada UPT Rumah Sakit Umum Sungai Lilin	-	Ruanga Bangsal Menurut Kelas	Ruang adalah gabungan/kumpulan dari ruanganruangan sesuai fungsi dalam pelayanan Rumah Sakit yang saling berhubungan dan terkait satu sama lain dalam rangka pencapaian tujuan pelayanan kesehatan dari suatu Ruang.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit	Tahunan	Integer	-	-	Ruang bangsal apa saja yang ada pada RSUD Sungai Lilin?	1
82	RSUD Sungai Lilin	Jumlah Pasien yang dirawat Jalan pada UPT Rumah Sakit Umum	-	Pasien yang dirawat Jalan	Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Pasien Rawat Jalan yang ada pada RSUD	1

		Sungai Lilin			pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana sesuai standar.	Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit					Sungai Lilin?	
83	RSUD Sungai Lilin	Jumlah Tenaga Kesehatan pada UPT Rumah Sakit Umum Sungai Lilin	-	Tenaga Kesehatan	Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Tenaga Kesehatan pada RSUD Sungai Lilin?	1
84	RSUD Sungai Lilin	Jumlah Kejadian Luar Biasa per Kecamatan di Rumah Sakit Umum Sungai Lilin	-	Kejadian Luar Bisa	Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Kejadian Luar Biasa pada RSUD Sungai Lilin?	1
85	RSUD Sungai Lilin	Jumlah Bayi Lahir pada UPT Rumah Sakit Umum Sungai Lilin menurut Jenis Kelamin per	-	Bayi Lahir pada RSUD Sungai Lilin	Bayi Baru Lahir adalah bayi umur 0 sampai dengan 28 hari	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Bayi Lahir pada RSUD Sungai Lilin?	1

		Bulan				Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial						
86	RSUD Sungai Lilin	Jumlah Kematian Ibu dan Bayi pada RSUD Sungai Lilin Menurut Jenis Penyakit Per Bulan	-	Kematian Ibu dan Anak pada RSUD Sungai Lilin menurut Jenis Penyakit Per Bulan	Angka Kematian Ibu yang selanjutnya disingkat AKI adalah jumlah kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya per 100.000 kelahiran hidup.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemeriksaan Laboratorium untuk Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Jaringan Pelayananannya.	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Kematian Ibu dan Anak pada RSUD Sungai Lilin?	1
87	RSUD Sungai Lilin	Jumlah Kematian pada UPT Rumah Sakit Umum Sungai Llin menurut Jenis Penyakit per Bulan	-	Kematian pada RSUD Sungai Lilin menurut Jenis Penyakit	Jumlah Kematian merupakan banyaknya pasien dinyatakan telah meninggal dunia dikarenakan berbagai penyakit atau kondisi medis yang tidak dapat diatasi atau karena sebab lainnya.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Kematian pasien pada RSUD Sungai Lilin?	1
88	RSUD Sungai Lilin	Jumlah Pelayanan Photorontgen pada UPT Rumah Sakit Umum Lilin per Bulan	-	Pelayanan Photorontgen	Pelayanan Radiologi Klinik adalah pelayanan medik yang menggunakan semua modalitas yang menggunakan sumber radiasi pegion dan non pegion untuk diagnosis	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah pasien pelayanan Photorontgen pada RSUD Sungai Lilin?	1

					dan/atau terapi dengan panduan imejing	Pelayanan Radiologi Klinik						
89	RSUD Bayung Lencir	Jumlah Pelayanan Photorontgen pada UPT Rumah Sakit Umum Bayung per Bulan	-	Pelayanan Photorontgen	Jumlah Pelayanan Photorontgen Merupakan jumlah pelayanan pemeriksaan penunjang menggunakan mesin X-ray di rumah sakit	UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah pasien Photorontgen Per Bulan ?	1
90	RSUD Bayung Lencir	Jumlah Pasien yang dirawat Inap pada UPT Rumah Sakit Umum Bayung Lencir	-	Pasien yang di Rawat Inap	Jumlah pasien rawat inap merupakan jumlah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang mendapatkan pelayanan rawat inap di rumah sakit	UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah pasien rawat inap per bulan?	1
91	RSUD Bayung Lencir	Jumlah Pasien yang dirawat Jalan pada UPT Rumah Sakit Umum Bayung Lencir	-	Pasien yang di Rawat Jalan	Jumlah pasien rawat jalan merupakan jumlah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang tidak mendapatkan pelayanan rawat inap di rumah sakit	UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	Tahunan	String	-	-	Berapa jumlah pasien rawat jalan per bulan?	1
92	RSUD Bayung Lencir	Jumlah Tenaga Kesehatan pada UPT Rumah Sakit Umum Bayung Lencir	-	Tenaga Kesehatan	Tenaga Kesehatan merupa orang-orang yang secara profesionalmemberikan pelayanan kesehatan setelah menempuh pendidikan dan pelatihan formal dalam disiplin ilmu tertentu	UU No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	Tahunan	integer	-	-	Apa saja tenaga kesehatan yang ada di RSUD Bayung Lencir?	1
93	RSUD Bayung Lencir	Jumlah Bayi Lahir pada UPT Rumah	-	Bayi Lahir	Jumlah bayi lahir merupakan bayi yang telah dilahirkan di	Peraturan Menteri Kesehatan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah bayi baru lahir menurut jenis	1

		Sakit Umum Bayung Lencir menurut Jenis Kelamin per Bulan			rumah sakit	No.53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Noenatal Esensial					kelamin per bulan?	
94	RSUD Bayung Lencir	Jumlah Kematian pada UPT Rumah Sakit Umum Bayung Lencir menurut Jenis Penyakit per Bulan	-	Kematian pada UPT RSUD Bayung Lencir Menurut Jenis Penyakit	Jumlah Kematian merupakan banyaknya pasien yang meninggal dirumah sakit dikarenakan penyakit tertentu maupun kematian alami di rumah sakit	UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah kematian pasien menurut jenis kpenyakit per bulan?	1
95	RSUD Bayung Lencir	Jumlah Bangsal / Ruang menurut Jenis Kelas pada UPT Rumah Sakit Umum Bayung Lencir	-	Ruang Bangsal Menurut Kelas	Jumlah ruangan bangsal merupakan jumlah ruangan perawatan yang ditempati oleh banyak pasien rawat inap rumah sakit	UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	Tahunan	Integer	-	-	Ruang bangsal apa saja?	1
96	RSUD Bayung Lencir	Jumlah Ruang Isolasi, Ruang Pengawasan / Intensif, Ruang Tindakan dan Jumlah Tempat Tidur per Bangsal / Ruang pada UPT Rumah Sakit Umum Bayung Lencir	-	Ruang Isolasi, Ruang Pengawasan / Intensif, Ruang Tindakan dan Jumlah Tempat Tidur per Bangsal / Ruang	Jumlah ruangan Isolasi, Ruangan Pengawasan/Intensif, Ruangan tindakan dan jumlah tempat tidur merupakan jumlah ruangan perawatan dan tempat tidur yang ditempati oleh banyak pasien rawat inap rumah sakit	UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah tempat tidur per bangsal RSID Bayung Lencir?	1
97	Dinas Kesehatan	Jumlah Terkonfirmasi Covid-19	-	Terkonfirmasi Covid-19	Jumlah Terkonfirmasi Covid-19 Menurut Kecamatan di	Peraturan Menteri Kesehatan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Terkonfirmasi Covid-19	1

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku untuk tujuan komersial tanpa ijin tertulis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin

		Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin			Kabupaten Musi Banyuasin	Nomor 4 Tahun 2019 tentang Santar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.					Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin ?	
98	Dinas Kesehatan	Indek Keluarga Sehat di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Indeks Keluarga Sehat	Keluarga adalah suatu lembaga yang merupakan suatu(unit) terkecil dari masyarakat, terdiri atas ayah, ibu, anakn dan juga kakek atau nenek atau individu lain yang memiliki hubungan darah, bahkan juga tidak memiliki hubungan darah(misalnya pembantu rumah tangga).	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraa n Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga.	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Indek Keluarga Sehat di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
99	Dinas Kesehatan	Angka Kesakitan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Angka Kesehatan	Angka Kesehatan/Morbiditas/ Persentase Penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan, Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan	Undang - Undang (UU) Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Angka Kesakitan di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1

					Meneni Derajat Kesehatan suatu masyarakat dapat mmenjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan.							
100	Dinas Kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Angka Usia Harapan Hidup	Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Musi Banyuasin	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
101	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Rujukan dan Jumlah Tempat Tidur (TT) di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Tempat Tidur Rumah Sakit	Tempat Tidur Rumah sakit yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.	Undang Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang klarifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Tempat Tidur (TT) Rimah Sakit Rujukan di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
102	Dinas Kesehatan	Banyaknya Bidan PerKecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Bidan	Bidan di Sarana Kesehatan dan Bidan Praktik berdasarkan Kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin.	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Penelolan Tenaga	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Bidan Per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyiasin?	1

						Kesehatan.						
103	Dinas Kesehatan	Jumlah Stunting pada Balita di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Stunting	Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Stunting pada Balita di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
104	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas, RS/Klinik Bersalin, Klinik, Pustu dan Balai Pengobatan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Puskesmas, RS/Klinik Bersalin, Klinik, Pustu dan Balai Pengobatan	Jumlah Puskesmas, RS/Klinik Bersalin, Klinik, Pastu Dan Balai Pengobatan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin.	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Puskesmas, RS/Klinik Bersalin, Klinik, Pastu dan Balai Pengobatan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
105	Dinas Kesehatan	Jumlah Apotik dan Toko Obat Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Apotik dan Toko Obat	Apotik adalah saranaan Pelayanan kefermasian tempat dilakukan praktek kefermasian oleh Apoteker, sedangkan Toko Obat dilakukan praktek kefermasian dilakukan oleh Tenaga Teknis Kefermasian	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Apotik dan Toko Obat Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
106	Dinas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus,	-	Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan	Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Psyandu	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas,	1

		Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin		Posyandu.	Menurut Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin.	Pelayanan Kesehatan.					Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin?	
107	Dinas Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenisnya di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Tenaga Kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Tenaga Kesehatan (Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Sanitarian, Lainnya) berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin.	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Penelolan Tenaga Kesehatan.	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Tenaga Kesehatan Menurut Jenisnya di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
108	Dinas Kesehatan	Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Kasus Penyakit Terbanyak	Kasus Penyakit Terbanyak Yang Terjadi Di Kabupaten Musi Banyuasin	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Santar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
109	Dinas Kesehatan	Jumlah Bayi dan Kematian Bayi dan Balita Kabupaten Musi Banyuasin	-	Bayi dan Kematian Bayi dan Balita	Jumlah Bayi dan Kematian Bayi dan Balita menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Santar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Bayi dan Kematian Bayi dan Balita Kabupaten Musi Banyuasin ?	1

						Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.						
110	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin	-	Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Musi Banyuasin	Puskesmas, Klinik Bersalin, Puskesmas Pembantu berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Musi Banyuasin.	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin?	1
111	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk yang Mempunyai Jaminan Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin	-	Penduduk yang Mempunyai Jaminan Kesehatan	Penduduk yang Mempunyai Jaminan Kesehatan menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Penduduk yang Mempunyai Jaminan Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
112	Dinas Kesehatan	Jumlah Bayi Baru Lahir	-	Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Bayi Baru Lahir ?	1

113	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokter di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Dokter	Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin.	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Penelolan Tenaga Kesehatan.	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Dokter Di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
114	Dinas Kesehatan	Jumlah Tempat Praktek Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Tempat Praktek Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi.	Tempat Praktek Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Peraturan Menteri Kesehatan No 2052 Tahun 2011 tentang izin praktek dan pelaksanaan praktek kedokteran.	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah tempat Praktek Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
115	Dinas Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Tenaga Kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Tenaga Kesehatan (Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Tenaga Gizi, Ahli Teknologi Laboratorium Medis) berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin.	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Penelolan Tenaga Kesehatan.	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
116	Dinas Kesehatan	Jumlah Bayi Lahir dan Bayi Gizi Buruk Kabupaten Musi Banyuasin	-	Bayi Lahir, Bayi Gizi Buruk	Jumlah Bayi Lahir, Balita, dan Bayi Gizi Buruk Kabupaten Musi Banyuasin	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Santar Teknis Pemenuhan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Bayi Lahir dan Bayi Gizi Buruk Kabupaten Musi Banyuasin?	1

						Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.						
117	Dinas Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Musi Banyuasin	-	Tenaga Kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Tenaga Kesehatan (Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Sanitarian, Lainnya) berdasarkan Puskesmas di Kabupaten Musi Banyuasin.	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Penelolaan Tenaga Kesehatan.		Integer	-	-	Berapa Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Musi Banyuasin?	1
118	Dinas Kesehatan	Campaign Penduduk Yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan UHC	-	Jaminan Kesehatan Universal Health Coverage (UHC)	Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dan biaya terjangkau.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atau Perpres 84 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan		Integer	-	-	Berapa Campaign Penduduk Yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan UHC?	1
119	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Jumlah Peserta Didik Menurut Kecamatan	-	Peserta didik	Peserta didik berdasarkan Kecamatan SD dan SMP	Penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan menjadi awal dimulainya era	Tahunan	Integer	-	-	Berapakah jumlah Peserta Didik Menurut Kecamatan ?	1

						pendataan yang lebih terstruktur, massif, dan berkualitas						
120	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Jumlah Rombel Menurut Jenjang Pendidikan	-	Rombongan Belajar	Rombongan Belajar berdasarkan jenjang pendidikan SD dan SMP	Penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan menjadi awal dimulainya era pendataan yang lebih terstruktur, massif, dan berkualitas	Tahunan	Integer	-	-	Berapakah jumlah Rombel Menurut Jenjang Pendidikan?	1
121	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Jumlah Rombel Menurut Kecamatan	-	Rombongan Belajar	Rombongan Belajar berdasarkan jenjang pendidikan SD dan SMP per Kecamatan	Penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan menjadi awal dimulainya era pendataan yang lebih terstruktur, massif, dan berkualitas	Tahunan	Integer	-	-	Berapakah jumlah Rombel Menurut Kecamatan?	1
122	Dinas Pendidikan Dan	Jumlah Sekolah Menurut	-	Sekolah	Sekolah berdasarkan jenjang pendidikan SD	Penerbitan Peraturan Menteri	Tahunan	Integer	-	-	Berapakah jumlah Sekolah Menurut Jenjang	1

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku untuk tujuan komersial tanpa ijin tertulis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin

	Kebudayaan	Jenjang Pendidikan			dan SMP	Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan menjadi awal dimulainya era pendataan yang lebih terstruktur, massif, dan berkualitas					Pendidikan?	
123	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Jumlah Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan	-	Peserta didik	Peserta didik berdasarkan jenjang pendidikan SD dan SMP	Penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan menjadi awal dimulainya era pendataan yang lebih terstruktur, massif, dan berkualitas	Tahunan	Integer	-	-	Berapakah jumlah Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan?	1
124	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan	-	Guru	Guru berdasarkan jenjang pendidikan S1/DIV, S2, S3	Penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan menjadi awal	Tahunan	Integer	-	-	Berapakah jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan?	1

						dimulainya era pendataan yang lebih terstruktur, massif, dan berkualitas						
125	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Jumlah Guru Menurut Kecamatan	-	Guru	Guru berdasarkan Kecamatan	Penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan menjadi awal dimulainya era pendataan yang lebih terstruktur, massif, dan berkualitas	Tahunan	Integer	-	-	Berapakah jumlah Guru Menurut Kecamatan?	1
126	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Jumlah Sarana Prasarana Berdasarkan Kecamatan	-	Sarana Prasarana Pendidikan	Sarana Prasarana Pendidikan berdasarkan Kecamatan	Penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan menjadi awal dimulainya era pendataan yang lebih terstruktur, massif, dan berkualitas	Tahunan	Integer	-	-	Berapakah jumlah Sarana Prasarana Berdasarkan Kecamatan?	1
127	Dinas Pendidikan	Jumlah Siswa Putus Sekolah	-	Peserta didik	Peserta didik yang putus sekolah	Penerbitan Peraturan	Tahunan	Integer	-	-	Berapakah jumlah Siswa	1

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku untuk tujuan komersial tanpa ijin tertulis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin

	Dan Kebudayaan	Berdasarkan Kecamatan			berdasarkan Kecamatan	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan menjadi awal dimulainya era pendataan yang lebih terstruktur, massif, dan berkualitas					Putus Sekolah Berdasarkan Kecamatan?	
128	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Jumlah Pegawai Menurut Kecamatan	-	Pegawai	Pegawai berdasarkan Kecamatan	Penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan menjadi awal dimulainya era pendataan yang lebih terstruktur, massif, dan berkualitas	Tahunan	Integer	-	-	Berapakah jumlah Pegawai Menurut Kecamatan?	1
129	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Jumlah Guru Berstatus PNS Berdasarkan Kecamatan	-	Guru	Guru berdasarkan Status PNS per Kecamatan	Penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan	Tahunan	Integer	-	-	Berapakah jumlah Guru Berstatus PNS Berdasarkan Kecamatan?	1

						menjadi awal dimulainya era pendataan yang lebih terstruktur, massif, dan berkualitas						
130	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Jumlah Siswa Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan	-	Peserta didik	Peserta didik yang putus sekolah berdasarkan jenjang pendidikan SD dan SMP	Penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan menjadi awal dimulainya era pendataan yang lebih terstruktur, massif, dan berkualitas	Tahunan	Integer	-	-	Berapakah jumlah Siswa Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan?	1
131	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Capaian Nilai Ujian Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama	-	Peserta didik	Rata-rata nilai ujian SMP	Penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan menjadi awal dimulainya era pendataan yang lebih terstruktur, massif, dan berkualitas	Tahunan	Integer	-	-	Berapakah Capaian Nilai Ujian Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama?	1

132	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Jumlah Siswa Belajar Non Formal Kejar Paket	-	Peserta didik	Peserta didik yang belajar pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan menjadi awal dimulainya era pendataan yang lebih terstruktur, massif, dan berkualitas	Tahunan	Integer	-	-	Berapakah jumlah Siswa Belajar Non Formal Kejar Paket?	1
133	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Jumlah Guru Yang Bersertifikasi Berdasarkan Kecamatan	-	Guru	Guru yang mempunyai sertifikat pendidik	Penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan menjadi awal dimulainya era pendataan yang lebih terstruktur, massif, dan berkualitas	Tahunan	Integer	-	-	Berapakah jumlah Guru Yang Bersertifikasi Berdasarkan Kecamatan?	1
134	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Jumlah Sarana Prasarana Berdasarkan Jenjang Pendidikan	-	Sarana Prasarana	Sarana dan prasarana pendidikan pada SD dan SMP	Penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data	Tahunan	Integer	-	-	Berapakah jumlah Sarana Prasarana Berdasarkan Jenjang Pendidikan?	1

						Pokok Pendidikan menjadi awal dimulainya era pendataan yang lebih terstruktur, massif, dan berkualitas						
135	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Jumlah Guru Berstatus Honorer Berdasarkan Kecamatan	-	Guru	Guru berdasarkan Status Honorer per Kecamatan	Penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan menjadi awal dimulainya era pendataan yang lebih terstruktur, massif, dan berkualitas	Tahunan	Integer	-	-	Berapakah jumlah Guru Berstatus Honorer Berdasarkan Kecamatan?	1
136	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Jumlah Organisasi Kesenian dan Kebudayaan	-	Organisasi Kesenian dan Kebudayaan	Organisasi Kesenian dalam Kab Muba	DAPOBUD adalah bagian dari Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	Tahunan	Integer	-	-	Berapakah jumlah Organisasi Kesenian dan Kebudayaan?	1
137	Dinas Pendidikan	Jumlah Objek Cagar	-	Organisasi	Cagar Budaya dalam Kab Muba yang	DAPOBUD adalah bagian	Tahunan	Integer	-	-	Berapakah jumlah	1

	Dan Kebudayaan	Budaya		Kebudayaan	dimanfaatkan	dari Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yang merupakan amanat Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan					Objek Cagar Budaya?	
138	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan	-	Sekolah	Sekolah berdasarkan jenjang pendidikan SD dan SMP per Kecamatan	Penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan menjadi awal dimulainya era pendataan yang lebih terstruktur, massif, dan berkualitas	Tahunan	Integer	-	-	Berapakah jumlah Sekolah Menurut Kecamatan?	1
139	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Jumlah Guru Sekolah Negeri dan Swasta Berdasarkan Kecamatan	-	Guru	Guru berdasarkan sekolah negeri dan swasta per Kecamatan	Penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan menjadi awal dimulainya era pendataan yang	Tahunan	Integer	-	-	Berapakah jumlah Guru Sekolah Negeri dan Swasta Berdasarkan Kecamatan?	1

						lebih terstruktur, massif, dan berkualitas						
140	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Data Komunitas Kebudayaan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Pegawai	Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan S1/DIV, S2, S3	Penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan menjadi awal dimulainya era pendataan yang lebih terstruktur, massif, dan berkualitas	Tahunan	Integer	-	-	Berapakah jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan?	1
141	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan	-	Komunitas Kebudayaan	Komunitas Kebudayaan yang terdata pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DAPOBUD adalah bagian dari Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	Tahunan	Integer	-	-	Berapakah jumlah Data Komunitas Kebudayaan di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
142	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Negeri dan Swasta Berdasarkan Kecamatan TA	-	Peserta didik	Peserta didik pada sekolah Negeri dan Swasta berdasarkan Kecamatan tahun ajaran 2021/2022	Penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 79 Tahun 2015	Tahunan	Integer	-	-	Berapakah jumlah Peserta Didik Sekolah Negeri dan Swasta Berdasarkan Kecamatan TA.	1

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku untuk tujuan komersial tanpa ijin tertulis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin

		2021/2022				tentang Data Pokok Pendidikan menjadi awal dimulainya era pendataan yang lebih terstruktur, massif, dan berkualitas					2021/2022?	
143	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin TA 2022/2023	-	Sekolah, Peserta didik dan Guru	Sekolah, Peserta didik dan Guru Taman Kanak-Kanak (TK) berdasarkan Kecamatan	Penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan menjadi awal dimulainya era pendataan yang lebih terstruktur, massif, dan berkualitas	Tahunan	Integer	-	-	Berapakah jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin TA. 2022/2023?	1
144	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Negeri dan Swasta Berdasarkan Kecamatan TA 2022/2023	-	Peserta didik	Peserta didik pada sekolah Negeri dan Swasta berdasarkan Kecamatan tahun ajaran 2021/2022	Penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan menjadi awal dimulainya era pendataan yang lebih terstruktur, massif, dan	Tahunan	Integer	-	-	Berapakah jumlah Peserta Didik Sekolah Negeri dan Swasta Berdasarkan Kecamatan TA. 2021/2022?	1

						berkualitas						
145	Dinas Sosial	Jumlah Penghuni Panti Asuhan menurut Usia per Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Panti Asuhan / Panti Sosial	Rehabilitas sosial dasar anak adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial anak, keluarga anak, dan lingkungan sosial anak. Panti sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sarana untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.	Pemansos No.4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitas Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Penghuni Panti Asuhan menurut Usia per Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
146	Dinas Sosial	Jumlah Panti Asuhan dan Penghuni menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Panti Asuhan / Panti Sosial	Rehabilitas sosial dasar anak adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial anak, keluarga anak, dan lingkungan sosial anak. Panti sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sarana untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar	Pemansos No.4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitas Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Panti Asuhan dan Penghuni menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1

					dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.							
147	Dinas Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.	PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
148	Dinas Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Pemerdayaan Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan / masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.	1. UU No. 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial. 2. Permensos No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman, Pendapatan dan Pengelolaan data PMKS	Tahunan	Integer	-	-	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	1

149	Dinas Sosial	Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosia (DTKS) di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Data Terpadu Kesejahteraan Sosia (DTKS)	DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pe ayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerimaan bantuan dan pemerdaan sosial serta potensi dan suber kesejahteraan sosial (PSKS). DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah.	Sumber konsep Definisi berdasarkan Website Resmi Kemensos;https://dtk.s.kemensos.go.id/faq-tanya-jawab-centang-dtk.s	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosia (DTKS) di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
150	Dinas Sosial	Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Penerima Bantuan Iuran (PBI), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Bantuan Iuran Jasmani Kesehatan adalah Iuran program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayar oleh pemerintah. Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.	Peraturan Menteri sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan tata cara Perubahan data Penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan.	Tahunan	Integer	-	-	Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	1
151	Dinas Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabuapeten Musi Banyuasin	-	Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabuapeten Musi Banyuasin ?	1

					lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	DISABILITAS						
152	Dinas Sosial	Jumlah Program Keluarga Harapan (PKH)	-	Program Keluarga Harapan (PKH)	Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.	Kementerian Sosial Republik Indonesia	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Program Keluarga Harapan (PKH) ?	1
153	Dinas Sosial	Jumlah Penerima BPNT Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan	-	BPNT	Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.	PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NONTUNA	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Penerima BPNT Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan ?	1
154	Dinas Sosial	Jumlah Penerima PKH	-	PKH	Program Keluarga Harapan yang	Kementerian Sosial Republik	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Penerima PKH	1

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku untuk tujuan komersial tanpa ijin tertulis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin

		Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan			selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.	Indonesia					Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan ?	
155	Dinas Sosial	Korban Bencana Alam	-	Bencana Alam	Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia, antara lain; Banjir, dan Tanah Longsor.	1. UU No. 24 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Bencana. 2. Permensos No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman, Pendataan dan Pengelolaan data PMKS	Tahunan	Integer	-	-	Korban Bencana Alam?	1
156	Dinas Sosial	Korban Bencana Sosial	-	Bencana Sosial	Bencana Sosial adalah bencana yang dilakukan oleh manusia antara lain: Kebakaran, Konflik Sosial, dan Korban Tindak Kekerasan	1. UU No. 24 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Bencana. 2. Permensos No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman, Pendataan dan Pengelolaan data PMKS	Tahunan	Integer	-	-	Korban Bencana Sosial?	1
157	Dinas Ketahanan Pangan	Stok Cadangan Pangan daerah ( Beras (Kg))	-	Stok Cadangan Pangan daerah	Pengembalian cadangan pangan (beras) yang bertujuan memenuhi cadangan pangan pemerintah Kabupaten Musi	Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 36 Tahun 2013	Tahunan	Desimal	-	-	Berapa Stok Cadangan Pangan daerah ( Beras (Kg))?	1

					Bnyuasin.							
158	Dinas Ketahanan Pangan	Keragaman dan Mutu Gizi Konsumsi Pangan Penduduk	-	Keragaman dan Mutu Gizi Konsumsi Pangan	Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil,merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.	Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Tahunan	Desimal	-	-	Berapa Keragaman dan Mutu Gizi Konsumsi Pangan Penduduk ?	1
159	Dinas Ketahanan Pangan	Keragaman Jumlah Bahan Pangan Konsumsi Penduduk	-	Keragaman Bahan Pangan Konsumsi	Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil,merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.	Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Tahunan	Integer	-	-	Keragaman Jumlah Bahan Pangan Konsumsi Penduduk ?	1
160	Dinas Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Musi Banyuasin	-	PPH	PPH merupakan susunan pangan yang benar-benar menjadi harapan baik di tingkat konsumsi maupun ketersediaan, serta dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan dan evaluasi ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk	Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Tahunan	Desimal	-	-	Berapa Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
161	Dinas Ketahanan	Persentase Komposisi	-	Komposisi	Sampah spesifik adalah sampah yang	Perda Kabupaten Musi	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Persentase	1

	Pangan	sampah di Kabupaten Musi Banyuasin		Sampah	karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.	Banyuasin No. 2 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga					Komposisi Sampah Menurut Komposisi?	
162	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.	Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 2 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah menurut Kecamatan?	1
163	Dinas Ketahanan Pangan	Perkiraan Jumlah Sampah Perhari Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Smpah Perhari	Perkiraan adalah Jumlah Sisa Kegiatan sehari – hari dari manusia dan/atau Proses dari Kegiatan manusia.	Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 2 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	Tahunan	Desimal	-	-	Berapa Perkiraan Jumlah Sampah perhari menurut Kecamatan?	1
164	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah Sarana Pengumpulan Sampah di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Sarana Pengumpulan Sampah	Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volume memerlukan pengelolaan khusus.	Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 2 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah sarana pengumpulan sampah menurut jenis?	1

						Rumah Tangga						
165	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah Sampah dan Sampah yang terangkut di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Sampah Yang Terangkut	Sampah adalah sisa kegi atansehari-hari manusia dan/atau proses	Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 2 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Sampah dan Sampah yang terangkut ?	1
166	Dinas Ketahanan Pangan	Ruang Terbuka Hijau	-	Ruang terbuka hijau	Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.	Peraturan Menteri (Permen) PU No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Ruang Terbuka Hijau ?	1
167	Dinas Ketahanan Pangan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air	Peraturan Menteri LHK atau Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1

					Laut.							
168	Dinas Ketahanan Pangan	Kelompok Pengelola Sampah Mandiri	-	Pengelola Sampah Mandiri	Pengelola Sampah Mandiri adalah lembaga, kelompok masyarakat atau perseorangan yang peduli untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri di lingkungannya	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Kelompok Pengelola Sampah Mandiri ?	1
169	Dinas Ketahanan Pangan	Data Persentase Komposisi Sampah di Kab Musi Banyuasin	-	Data Persentase Komposisi Sampah	Data persentase komposisi sampah adalah data yang menunjukkan proporsi atau persen dari setiap jenis sampah yang terdapat dalam suatu timbunan sampah. Data ini penting untuk mengetahui karakteristik, sumber, dan potensi pemanfaatan sampah. Data ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk merencanakan strategi pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Data Persentase Komposisi Sampah di Kab Musi Banyuasin ?	1
170	Dinas Ketahanan Pangan	Data Jumlah Timbunan Sampah Per Kecamatan Berdasarkan Tingkat Penanganan	-	Data Jumlah Timbunan Sampah	Data jumlah timbunan sampah adalah data yang menggambarkan jumlah sampah yang menumpuk di suatu tempat, baik di tempat pembuangan akhir (TPA), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST),	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Data Jumlah Timbunan Sampah Per Kecamatan Berdasarkan Tingkat Penanganan ?	1

					maupun di lokasi lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Data ini penting untuk mengetahui kondisi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan efektivitas pengelolaan sampah.							
171	Dinas Ketahanan Pangan	Lokasi Pengomposan Sampah Pasar di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Lokasi Pengomposan Sampah Pasar	Lokasi pengomposan sampah pasar adalah tempat untuk mengolah sampah organik yang berasal dari pasar dengan menggunakan proses penguraian biologis. Pengomposan sampah pasar bertujuan untuk mengurangi volume dan berat sampah, menghasilkan pupuk organik, dan mencegah pencemaran lingkungan.	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik1 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Persyaratan Teknis Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah	Tahunan	Integer	-	-	Lokasi Pengomposan Sampah Pasar di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
172	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah Sarana / Prasarana Pemrosesan Sampah di Kabupaten Musi	-	Sarana/Prasana Pemrosesan Sampah	Tempat Pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia	Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 2 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah sarana / prasara pemrosesan sampah menurut jenis?	1

		Banyuasin			dan lingkungan	Sejenis Sampah Rumah Tangga						
173	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penduduk Meningal Dunia Menurut Kecamatan	-	Jumlah Kematian	Kematian atau mortalitas menurut WHO adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup (Biro Pusat Statistik)	Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah penduduk meninggal di Kabupaten Musi Banyuasin selama periode tahun 2022?	1
174	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan	-	Penduduk	Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992)	Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan?	1
175	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Kepadatan Penduduk per KM2 Menurut Kecamatan	-	Kepadatan Penduduk	Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan. Secara umum, tingkat kepadatan penduduk (population density) adalah perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah berdasarkan satuan luas tertentu.	Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Tahunan	String	-	-	Berapa kepadatan penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022?	1
176	Dinas Kependudukan	Jumlah Penduduk	-	Migrasi Penduduk	Migrasi adalah perpindahan penduduk	Undang – Undang Nomor	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah penduduk	1

	Dan Pencatatan Sipil	Pindah Pergi		Keluar	dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional). Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong (push factor) suatu wilayah dan daya tarik (pull factor) wilayah lainnya.	24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan						pindah dari Kabupaten Musi Banyuasin selama periode tahun 2022?	
177	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama	-	Penduduk Berdasarkan Agama	Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama.	Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Tahunan	Integer	-	-	Apa agama/kepercayaan yang dianut oleh sebagian besar penduduk Kabupaten Musi Banyuasin di Tahun 2022?	1	
178	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	-	Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	Informasi tentang jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan	Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa persen proporsi penduduk usia muda, penduduk usia produktif, dan usia tua di Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2022?	1	

					dan lain sebagainya.							
179	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penduduk Pindah Datang	-	Migrasi Penduduk Masuk	Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional). Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong (push factor) suatu wilayah dan daya tarik (pull factor) wilayah lainnya	Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah penduduk datang ke Kabupaten Musi Banyuasin selama periode tahun 2022?	1
180	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin Kabupaten Musi Banyuasin	-	Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	1. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. 2. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. 3. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan	Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Tahunan	Integer	-	-	Apa pekerjaan yang menjadi mata pencarian sebagian besar penduduk Kab. Musi Banyuasin Tahun 2022?	1

					<p>pribadi.</p> <p>4. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.</p> <p>5. Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya.</p>							
181	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penduduk dan Presentase Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten	-	Penduduk dan Presentase Pertumbuhan Penduduk	Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Indonesia.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992. Dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Penduduk dan Presentase Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Musi	1

		Musi Banyuasin			Dan Presentase pertumbuhan penduduk adalah ukuran yang menunjukkan perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu.	Data Indonesia					Banyuasin ?	
182	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penduduk , Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun , Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk merupakan angka yang menggambarkan tingkat penambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu (Badan Pusat Statistik). Angka pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah dan struktur penduduk beberapa tahun ke depan	Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Tahunan	String	-	-	Berapa Jumlah Penduduk , Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun , Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
183	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penduduk Warga Negara Asing Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan	-	Warga Negara Asing (WNA)	Warga Negara Asing (WNA) yaitu seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu, tapi bukan berasal dari negara tersebut dan tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara.	Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah WNA yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2022?	1

184	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Jumlah Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Menurut Kecamatan	-	Rumah Tangga (Keluarga)	Keluarga dibentuk dari sekelompok orang yang terikat dan mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Unit keluarga menjadi hal penting untuk berbagai intervensi seperti penanganan kemiskinan, keluarga berencana, kesehatan dan lain sebagainya.	Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah kepala keluarga di Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2022?	1
185	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP Elektronik Menurut Kecamatan	-	KTP Elektronik	KTP Elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP Elektronik Menurut Kecamatan?	1
186	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan KTP	-	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke	Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Tahunan	String	-	-	Berapa rasio kepemilikan KTP di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2022?	1

					atas atau mereka yang berumur di bawah 17 tahun tetapi sudah pernah kawin atau disebut penduduk wajib KTP.							
187	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Rasio Jenis Kelamin	-	Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)	Ratio Jenis Kelamin (Sex Ratio/SR) adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita (Badan Pusat Statistik)	Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Tahunan	String	-	-	Berapa angka rasio jenis kelamin (sex rasio) penduduk Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2022?	1
188	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin	Jumlah penduduk adalah salah satu hal yang penting untuk diketahui oleh suatu negara, karena berkaitan dengan berbagai aspek pembangunan, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan lingkungan hidup. Dan Rasio Jenis Kelamin (RJK) adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019	Tahunan		-	-	Berapa Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin?	1

189	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jumlah dan Klasifikasi Bumdes Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Bumdes	BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.	1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. permendes nomor 3 tahun 2021 dan PP nomor 11 tahun 2021	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah Keadaan Bumdes di Musi Banyuasin dalam bentuk klasifikasi perintis, pemula, berkembang dan maju ?	1
190	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jumlah Desa / Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Pendataan jumlah jumlah desa dan kelurahan yang ada di kabupaten musu banyuasin	Didalam kabupaten musin banyuasin terdapat 227 desa dan 13 kelurahan	Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Tahunan	Integer	-	-	Berapakah Jumlah Desa dan Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
191	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jumlah Status Desa yang Mengalami Perkembangan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Desa yang mengalami perkembangan	Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Penentuan keadaan perkembangan desa	Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Tahunan	Integer	-	-	Berapakah Jumlah Status Desa yang Mengalami Perkembangan Berdasarkan Data ini terkait jumlah status kemampuan dan kemandirian desa dalam pengklasifikasi n desa guna menentukan intervensi anggaran maupun	1

					melalui perhitungan dan penentuan status desa dalam bentuk IDM (Indeks Desa Membangun) dengan tolak ukur yang berkenaan dengan 1. Indeks Ketahanan Sosial 2. Indeks Ketahanan Ekonomi 3. Indeks Ketahanan Lingkungan Di 229 desa di kabupaten musi banyuasin						kebijakan pembangunan desa?	
192	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Persentase Dana Desa untuk BLT dan Jumlah Penerima Manfaat Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Dana Desa dan BLT	Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan  Bantuan Langsung tunai dana desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. peraturan menteri keuangan RI nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan dana desa tahun 2023 dan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia	Tahunan	Persentase	-	-	Berapa persen pemberian BLT yang diberikan kepada masyarakat di setiap desa dan apa manfaatnya?	1

					BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.							
193	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jumlah Kelompok Industri Kerajinan Binaan DPMD Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Kelompok Industri Kerajinan	Pemberdayaan masyarakat desa dalam program pelatihan peningkatan keterampilan dan bantuan alat industri	Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Tahunan	Integer	-	-	Bagaimana Pemberdayaan Kelompok Industri pemberdayaan dan berapa jumlahnya ?	1
194	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jumlah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	kepala desa, Perangkat desa dan anggota BPD	Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.  Perangkat desa adalah	Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1

					<p>unsur staf adalah unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan</p> <p>Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</p>							
195	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jumlah Anggota LPM Menurut Kecamatan DI Kabupaten Musi Banyuasin	-	Data Anggota LPM yang ada di kabupaten musu banyuasin	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPM Desa adalah lembaga mitra strategis diluar Pemerintahan Desa yang membantu dalam meningkatkan partisipasi dan pelayanan penyelenggaraan masyarakat Desa.	Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Anggota LPM Menurut Kecamatan DI Kabupaten Musi Banyuasin?	1
196	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jumlah Dusun, RW dan RT Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi	-	Dusun, RW dan RT	Dusun, RW dan RT adalah istilah yang digunakan untuk menyebut unit-unit pemerintahan dan kemasyarakatan di	Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dan peraturan menteri dalam	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Dusun, RW dan RT Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi	1

		Banyuasin			tingkat terendah di Indonesia.	negeri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman pembentukan RT dan RW					Banyuasin?	
197	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Indeks Desa Membangun (IDM) Per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi desa perkecamatan.	Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Tahunan	Desimal	-	-	Bagaimana menentukan klasifikasi status desa di setiap kecamatan dalam kabupaten banyuasin?	1
198	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Indeks Desa Membangun (IDM) Per Desa di Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin	-	Indeks Desa Membangun (IDM) per desa	Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi per desa .	Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Tahunan	Desimal	-	-	Bagaimana mengetahui klasifikasi status desa di kabupaten banyuasin?	1
199	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jumlah Bantuan Yang Diberikan Ke Desa	-	Bantuan Dasa	Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten / kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,	1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. eraturan menteri keuangan RI nomor 201/PMK.07/202 2 tentang pengelolaan dana desa tahun 2023	Tahunan	Integer	-	-	Berapakah Jumlah Bantuan yang Diberikan Ke Desa?	1

					pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.							
200	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Jumlah Menara Telekomunikasi Kabupaten Musi Banyuasin	-	Kecamatan dan jumlah menara telekomunikasi	Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang didirikan untuk kepentingan umum diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa bentuk tunggal tapa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.	Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Tahunan	Integer	-	-	berapa jumlah menara telekomunikasi di pemerintah kabupaten musu banyuasin?	1
201	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Jumlah Informasi yang di Publikasi melalui Berbagai Media (Website, Media Sosial, Radio)	-	Media (website, media sosial, radio) dan Jumlah Media	Penyebarluasan Informasi pada media massa menimbulkan keserempakan artinya suatu pesan dapat diterima oleh komunikan yang jumlah relatif banyak. Jadi untuk menyebarkan informasi, media massa sangat efektif yang dapat mengubah sikap,	- Undang - Undang RI No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers - Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Undang -	Tahunan	Integer	-	-	berapa jumlah informasi yang dipublikasikan melalui website, media sosial dan radio?	1

					pendapat dan perilaku komunikasi.	Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ' - Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Susuanan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Kominfo						
202	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Aplikasi Sistem Informasi di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Aplikasi Sistem Informasi	Aplikasi Sistem Informasi adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyajikan data atau informasi secara elektronik	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	Tahunan	Integer	-	-	Apa Aplikasi Sistem Informasi di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
203	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Jaringan Backbone Kabupaten Musi Banyuasin	-	Nama instansi dan IP Jaringan Backbone	merupakan penyediaan jaringan backbone internet yang bertujuan sebagai jaringan intra pemerintah yang menghubungkan seluruh perangkat daerah di kota sekayu.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggara n Urusan Pemerintah Konkruen Bidang Komunikasi dan Informatika	Tahunan	Integer	-	-	berapa jumlah perangkat daerah yang sudah memiliki jaringan backbone?	1

204	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Media Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat	-	surat kabar (nasional, regional, lokal)	Terdapat beberapa media yang mampu menghubungkan komunikasi antar pemerintah dan masyarakat diantaranya media sosial. Berita muba, pemkab muba, dinkominfo, radio gema randik.	UU Pers 40 Tahun 1999	Tahunan	Integer	-	-	berapa jumlah surat kabar nasional, surat kabar regional dan surat kabar lokal?	1
205	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Daftar Perangkat Daerah yang Telah Merealisasikan PPID	-	Perangkat Daerah	perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Tahunan		-	-	Berapa Daftar Perangkat Daerah yang Telah Merealisasikan PPID ?	1
206	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Jumlah Wartawan Menurut Media Massa	-	Media massa dan jumlah wartawan	Surat Penawaran dan Kerjasama Media	- Undang - Undang RI No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers - Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 Tentang	Tahunan	Integer	-	-	berapa jumlah wartawan yang sudah melakukan kerja sama?	1

						Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Kominfo						
207	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Jumlah Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi (Wifi, CCTV, Website)	-	Pelayanan publik (wifi, cctv, website) dan jumlah pelayanan publik	Layanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik	Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tahunan	Integer	-	-	berapa jumlah wifi, cctv dan website yang di lingkup kabupaten musu banyuasin?	1
208	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Jumlah Kerjasama dengan Media Massa (Elektronik dan Online)	-	Kerjasama dengan media massa (elektronik dan online)	Merupakan alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, TV.	- Undang - Undang RI No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers - Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019	Tahunan	Integer	-	-	berapa jumlah kerjasama dengan media elektronik dan media online?	1

						Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Kominfo						
209	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Jumlah Stasiun Radio Menurut Nama Stasiun, Nama Perusahaan dan Tahun Berdiri	-	Nama stasiun, nama perusahaan, tahun berdiri, frekuensi	Jumlah Stasiun Radio didefinisikan sebagai jumlah radio yang masih aktif beroperasi dan memiliki izin siar berdasarkan frekuensi yang telah diatur dalam undang undang yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik	Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2018, Tanggal 2 Mei 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio	Tahunan	Integer	-	-	berapa jumlah stasiun radio di kabupaten musi banyuasin?	1
210	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Jumlah Pengaduan Masyarakat Menurut SP4N-LAPOR!	-	SP4N-LAPOR	SP4N-LAPOR! adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap Penyelenggara pelayanan publik dan dikelola Kementerian Pendayagunaan	PERATURAN MENTERI PENDAYAGUN AAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN SISTEM	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Pengaduan Masyarakat Menurut SP4N-LAPOR?	1

					Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan Kantor Staf Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia.	PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL						
211	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sistem Informasi di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Sistem Informasi	Sistem Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi <sup>1</sup>	Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008,	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Sistem Informasi di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
212	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Fasilitas Wifi Publik di Kecamatan Sekayu	-	Titik Lokasi Wifi	Wifi Publik merupakan program penyediaan jaringan internet gratis bagi masyarakat yang tersebar di beberapa titik di kota sekayu seperti taman, tempat umum, dan tempat perkumpulan masyarakat lainnya.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkruen Bidang Komunikasi dan Informatika	Tahunan	Integer	-	-	berapa jumlah titik lokasi wifi publik yang tersebar di kabupaten musu banyuasin?	1
213	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Izin Usaha Mikro (IUMK) Perseorangan di kabupaten musu	-	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Izin Usaha Mikro (IUMK) Perseorangan	Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha dan merupakan tanda legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha berskala mikro dan kecil yang menjalankan kegiatan ekonomi secara	Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021	Tahunan	Integer	-	-	Apakah SIUP masih berlaku?	1

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku untuk tujuan komersial tanpa ijin tertulis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin

		Banyuasin			perorangan. (Berdasarkan PP No. Tahun 2021 SIUP diganti dengan NIB)							
214	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Izin Usaha Mikro (IUMK) Badan Usaha di kabupaten Musi Banyuasin	-	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Izin Usaha Mikro (IUMK) Badan Usaha	Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha dan merupakan tanda legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha berskala mikro dan kecil yang menjalankan kegiatan ekonomi secara perorangan. (Berdasarkan PP No. Tahun 2021 SIUP diganti dengan NIB)	Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021	Tahunan	Integer	-	-	Apakah SIUP masih berlaku?	1
215	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Izin Reklame di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Izin Reklame	Izin yang dilakukan untuk penyelenggaraan reklame	Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021	Tahunan	Integer	-	-	Wajibkan dimiliki oleh penyelenggara reklame ?	1
216	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rekapitulasi Penerbitan Izin Tertentu	-	Penerbitan Izin Tertentu	Non Perizinan	Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021	Tahunan	Integer	-	-	apakah termasuk dalam non perizinan ?	1
217	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Izin Tanda Daftar	-	Izin yang terdaftar	Izin Tanda Daftar merupakan dokumen pengesahan bahwa suatu usaha telah melakukan kewajiban pendaftaran perusahaan. (tidak diberlakukan lagi Berdasarkan PP No. 5	Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021	Tahunan	Integer	-	-	Apakah TDP masih diberlakukan ?	1

					Tahun 2021)							
218	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Izin Sarana Kesehatan	-	Izin Sarana Kesehatan	Izin yang diterbitkan bagi pelaku usaha yang menyediakan usaha sarana kesehatan	Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021	Tahunan	Integer	-	-	izin apakah yang dimiliki oleh pelaku usaha yang menyediakan sarana kesehatan ?	1
219	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Izin Mendirikan Bangunan	IMB adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan yang memiliki bangunan untuk melakukan usaha untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, merawat atau merobohkan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.(Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 IMB diganti menjadi PBG, dan kewenangan kepada Dinas Perkim)	Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021	Tahunan	Integer	-	-	apakah IMB diganti menjadi PBG ?	1
220	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Izin Usaha di Kab Musi Banyuasin	-	Izin Usaha	Jumlah Izin Usaha di Kab Musi Banyuasin sebanyak 368 jenis izin usaha	Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021	Tahunan	Integer	-	-	Berapakah jumlah Izin Usaha di Kab. Musi Banyuasin ?	1
221	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan	Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kabupaten	-	Nomor Induk Berusaha (NIB)	NIB merupakan identitas izin usaha yang diterbitkan	Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021	Tahunan	Integer	-	-	siapa saja kah yang harus memiliki NIB ?	1

	Terpadu Satu Pintu	Musi Banyuasin			lembaga OSS.							
222	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Unmet Need	-	Unmet Need	Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi	Undang-Undang Nomor 52.Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Krluarga	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah Unmet Need yang ada di Kabupaten Muba ?	1
223	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Peserta KB Aktif	Pasangan Usia Subur yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa di selingi kehamilan	Undang-Undang Nomor 52.Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Krluarga	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah peserta KB Aktif di Kabupaten Muba?	1
224	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Baru Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Persentase Peserta KB Baru	Banyaknya pasangan usia subur yang pertama kali mendapatkan pelayanan KB	Undang-Undang Nomor 52.Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Krluarga	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah peserta KB Baru di Kabupaten Muba?	1
225	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Jumlah Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten	-	Jumlah Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	Jumlah Persenta KB Baru yang menggunakan salah satu metode kontrasepsi jangka panjang seperti implant, MOW, dan MOP	Kementerian Kesehatan (2021), Pedoman Pelayanan Kontrasepsi dan Keluarga Berencana.	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi	1

		Musi Banyuasin									Banyuasin ?	
226	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Jumlah Pasangan Usia Subur Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Jumlah Pasangan Usia Subur	Pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 th sampai dengan 50 tahun	Undang-Undang Nomor 52.Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Krluarga	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah PUS di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
227	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif MKJP di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Peserta KB Aktif MKJP	Pasangan Usia Subur yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi Jangka Panjang tanpa di selingi kehamilan	Undang-Undang Nomor 52.Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Krluarga	Tahunan	Integer	-	-	Bepara Persentase Peserta KB Aktif MKJP di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
228	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Jumlah Drop Out KB Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Drop Out KB	Akseptor yang menghentikan kontrasepsi lebih dari 3 bulan	PerBanKependudukan dan KB Nasional Nomor 11.Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan KB	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah Droup Out peserta Kb di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
229	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Jumlah Fasilitas Kesehatan KB Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi	-	Fasilitas Kesehatan KB	Fasilitas kesehatan yang mampu memberikan pelayanan kontrasepsi	PerBanKependudukan dan KB Nasional Nomor 11.Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan	Tahunan	Integer	-	-	Ada berapa jumlah Faskes KB di Kabupaten Musi Banyuasin?	1

		Banyuasin				Kependudukan dan KB						
230	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Jumlah Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi tanpa di selingi kehamilan lebih dari 3 bulan sampai seumur hidup	PerBanKependudukan dan KB Nasional Nomor 11.Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan KB	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah peserta KB Aktif MKJP di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
231	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pembantu pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pembantu pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	Fasilitas dan atau tempat pelayanan KB	PerBanKependudukan dan KB Nasional Nomor 11.Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan KB	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah KKB dan PPKBD di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
232	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif	Jumlah Pasangan Suami istri yang usia perempuannya 15-49 tahun. Akseptor yang pada saat ini sedang memakai kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan dan masih terlindungi	Depkes RI (2016). Profil Kesehatan Indonesia tahun 2015 Perka BKKBN No. 24 tahun 2017 tentang Pelayanan Keluarga Berencana	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku untuk tujuan komersial tanpa ijin tertulis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin

					efek kontrasepsinya.	Pasca Persalinan Dan Keguguran						
233	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Jumlah Peserta KB Baru yang Dilayani Faskes KB Swasta	-	Peserta KB Baru	Pasangan usia subur yang baru pertama kali mendapatkan pelayanan KB di fasilitas kesehatan swasta	PerBanKependudukan dan KB Nasional Nomor 11.Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan KB	Tahunan	Integer	-	-	Berapa KB Baru yang di layani di Faskes KB Swasta di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
234	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Data Jumlah PUS dan Kesertaan JKN	-	PUD dan JKN	Pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 th sampai dengan 50 tahun JKN merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory).	Undang-Undang Nomor 52.Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Krluarga Dan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak.	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah PUS dan Kesertaan JKN ?	1
235	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Jumlah Peserta KB Baru yang Dilayani Faskes KB Pemerintah	-	Peserta KB Baru yang Dilayani Faskes KB Pemerintah	Pasangan usia subur yang baru pertama kali mendapatkan pelayanan KB di fasilitas kesehatan pemerintah	PerBanKependudukan dan KB Nasional Nomor 11.Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja	Tahunan	Integer	-	-	Berapa KB Baru yang di layani di Faskes KB Pemerintah di Kabupaten Musi Banyuasin?	1

						Badan Kependudukan dan KB						
236	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Jumlah Posyandu Balita dan Posyandu Lansia per Kecamatan	-	Posyandu Balita dan Posyandu Lansia	Pelayanan kepada balita dan anak dengan melakukan penimbangan agar bisa di pntau pertumbuhan dan perkembangan balita dan anak	PerBanKependudukan dan KB Nasional Nomor 11.Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan KB	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah Posyandu Balita dan Lansia yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
237	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Jumlah Akseptor Baru Menurut Jenis Kontrasepsi dan Bulan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Akseptor Baru	pengertian akseptor baru adalah pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi dan/atau pasangan usia subur yang menggunakan kembali salah satu cara/alat kontrasepsi setelah mereka berakhir masa kehamilannya (baik kehamilan yang berakhir dengan keguguran, lahir mati ataupun lahir hidup)	Peraturan BKKBN No. 9 Tahun 2019	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Akseptor Baru Menurut Jenis Kontrasepsi dan Bulan di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
238	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Jumlah Akseptor Baru Menurut Jenis Kontrasepsi dan Kecamatan di Kabupaten Musi	-	Akseptor Baru	pengertian akseptor baru adalah pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi dan/atau pasangan usia subur	Peraturan BKKBN No. 9 Tahun 2020	Tahunan	Integer	-	-	Beraoa Jumlah Akseptor Baru Menurut Jenis Kontrasepsi dan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1

		Banyuasin			yang menggunakan kembali salah satu cara/alat kontrasepsi setelah mereka berakhir masa kehamilannya (baik kehamilan yang berakhir dengan keguguran, lahir mati ataupun lahir hidup)							
239	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate	-	Total Fertility Rate	Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seseorang perempuan usia 15-49 tahun	BPJS (2013), Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 20	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Total Fertility Rate ?	1
240	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pasangan Usia Subur (PSU)	-	Pasangan Usia Subur (PSU)	Pasangan suami istri yang istrinya berusia 15-49 tahun dan masih haid atau pasangan suami istri yang istrinya kurang dari 15 tahun dan sudah haid	Perka BKKBN No.9 tahun 2019 tentang pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi pasangan usia subur dalam pelayanan keluarga berencana	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Pasangan Usia Subur (PSU)?	1
241	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Peserta KB Aktif	-	Peserta KB Aktif	Akseptor yang pada saat ini sedang memakai kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan dan masih terlindungi oleh efek kontarepsinya.	Perka BKKBN No.24 tahun 2017 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Keguguran	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Peserta KB Aktif?	1

242	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Jumlah Pasangan Usia Subur (PA)	-	Pasangan Usia Subur (PA)	Jumlah pasangan usia subur yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan atau keguguran	Depkes RI (2016). Profil Kesehatan Indonesia tahun 2016	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Pasangan Usia Subur (PA)?	1
243	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase Unmet Need	-	Persentase Unmet Need	Persentase pasangan usia subur yang menikah atau hidup bersama (seksual aktif) yang tidak ingin punya anak lagi atau yang ingin menjarangkan kehamilan tetapi tidak menggunakan alat atau cara kontrasepsi.	Kemendes RI (2013), Pusat Data dan Informasi Kesehatan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Persentase Unmet Need?	1
244	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Baru MKJP di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Persentase Peserta KB Baru MKJP	Persentase Peserta KB Baru yang menggunakan salah satu metode kontrasepsi jangka panjang seperti implant, MOW, dan MOP	Kementerian Kesehatan (2021), Pedoman Pelayanan Kontrasepsi dan Keluarga Berencana.	Tahunan	Integer	-	-	Persentase Peserta KB Baru MKJP di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
245	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata	Data Hotel di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Hotel	Data usaha penyedia penginapan meliputi nama hotel, alamat, kelas hotel, jumlah kamar, jumlah tempat tidur, jumlah tenaga kerja laki-laki, jumlah tenaga kerja perempuan dan total jumlah tenaga kerja	Undang-Undang Nomor 10.Tahun 2009 Tentang Kepariwisata	Tahunan	Integer	-	-	Sebutkan nama hotel, alamat, kelas hotel, jumlah kamar, jumlah tempat tidur, jumlah tenaga kerja laki-laki, jumlah tenaga kerja perempuan dan total jumlah tenaga kerja?	1

246	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata	Banyaknya Atlit Menurut Cabang Olahraga	-	Atlet	Atlet atau Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah atlet per cabang Olahraga?	1
247	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata	Banyaknya Perolehan Medali Bidang Olah Raga yang diraih oleh Atlit	-	Prestasi	Prestasi minimal tingkat provinsi yang diraih oleh atlet atau peolahraga yang dibina maupun secara mandiri, termasuk namun tidak terbatas pada atlet olahraga pelajar, olahraga prestasi dan atau olahraga rekreasi/masyarakat.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah medali (emas, perak dan perunggu) yang diraih atlet per cabang olahraga?	1
248	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata	Jumlah Pelatih Olahraga	-	Pelatih	Pelatih berlisensi berdasarkan peraturan yang berlaku pada cabang olahraga yang bersangkutan	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah pelatih per cabang olahraga?	1
249	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata	Banyaknya Wasit Olah Raga	-	Wasit	Wasit berlisensi berdasarkan peraturan yang berlaku pada cabang olahraga yang bersangkutan	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah wasit per cabang olahraga?	1
250	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata	Jumlah National Paralympic Committee Indonesia	-	Atlet	Jumlah atlet NPC berdasarkan cabang olahraga dan jenis kelamin	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah atlet NPC berdasarkan jenis kelamin dan cabang	1

											olahraga?	
251	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata	Restoran dan Rumah Makan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Rumah Makan/Restoran	Rumah Makan / Restoran merupakan suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial	Undang-Undang Nomor 10.Tahun 2009 Tentang Kepariwisata	Tahunan	Integer	-	-	Berapa restoran dan Rumah Makan di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
252	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata	Data Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Organisasi Kepemudaan	Organisasi kepemudaan yang masih aktif dan terdaftar yang beroperasi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin	Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	Tahunan	Integer	-	-	Ada berapa organisasi kepemudaan yang masih aktif dan beroperasi di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
253	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata	Data Tempat Rekreasi di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Tempat Rekreasi	Data nama-nama tempat rekreasi beserta alamatnya	Undang-Undang Nomor 10.Tahun 2009 Tentang Kepariwisata	Tahunan	Integer	-	-	Sebutkan nama-nama tempat rekreasi beserta alamatnya?	1
254	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata	Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Akomodasi	Akomodasi merupakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha ini meliputi jumlah Hotel, Motel, Guest House, Wisma, Penginapan, Vila, Rumah Wisata, Apartemen dan lain-lain.	Undang-Undang Nomor 10.Tahun 2009 Tentang Kepariwisata	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah Akomodasi Hotel Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
255	Dinas Pemuda Olahraga Dan	Jumlah Rumah	-	Rumah Makan/Restoran	Rumah Makan / Restoran merupakan	Undang-Undang Nomor	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah rumah makan	1

	Pariwisata	Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin			suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial	10.Tahun 2009 Tentang Kepariwisata					menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin?	
256	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata	Jumlah Objek Wisata Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Objek Wisata	Objek daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan	Undang-Undang Nomor 10.Tahun 2009 Tentang Kepariwisata	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Objek Wisata Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
257	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata	Akomodasi Hotel Menurut Jumlah Kamar dan Tempat Tidur di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Akomodasi	Akomodasi merupakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Data ini meliputi jumlah kamar dan jumlah kasur di tiap hotel	Undang-Undang Nomor 10.Tahun 2009 Tentang Kepariwisata	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah kamar dan jumlah tempat tidur yang ada di hotel ini?	1
258	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata	Jumlah Fasilitas Pariwisata	-	Fasilitas Pariwisata	Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata, seperti akomodasi	Undang-Undang Nomor 10.Tahun 2009 Tentang Kepariwisata	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah Fasilitas Pariwisata berdasarkan jenisnya?	1

					(hotel/ penginapan, restoran/ tempat makan), fasilitas pendukung (musholla, tempat parkir, toilet) dan fasilitas penunjang (papan petunjuk arah).							
259	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata	Data Desa Wisata	-	Desa Wisata	Jumlah desa wisata yang lokasinya telah ditetapkan dengan Surat Keputusan	Undang-Undang Nomor 10.Tahun 2009 Tentang Kepariwisata	Tahunan	Integer	-	-	Apa nama dan dimana saja Desa Wisata yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
260	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata	Banyaknya Sarana Olah Raga per Kecamatan	-	Sarana Olahraga	Sarana olahraga berupa lapangan olahraga baik indoor maupun outdoor, gedung olahraga baik tertutup maupun terbuka,	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah lapangan olahraga yang ada berdasarkan jenis lapangan per kecamatan?	1
261	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Jumlah OPD Menurut Katagori Nilai Pengawasan Arsip	-	Pengawasan Kearsipan	Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan	UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah OPD menurut Kategori Nilai Pengawasan Arsip?	1
262	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Jumlah Anggota Perpustakaan Menurut Bulan	-	Anggota Perpustakaan	Pengunjung Perpustakaan yang telah mendaftar jadi anggota perpustakaan baik secara online maupun offline yang memilih hak dan kewajiban sebagai	UU Nomor 43 Tahun 2017 tentang perpustakaan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Anggota Perpustakaan?	1

					anggota perpustakaan							
263	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Koleksi Buku Perpustakaan Elektronik	-	Buku Elektronik	Koleksi buku elektronik buku yang berbentuk elektronik atau digital yang berisi informasi atau panudan,tutorial,novel,l ayaknya buku pada umumnya e Book (Elektronik book) ini hanya bisa dibuka dan dibaca dengan menggunakan perangkat gadget, tablet dan handphone pintar	UU Nomor 43 Tahun 2017 tentang perpustakaan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Koleksi Buku Elektronik?	1
264	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Koleksi Buku Perpustakaan Konvensional	-	Buku Konvensional	Buku Konvensional adalah buku yang dicetak pada kertas dan dapat dipegang secara fisik	UU Nomor 43 Tahun 2017 tentang perpustakaan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Koleksi Buku Konvensional?	1
265	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Jumlah Koleksi Perpustakaan Umum	-	Jumlah Koleksi Perpustakaan Umum	Jumlah koleksi perpustakaan umum adalah jumlah bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan umum untuk dipinjam atau dibaca oleh masyarakat. Jumlah koleksi perpustakaan umum dapat bervariasi tergantung pada jenis, ukuran, dan kebutuhan perpustakaan umum tersebut.	Peraturan PNRI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan di Lingkungan PNRI	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Koleksi Perpustakaan Umum ?	1
266	Dinas Perpustakaan Dan	Jumlah Perpustakaan Menurut	-	Perpustakaan Menurut Sekolah	Perpustakaan Sekolah adalah Setiap sekolah/madrasah	UU Nomor 43 Tahun 2017 tentang	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Perpustakaan menurut sekolah	1

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku untuk tujuan komersial tanpa ijin tertulis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin

	Kearsipan	Sekolah dan Kecamatan		Dan Kecamatan	menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan sedangkan perpustakaan Kecamatan adalah perpustakaan yang ada di wilayah pemerintahan tingkat kecamatan yang memenuhi standar perpustakaan	perpustakaan					dan Kecamatan dalam Kab.Muba?	
267	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum per Bulan	-	Pengunjung Perpustakaan	Pengunjung Perpustakaan adalah Pengguna Perpustakaan yaitu perorangan, kelompok, orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan	UU Nomor 43 Tahun 2017 tentang perpustakaan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Pengunjung Perpustakaan?	1
268	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Jumlah Koleksi Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	Data Jumlah Koleksi Arsip	Himpunan arsip dan/atau menuaskrip yang dikumpulkan dari berbagai sumber sehingga merupakan suatu khsanah informasi mengenai seseorang/keluarga /institusi/tema/topik/ peristiwa tertentu.pada umumnya merupakan hasil pengumpulan yang dilakukan karena minat pada sesuatu tema orang, peristiwa atau jenis dokumen	UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Koleksi Arsip?	1

269	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Perpustakaan yang Terakreditasi	-	Perpustakaan Terakreditasi	Perpustakaan Terakreditasi adalah rangkaian kegiatan proses pengakuan formal oleh LAP-PNRI yang menyatakan bahwa suatu lembaga perpustakaan telah memenuhi persyaratan minimal untuk melakukan kegiatan pengelolaan perpustakaan	UU Nomor 43 Tahun 2017 tentang perpustakaan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Perpustakaan Terakreditasi?	1
270	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Jumlah Arsip Digital	-	Arsip Digital	Arsip digital adalah arsip yang dapat disimpan dan ditransmisikan dalam bentuk terputus-putus atau dalam bentuk kode-kode biner yang dapat dibuka, dibuat atau dihapus dengan alat komputasi yang dapat membaca atau mengolah data dalam bentuk biner, sehingga arsip dapat digunakan atau di manfaatkan		Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Arsip Digital?	1
271	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Titik Layanan Perpustakaan Keliling	-	Layanan Perpustakaan	Layanan Perpustakaan adalah pemberian informasi dan fasilitas perpustakaan kepada pengguna dengan cepat, tepat waktu dan benar baik yang datang langsung ke perpustakaan maupun melalui perpustakaan keliling	UU Nomor 43 Tahun 2017 tentang perpustakaan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Titik Layanan Perpustakaan?	1

272	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Jumlah Arsip yang di pelihara	-	Arsip yang di pelihara	Arsip yang dipelihara arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang ahrus dijaga keutuhan, keamanan dan keselamatannya	UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Arsip yang dipelihara?	1
273	Dinas Perikanan	Jumlah Produksi (Ton) Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Produksi	Data Jumlah Produksi (Ton) perikanan tangkap merupakan hasil penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap dari sumber perikanan alami, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Volume Produksi dihitung dalam bentuk berat basa ikan hasil tangkap	PermenKP No. 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Jumlah Produksi (Ton) Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan?	1
274	Dinas Perikanan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Rumah Tangga	Rumah tangga yang melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual	PermenKP No. 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan ?	1
275	Dinas Perikanan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan	-	Rumah Tangga	Data ini merupakan Data Rumah tangga yang melakukan kegiatan usaha	PermenKP No. 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan	Tahunan	Integer	-	-	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya (Unit)	1

		Budidaya (Unit) per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin			budidaya perikanan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual.	dan Perikanan					per Kecamatan ?	
276	Dinas Perikanan	Luas Area (Ha) Rumah Tangga Perikanan Budidaya Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Luas	Data Luas Area (Ha) Rumah Tangga Perikanan Budidaya Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Musi Banyuasin	PermenKP No. 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Luas Area (Ha) Rumah Tangga Perikanan Budidaya Berdasarkan Kecamatan ?	1
277	Dinas Perikanan	Jumlah Produksi Ikan Budidaya (Ton) Perjenis Ikan Dengan Metode Budidaya Di Tambak Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Produksi	Jumlah Produksi Ikan Budidaya (Ton) Perjenis Ikan Dengan Metode Budidaya Di Tambak Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Musi Banyuasin	PermenKP No. 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Jumlah Produksi Ikan Budidaya (Ton) Perjenis Ikan Dengan Metode Budidaya Di Tambak Berdasarkan Kecamatan?	1
278	Dinas Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Produksi	Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Musi Banyuasin (ton), 2022	PermenKP No. 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Subsektor (ton)?	1

		(ton)										
279	Dinas Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Musi Banyuasin (ton)	-	Produksi	Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Musi Banyuasin (ton), 2022	PermenKP No. 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Musi Banyuasin (ton)?	1
280	Dinas Perikanan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2022	PermenKP No. 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor?	1
281	Dinas Perikanan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Musi Banyuasin	PermenKP No. 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya?	1
282	Dinas Perikanan	Jumlah Produksi Ikan Budidaya (Ton) Perjenis	-	Produksi	Jumlah Produksi Ikan Budidaya (Ton) Perjenis Ikan Dengan Metode Budidaya Di	PermenKP No. 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Jumlah Produksi Ikan Budidaya (Ton) Perjenis Ikan	1

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku untuk tujuan komersial tanpa ijin tertulis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin

		Ikan Dengan Metode Budidaya Di Keramba Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Musi Banyuasin			Keramba Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Musi Banyuasin	dan Perikanan					Dengan Metode Budidaya Di Keramba Berdasarkan Kecamatan?	
283	Dinas Perikanan	Jumlah Produksi Ikan Budidaya (Ton) Perjenis Ikan Dengan Metode Budidaya Di Kolam Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Produksi	Jumlah Produksi Ikan Budidaya Perjenis Ikan Dengan Metode Budidaya Di Kolam Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Musi Banyuasin	PermenKP No. 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Jumlah Produksi Ikan Budidaya (Ton) Perjenis Ikan Dengan Metode Budidaya Di Kolam Berdasarkan Kecamatan?	1
284	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan	Jumlah Luas Tanaman Puso Karena Serangan OPT dan DPI Tanaman Pangan (Padi) di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Tanaman Puso Karena Serangan OPT dan DPI Tanaman Pangan (Padi)	Luas tanaman yang mengalami puso/kerusakan yang diakibatkan oleh serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan/atau sebab lainnya (gempa bumi, dll), sedemikian rupa sehingga hasilnya kurang dari atau sama dengan 11% dari keadaan normal tanpa melihat kerusakan terjadi sebelum atau sesudah masa	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Jumlah Luas Tanaman Puso Karena Serangan OPT dan DPI Tanaman Pangan (Padi) di Kabupaten Musi Banyuasin?	1

					generatif							
285	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan	Jumlah Produksi Tanaman Sayuran Cabai Besar (Ton) dan Cabai Rawit (Ton) di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Produksi Tanaman Sayuran Cabai Besar (Ton) dan Cabai Rawit (Ton)	Luas tanaman yang mengalami puso/kerusakan yang diakibatkan oleh serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan/atau sebab lainnya (gempa bumi, dll), sedemikian rupa sehingga hasilnya kurang dari atau sama dengan 11% dari keadaan normal tanpa melihat kerusakan terjadi sebelum atau sesudah masa generatif	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Jumlah Produksi Tanaman Sayuran Cabai Besar (Ton) dan Cabai Rawit (Ton) di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
286	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan	Jumlah Produksi Telur dan Daging di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Produksi Telur dan Daging	- Jumlah produksi telur unggas (ayam buras, ayam ras petelur, burung puyuh, dan itik) selama setahun, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan ke orang lain - Karkas hasil pemotongan ternak di wilayah tersebut ditambah dengan bagian yang dapat dimakan (edible portion) selama waktu tertentu	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Jumlah Produksi Telur dan Daging di Kabupaten Musi Banyuasin?	1

287	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan	Luas Lahan Pangan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B)	Bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional	Tahunan	Decimal	-	-	erapa Luas Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
288	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan	Produksi Tanaman Pangan Padi dan Jagung di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Tanaman Pangan Padi dan Jagung	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan.	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Produksi Tanaman Pangan Padi dan Jagung di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
289	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan	Jumlah Produksi Tanaman Buah-Buahan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Produksi Tanaman Buah-Buahan	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan.	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Jumlah Produksi Tanaman Buah-Buahan di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
290	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan	Jumlah Populasi Ternak Kecil, Ternak Besar dan Unggas di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Populasi Ternak Kecil, Ternak Besar dan Unggas	Kumpulan atau jumlah ternak yang hidup pada wilayah dan waktu tertentu, kecuali ayam ras pedaging	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Populasi Ternak Kecil, Ternak Besar dan Unggas di Kabupaten Musi Banyuasin?	1

291	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan	Luas Panen Tanaman Pangan Padi dan Jagung di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Panen Tanaman Pangan Padi dan Jagung	Luas areal yang dipanen dalam satuan Hektar (Ha).	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Luas Panen Tanaman Pangan Padi dan Jagung di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
292	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan	Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (kuintal)	-	Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan.	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (Kwintal)?	1
293	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan	Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah–Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (ha)	-	Panen Tanaman Sayuran dan Buah–Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman	Luas areal yang dipanen dalam satuan Hektar (Ha).	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah–Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
294	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan	Produksi Tanaman Sayuran dan Buah–Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Tanaman Sayuran dan Buah–Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan.	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Produksi Tanaman Sayuran dan Buah–Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin	1

		(kuintal)									(kuintal)?	
295	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan	Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (m2)	-	Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman	Luas areal yang dipanen dalam satuan Hektar (Ha).	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
296	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan	Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (m2)	-	Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman	Luas areal yang dipanen dalam satuan Hektar (Ha).	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
297	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan	Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (kg)	-	Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan.	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
298	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan	Luas Panen Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi	-	Panen Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman	Luas areal yang dipanen dalam satuan Hektar (Ha).	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Luas Panen Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi	1

		Banyuasin (m2)									Banyuasin?	
299	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan	Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (ha)	-	Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman	Luas areal yang dipanen dalam satuan Hektar (Ha).	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
300	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan	Luas Panen Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (m2)	-	Panen Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman	Luas areal yang dipanen dalam satuan Hektar (Ha).	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Luas Panen Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
301	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan	Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di KAbupaten Musi Banyuasin (kuintal)	-	Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan.	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (kuintal)?	1
302	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan	Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten	-	Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Musi	1

		Musi Banyuasin (ton)			bulan/triwulan/semester laporan.	Nasional					Banyuasin?	
303	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan	Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak	Kumpulan atau jumlah ternak yang hidup pada wilayah dan waktu tertentu, kecuali ayam ras pedaging	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
304	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan	Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas	Kumpulan atau jumlah ternak yang hidup pada wilayah dan waktu tertentu, kecuali ayam ras pedaging	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
305	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan	Luas Panen Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin (ha)	-	Luas Panen Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kecamatan	Luas areal yang dipanen dalam satuan Hektar (Ha).	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Luas Panen Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
306	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan	Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi	-	Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kecamatan	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi	1

		Banyuasin (ton)			bulan/triwulan/semester laporan.	Nasional					Banyuasin?	
307	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan	Luas Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin (ha)	-	Luas Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar	Luas areal yang dipanen dalam satuan Hektar (Ha).	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Luas Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
308	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan	Produksi Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin (ton)	-	Produksi Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan.	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Tabel Produksi Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
309	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan	Tabel Produksi Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan.	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (tangkai)?	1

		(tangkai)										
310	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural Dan Peternakan	Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (tangkai)	-	Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman	Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan.	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (tangkai)?	1
311	Dinas Perkebunan	Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Sawit Menurut Kecamatan	-	Tanaman Perkebunan Sawit	Data keseluruhan Luas dari Perkebunan Kelapa Sawit (ha) dan Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Sawit (Ton) di pada setiap Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK.1 40/M/2/2 020 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementrian Pertanian	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Jumlah Luas Areal dan Barapa Ton Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Sawit di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
312	Dinas Perkebunan	Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Kelapa Menurut Kecamatan	-	Tanaman Perkebunan Kelapa	Data keseluruhan Luas dari Perkebunan Kelapa (ha) dan Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Kelapa (Ton) di pada setiap Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK.1 40/M/2/2 020 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementrian Pertanian	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Jumlah Luas Areal dan Barapa Ton Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Kelapa di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
313	Dinas Perkebunan	Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan	-	Tanaman Perkebunan Koko	Data keseluruhan Luas dari Perkebunan Koko (ha) dan Jumlah Produksi Tanaman	Keputusan Menteri Pertanian Nomor	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Jumlah Luas Areal dan Barapa Ton Produksi	1

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku untuk tujuan komersial tanpa ijin tertulis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin

		Kakao Menurut Kecamatan			Perkebunan Koko (Ton) di pada setiap Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	104/KPTS/HK.1 40/M/2/2 020 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementrian Pertanian					Tanaman Perkebunan Koko di Kabupaten Musi Banyuasin?	
314	Dinas Perkebunan	Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Karet Menurut Kecamatan	-	Tanaman Perkebunan Karet	Data Keseluruhan Luas Dari Perkebunan Karet (ha) dan Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Karet (Ton) pada setiap Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK.1 40/M/2/2 020 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementrian Pertanian	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Jumlah Luas Areal dan Barapa Ton Produksi Tanaman Perkebunan Karet di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
315	Dinas Perkebunan	Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Kopi Menurut Kecamatan	-	Tanaman Perkebunan Kopi	Data Keseluruhan Luas Dari Perkebunan Kopi (ha) dan Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Kopi (Ton) pada setiap Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK.1 40/M/2/2 020 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementrian Pertanian	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Jumlah Luas Areal dan Barapa Ton Produksi Tanaman Perkebunan Kopi di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
316	Dinas Perkebunan	Luas Areal Tanaman Perkebunan dan Produksi Perkebunan Rakyat Menurut	-	Perkebunan Rakyat	Data Keseluruhan Luas dari Perkebunan Milik Rakyat/Masyarakat (ha) dan Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Milik Rakyat/Masyarakat	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK.1 40/M/2/2 020 Tahun 2020	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Jumlah Luas Areal dan Barapa Ton Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat di	1

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku untuk tujuan komersial tanpa ijin tertulis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin

		Komoditas			(Ton) pada seetiap Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	tentang Komoditas Binaan Kementrian Pertanian					Kabupaten Musi Banyuasin?	
317	Dinas Perkebunan	Jumlah Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) Menurut Kecamatan	-	Pabrik Pengelolaan Kalapa Sawit (PKS)	Data Keseluruhan Luas Dan Perkebunan Sawit (ha) dan Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Sawit (Ton) pada setiap Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK.1 40/M/2/2 020 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementrian Pertanian	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Jumlah Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
318	Dinas Perkebunan	Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Gambir Menurut Kecamatan	-	Tanaman Perkebunan Gambir	Data Keseluruhan Luas dari Peremajaan Perkebunan (ha) dan jumah Produksi Tanaman Peremajaan Perkebunan Gambir (Ton) Pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK.1 40/M/2/2 020 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementrian Pertanian	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Jumlah Luas Areal dan Barapa Ton Produksi Tanaman Perkebunan Gambir di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
319	Dinas Perkebunan	Jumlah Lahan Peremajaan Perkebunan	-	Peremajaan Perkebunan	Jumlah Lahan Peremajaan Perkebunan	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK.1 40/M/2/2 020 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Jumlah Lahan Peremajaan Perkebunan di Kabupaten Musi Banyuasin?	1

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku untuk tujuan komersial tanpa ijin tertulis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin

						Kementrian Pertanian							
320	Dinas Perkebunan	Jumlah Kelompok Unit Usahan Pengolahan & Pemasaran Bokar (UPPB) Menurut Kecamatan	-	Kelompok Unit Usaha Pengelolaan dan Pemasaran Bokar (UPPB)	Data Dari Kelompok Unit Usaha Pemasara Bokar (UPPB) pada setiap Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK.1 40/M/2/2 020 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementrian Pertanian	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Jumlah Kelompok Unit Usaha Pengelolaan dan Pemasaran Bokar (UPPB) di Kabupaten Musi Banyuasin?	1	
321	Dinas Perkebunan	Luas Areal Tanaman Perkebunan dan Produksi Perkebunan Rakyat, Inti, dan Plasma Menurut Komoditas	-	Perkebunan Rakyat, Inti, dan Plasma	Data Keseluruhan Luas, dari Tanaman Perkebunan dan Produksi Perkebunan Rakyat, Inti, dan Plasma (ha) dan Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan dan Produksi Perkebunan Rakyat, Inti, Plasma (Ton) pada Kabupaten Musi Banyuasin.	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK.1 40/M/2/2 020 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementrian Pertanian	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Jumlah Luas Areal dan Berapa Ton Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat, Inti, dan Plasma di Kabupaten Musi Banyuasin?	1	
322	Dinas Perkebunan	Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (ha)	-	Tanaman Perkebunan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (ha)	Data Keseluruhan dari Setiap Tanaman Perkebunan di Kabupaten Musi Banyuasin (ha)	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK.1 40/M/2/2 020 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementrian	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Jumlah Luas Areal Tanaman Perkebunan Pada Setiap Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (ha) 2023.?	1	

						Pertanian						
323	Dinas Perkebunan	Luas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin (hektar)	-	Luas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit	Data Keseluruhan Luas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dan Prusahaan di Kabupaten Musi Banyuasin	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK.1 40/M/2/2 020 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Jumlah Luas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Secara Keseluruhan?	1
324	Dinas Perkebunan	Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Banyuasin (ton)	-	Produksi Perkebunan	Data Keseluruhan Peroduksi dari Setiap Tanaman Perkebunan di Kabupaten Musi Banyuasin	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK.1 40/M/2/2 020 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Ton Jumlah Produksi Perkebunan Pada Setiap Tanaman Perkebunan di Kabupaten Musi Banyuasin (Ton) 2023?	1
325	Dinas Perkebunan	Luas Tanaman Perkebunan Tanaman Karet Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin (ha)	-	Perkebunan Tanaman Karet	Data Keseluruhan Luas Tanaman Perkebunan Karet Rakyat dan Perusahaan di Kabupaten Musi Banyuasin	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK.1 40/M/2/2 020 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Jumlah Luas Tanaman Perkebunan Tanaman Karet Secara Keseluruhan di Kabupaten Musi Banyuasin (ha). 2023?	1

326	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Jumlah Industri Besar	-	Industri Besar yang ada di Kabupten Musi Banyuasin	Mendapatkan Jumlah Industri Besar pada periode tertentu disuatu wilayah sehingga diperoleh gambaran jumlah Jumlah Industri Besar di daerah tersebut	1.Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG Penyelenggaraa n bidang industri	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Industri Besar di kabupaten Musi Bnayhuasin ?	1
327	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Jumlah Investasi Industri per Kecamatan	-	Investasi Industri Perkecamatan	Untuk Jumlah Investasi industri per kecamatan sehingga diperoleh gambaran potensi Investasi industri wilayah tersebut	Permenprin no 64 tahun 2016 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Investasi Industri di kecamatan muba ?	1
328	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Jumlah Industri Kecil	-	Data Jumlah Industri Kecil	Mendapatkan Jumlah Industri Kecil pada periode tertentu disuatu wilayah sehingga diperoleh gambaran jumlah Jumlah Industri Kecil di daerah tersebut	1.Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG Penyelenggaraa n bidang industri	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Industri kecil ?	1
329	Dinas Perdagangan	Jumlah Nilai Produksi	-	Nilai produksi Industri	Mendapatkan Jumlah nilai produksi pada	1. Permenprin no 64 tahun	Tahunan	Integer	-	-	berapa rata-rata jumlah nilai	1

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku untuk tujuan komersial tanpa ijin tertulis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin

	Dan Perindustrian	Industri per Kecamatan (Jutaan Rupiah)		perkecamatan	periode tertentu disuatu wilayah sehingga diperoleh gambaran produksi perusahaan industri di daerah tersebut	2016 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri Undang-Undang 2.No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG Penyelenggaraan bidang industri					produksi industri di kecamatan muba ?	
330	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Harga Sayur Mayur Per Bulan	-	Data Harga sayur mayur	Mendapatkan Jumlah Industri Besar pada periode tertentu disuatu wilayah sehingga diperoleh gambaran jumlah Jumlah Industri Besar di daerah tersebut	1.PERMENDAG no 21 tahun2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan sarana perdagangan 2.PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DAN PENYIMPANAN	Tahunan	Integer	-	-	berapa harga sayur mayur perbulanya ?	1

						BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						
331	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Harga Bahan Pokok per Bulan	-	Data Harga Bahan Pokok	Tujuan : untuk mengetahui perkembangan harga rata-rata bahan pokok. manfaat : data bahan kebutuhan pokok merupakan data pendukung untuk menghitung laju inflasi.	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DAN PENYIMPANAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tahunan	Integer	-	-	Berapa rata-rata harga bahan pokok perbulan ?	1
332	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Jumlah Pedagang Menurut Jenis dan Kecamatan	-	Data Jumlah dan jenis Pedagang	Untuk mengetahui jumlah Pedagang	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN	Tahunan	Integer	-	-	Ada berapa Jumlah dan Jenis Pedagang di Kecamatan Muba ?	1
333	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Jumlah Pasar Tradisional di Kab Musi Banyuasin	-	Data Jumlah Pasar Tradisional	Mendapatkan Jumlah Pasar Tradisional di Kab Musi Banyuasin	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN	Tahunan	Integer	-	-	ada berapa jumlah Pasar Tradisional di Muba ?	1

334	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Jumlah Kelompok Pengrajin Kain Gambo	-	Data Kelompok Pengrajin Kain Gambo	Untuk mengetahui jumlah Kelompok Pengrajin Kain Gambo	1.UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN 2.Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Kelompok Pengrajin Gambo di Muba ?	1
335	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Data jumlah pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin 2022	Untuk mengetahui jumlah Pedagang	1.UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN 2.Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Pedagang menurut kecamatan di Muba ?	1
336	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Jumlah Pasar Menurut Jenis Pasar di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Data Jumlah Pasar Menurut Jenis pasar di Kabupaten Musi Banyuasin	Untuk Mendapatkan Data Jumlah Pasar Menurut jenis Pasar di Kabupaten Musi Banyuasin	1.UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN 2.Undang-Undang No. 3 Tahun 2014	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Pasar Menurut Jenis pasar di kabupaten Muba ?	1

						tentang Perindustrian						
337	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Musi Banyuasi	Mendapatkan Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Musi Banyuasin	1.UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN 2.Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah sarana perdagangan menurut jenisnya di kabupaten Muba ?	1
338	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Sarana perdagangan	Sarana perdagangan adalah fasilitas atau tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan dalam negeri, seperti pasar, toko, mall, supermarket, dan sebagainya	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, yang mengatur tentang kriteria, persyaratan, mekanisme, dan tata cara pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
339	Dinas Perdagangan	Jumlah Pasar Menurut	-	Data Pasar Menurut Jenis di	Untuk Mengetahui Jumlah Pasar Menurut	1.UNDANG-UNDANG	Tahunan	Integer	-	-	berapa jumlah pasar menurut	1

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku untuk tujuan komersial tanpa ijin tertulis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin

	Dan Perindustrian	Jenisnya di Kecamatan		Kecamatan	Jenis di Kecamatan	REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN					jenis di kecamatan muba ?	
340	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Jumlah Sentra Industri	-	Data Sentra Industri	Mendapatkan Jumlah sentra Industri	1.Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2.Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Tahunan	Integer	-	-	berapa jumlah sentra industri ?	1
341	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Jumlah Unit Usaha Industri per Kecamatan	-	Unit Usaha Industri per Kecamatan	Mendapatkan Jumlah sentra Industri	1.Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG Penyelenggaraa n bidang industri	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlab Unit usaha Industri perkecamatan ?	1

						n bidang industri						
342	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Jumlah industri per Kecamatan	-	Industri per kecamatan	Mendapatkan Jumlah jenis industri pada periode tertentu disuatu wilayah sehingga diperoleh gambaran potensi industri wilayah tersebut	1.Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG Penyelenggaraan n bidang industri	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Industri perkecamatan kabupaten Musi Banyuasin ?	1
343	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Jumlah Perusahaan dan jumlah tenaga kerja perkecamatan di kabupaten Musi Banyuasin	-	Prusahaan	Data ini merupakan Jumlah Perusahaan dan jumlah tenaga kerja perkecamatan di kabupaten Musi Banyuasin, yang dikumpulkan pertahun berjumlah 60.198 Orang	UU No. 7 Tahun 1981 Tentang wajib lapor ketenaga kerjaan di perusahaan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Perusahaan dan jumlah tenaga kerja perkecamatan di kabupaten Musi Banyuasin?	1
344	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Jumlah Perusahaan sesuai klasifikasi Klui berdasarkan wajib lapor ketenagakerjaan di kabupaten musu banyuasin	-	Prusahaan	Data ini merupakan Jumlah Perusahaan sesuai klasifikasi Klui berdasarkan wajib lapor ketenagakerjaan di kabupaten musu banyuasin, yang dikumpulkan pertahun dengan jumlah 9 (sembilan) Klui antara lain Pertanian, peternakan. Kehutanan, pemburuan, dan perikanan 82	UU No. 7 Tahun 1981 Tentang wajib lapor ketenaga kerjaan di perusahaan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Perusahaan sesuai klasifikasi Klui berdasarkan wajib lapor ketenagakerjaan di kabupaten musu banyuasin?	1

				<p>Perusahaan;          Pertambangan dan          penggalian 212          Perusahaan; Industri          pengolahan 35          Perusahaan; Listrik,          gas dan Air 10          Perusahaan; Bangunan          8 Perusahaan;          Perdagangan Besar,          eceran, rumah makan          dan Hotel 34          Perusahaan; angkutan,          penggudangan, dan          komunikasi 5          Perusahaan;          Keuangan, Asuransi,          Usaha Persewaan          bangunan, tanah dan          jasa Perusahaan 47          Perusahaan; jasa          Kemasyarakatan sosial          dan perorangan 0          Perusahaan.</p> <p>Data ini merupakan          Jumlah Perusahaan          sesuai klasifikasi Klui          berdasarkan wajib          lapor ketenagakerjaan          di kabupaten musi          banyuasin, yang          dikumpulkan pertahun          dengan jumlah 9          (sembilan) Klui antara          lain Pertanian,          peternakan.          Kehutanan,          pemburuan, dan          perikanan 82          Perusahaan;</p>							
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

					Pertambangan dan penggalan 212 Perusahaan; Industri pengolahan 35 Perusahaan; Listrik, gas dan Air 10 Perusahaan; Bangunan 8 Perusahaan; Perdagangan Besar, eceran, rumah makan dan Hotel 34 Perusahaan; angkutan, penggudangan, dan komunikasi 5 Perusahaan; Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan bangunan, tanah dan jasa Perusahaan 47 Perusahaan; jasa Kemasyarakatan sosial dan perorangan 0 Perusahaan.							
345	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Jumlah pencari kerja terdaftar berdasarkan jenis kelamin per bulan di kabupaten musi banyuasin	-	Pencari Kerja	Data ini merupakan Jumlah pencari kerja terdaftar berdasarkan jenis kelamin per bulan di kabupaten musi banyuasin dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dengan pencari kerja laki-laki 704 orang dan pencari kerja perempuan 224 orang	UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah pencari kerja terdaftar berdasarkan jenis kelamin per bulan di kabupaten musi banyuasin	1
346	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Jumlah data serikat pekerja yang terdaftar pada dinas tenaga kerja	-	Serikat Pekerja	Data ini merupakan Jumlah data serikat pekerja yang terdaftar pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi	UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja /Serikat	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah data serikat pekerja yang terdaftar pada dinas tenaga	1

		dan transmigrasi			yang dikumpulkan pertahun berjumlah 10 perusahaan	Buruh					kerja dan transmigrasi	
347	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Jumlah tenaga kerja asing	-	Tenaga Kerja	Data ini merupakan Jumlah tenaga kerja asing di kabupaten Musi Banyuasin, yang dikumpulkan pertahun berjumlah 32 Orang	UU No. 7 Tahun 1981 Tentang wajib lapor ketenaga kerjaan di perusahaan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah tenaga kerja asing di kabupaten Musi Banyuasin?	1
348	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Jumlah Pencari kerja terdaftar menurut tingkat Pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Pencari Kerja	Data ini merupakan Jumlah Pencari kerja berdasarkan tingkat Pendidikan menurut jenis kelamin 2022, yang dikumpulkan pertahun berjumlah 928 Orang	UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Pencari kerja terdaftar menurut tingkat Pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
349	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Jumlah keluarga Transmigrasi di kabupaten musu banyuasin	-	Transmigran	Data ini merupakan Jumlah keluarga Transmigrasi di kabupaten musu banyuasin n, yang dikumpulkan pertahun berjumlah 185 KK	UU No. 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah keluarga Transmigrasi di kabupaten musu banyuasin?	1
350	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Transmigrasi Umum menurut Daerah Asal	-	Transmigran	Data ini merupakan Jumlah Transmigrasi Umum menurut Daerah Asal di kabupaten Musi Banyuasin, yang dikumpulkan pertahun berjumlah 8 Daerah.	UU No. 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Transmigrasi Umum menurut Daerah Asal?	1
351	Dinas Tenaga	Kegiatan	-	Pembinaan	Data ini merupakan	UU NO. 8 Tahun	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah	1

	Kerja Dan Transmigrasi	Pembinaan tenaga kerja lansia dan penyandang cacat 2017-2021			Jumlah Kegiatan pembinaan tenaga kerja lansia dan penyandang cacat 2017-2021 ,berjumlah 1 Kegiatan Pelatihan Operator Komputer.	2016 Tentang Penyandang Disabilitas					Kegiatan Pembinaan tenaga kerja lansia dan penyandang cacat 2017-2021	
352	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Pekerja atau buruh peserta Jamsostek per Kecamatan	-	Tenaga Kerja	Data ini merupakan Jumlah Pekerja atau buruh peserta Jamsostek per Kecamatan di kabupaten Musi Banyuasin, yang dikumpulkan pertahun berjumlah 60.198 Orang	UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Pekerja atau buruh peserta Jamsostek per Kecamatan	1
353	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Jumlah Pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan menurut jenis kelamin	-	Pendidikan	Data ini merupakan Jumlah Jumlah Pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan menurut jenis kelamin di kabupaten Musi Banyuasin.	UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan menurut jenis kelamin?	1
354	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Sengketa Hubungan Industrial yang terselesaikan	-	Prusahaan	Data ini merupakan Jumlah Sengketa Hubungan Industrial yang terselesaikan di kabupaten Musi Banyuasin, yang dikumpulkan pertahun berjumlah 24 Sengketa yang terselesaikan (100%)	UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Sengketa Hubungan Industrial yang Terselesaikan?	1
355	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	-	Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan	Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. UUD Negara RI pasal 28 ayat 2 "Setiapa anak berhak atas	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap	1

	Anak	dan Anak Berdasarkan Tempat Kejadian		Tempat Kejadian	Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 pada Pasal 1 Upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.	kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"						Perempuan dan Anak Berdasarkan Tempat Kejadian ?	
						2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. 4. Peraturan Daerah Kab. Musi Banyuasin nomor 11 tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. 5. Peraturan Daerah Kab. Musi Banyuasin No. 12 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. 6. Peraturan Bupati Muba No.45 tahun							

						2018 tentang Kebijakan KLA.						
356	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak per Kecamatan	-	Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak per Kecamatan	Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 pada Pasal 1 Upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.	1. UUD Negara RI pasal 28 ayat 2 "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. 4. Peraturan Daerah Kab. Musi Banyuasin nomor 11 tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. 5. Peraturan Daerah Kab. Musi Banyuasin No. 12 tahun 2018 tentang	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Per Kecamatan?	1

						Penyelenggara n Perlindungan Perempuan dan Anak. 6. Peraturan Bupati Muba No.45 tahun 2018 tentang Kebijakan KLA.						
357	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak per Bulan	-	Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak per Bulan	Berdasarkan Peraturan Menteri Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 pada Pasal 1 Upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.	1. UUD Negara RI pasal 28 ayat 2 "Setiapa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" 2. Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. 4. Peraturan Daerah Kab. Musi Banyuasin nomor 11 tahun 2018 tentang Perlindungan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Kasus Kekerasan Terhadan Perempuan dan Anak Per Bulan?	1

						Perempuan dan Anak. 5. Peraturan Daerah Kab. Musi Banyuasin No. 12 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. 6. Peraturan Bupati Muba No.45 tahun 2018 tentang Kebijakan KLA.						
358	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Usia	-	Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Usia	Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 pada Pasal 1 Upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.	1. UUD Negara RI pasal 28 ayat 2 "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan	Tahunan	Integer	-	-	Berapakah Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Berdasarkan Usia?	1

						<p>KDRT. 4. Peraturan Daerah Kab. Musi Banyuasin nomor 11 tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.</p> <p>5. Peraturan Daerah Kab. Musi Banyuasin No. 12 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. 6. Peraturan Bupati Muba No.45 tahun 2018 tentang Kebijakan KLA.</p>						
359	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kasus	-	Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kasus	Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 pada Pasal 1 Upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, perlindungan khu	<p>1. UUD Negara RI pasal 28 ayat 2 "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002</p>	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Khusus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kasus?	1

						<p>tentang Perindungan Anak. 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. 4. Peraturan Daerah Kab. Musi Banyuasin nomor 11 tahun 2018 tentang Perindungan Perempuan dan Anak. 5. Peraturan Daerah Kab. Musi Banyuasin No. 12 tahun 2018 tentang Penyelenggaraa n Perindungan Perempuan dan Anak. 6. Peraturan Bupati Muba No.45 tahun 2018 tentang Kebijakan KLA.</p>						
360	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Tingkat Pendidikan Korban	-	Kasus Kekerasan	Kekerasan adalah sebuah tindakan yang memang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menindas yang lemah agar terus mendapatkan penderitaan. Kekerasan ini bisa	UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT)	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Tingkat Pendidikan Korban?	1

					dalam bentuk fisik atau bisa juga dalam bentuk psikis							
361	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Angka Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Indeks Pembangunan Gender	Indeks Komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dengan indeks pembanguna manusia (IPM), namun diarahkan untuk mengungkapkan ketimbangan antara laki-laki dan perempuan	1.Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 tahun 2021 tentang standar Data Statistik Nasional 2. Peraturan Bupati Nomor 87 tahun 2019 tentang Pedoman Pelembagaan Pengurusutamaan Gender dan Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.	Tahunan	Integer	-	-	Mengapa Indeks Pembangunan Manusia Harus Mengungkapkan Ketimpangan Antara Laki-Laki dan Perempuan?	1
362	Dinas Perhubungan	Jumlah Kendaraan Bermotor menurut Jenisnya di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya	Kendaraan Bermotor ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel	UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan pasal 1 ayat (8)	Tahunan	Integer	-	-	Jenis kendaraan bermotor apa saja?	1
363	Dinas Perhubungan	Jumlah Kendaraan Bermotor yang melaksanakan Uji Berkala menurut Jenis Kendaraan di	-	Kendaraan Bermotor yang melaksanakan Uji Berkala Menurut Jenis Kendaraan	Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (1) huruf a (kendaraan Bermotor) dikelompokkan berdasarkan jenis: a.	UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan pasal 47 ayat (2)	Tahunan	Integer	-	-	Apa saja pengujian yang seharusnya dilakukan pada kendaraan bermotor ?	1

		Kabupaten Musi Banyuasin			Sepeda Motor; b. Mobil; c. Mobil bus; d. Mobil barang ; dan e. Kendaraan khusus.							
364	Dinas Perhubungan	Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor	-	Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor	Kegiatan Teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau oleh Dinas/Unit Kerja yang ditunjuk untuk menjamin agar kendaraan bermotor selalu dalam keadaan laik jalan.	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5180)	Tahunan	Integer	-	-	Apakah tujuan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor?	1
365	Dinas Perhubungan	Prasarana Lalu Lintas Di Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin	-	Prasarana Lalu Lintas	Ruang Lalu Lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara	Tahunan	String	-	-	Apa fungsi marka dalam rambu-rambu lalu lintas?	1
366	Dinas Perhubungan	Kendaraan Bermotor Wajib Uji	-	Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib di uji untuk menentukan kelaikan jalan yaitu Mobil bus, Mobil penumpang umum,	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 86, Tambahan Lembaran	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Kendaraan Bermotor Wajib Uji ?	1

					Mobil barang, Kendaraan khusus, Kereta gandengan dan Kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.	Negara Republik Indonesia Nomor 5180)						
367	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Jumlah Koperasi Menurut Kelompok Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Koperasi menurut kelompok koperasi	Jumlah Koperasi menurut kelompok koperasi adalah jumlah koperasi yang ada menurut kelompok koperasi dari hasil pengesahan Badan Hukum Koperasi di setiap Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin	Dari Hasil Pengesahan Badan Hukum Koperasi	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Koperasi Menurut Kelompok Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
368	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Koperasi menurut jenis koperasi	Jumlah koperasi menurut jenis koperasi adalah jumlah koperasi yang ada menurut jenis koperasi di tiap-tiap Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin	Dari Hasil Pengesahan Badan Hukum Koperasi	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
369	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Jumlah Usaha Koperasi Dan Anggota Menurut Kecamatan di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Jenisnya	-	Usaha Koperasi Dan Anggota Menurut Kecamatan Serta menurut Jenisnya	Keoperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang/badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan	Dari hasil Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi dan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Usaha Koperasi Dan Anggota Menurut Kecamatan di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Jenisnya ?	1

370	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Jumlah Modal Assets, Volume Usaha dan SHU Koperasi menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Modal Assets, Volume Usaha dan SHU Koperasi menurut Jenis Koperasi	Nilai yang dihasilkan oleh Badan Usaha Koperasi, Volume usaha adalah jumlah barang/jasa yang terjual dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan unit atau rupiah, SHU pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku.	Dari hasil Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi dan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Modal Assets, Volume Usaha dan SHU Koperasi menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
371	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Jumlah Modal Usaha Koperasi dan Usaha Andalan Menurut Jenis Koperasi di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin	-	Modal Usaha Koperasi dan Usaha Andalan Menurut Jenis Koperasi	Jumlah/barang atau jasa yang terjual dalam waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan unit atau rupiah, atau total nilai penjualan atau pendapatan yang diperoleh selama satu tahun buku dari hasil usaha andalan dan jenis koperasi.	Dari hasil Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi dan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Modal Usaha Koperasi dan Usaha Andalan Menurut Jenis Koperasi di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
372	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Jumlah Anggota Usaha Koperasi Menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Anggota Usaha Koperasi Menurut Jenis Koperasi	Jumlah anggota, Usaha koperasi menurut jenis koperasi adalah jumlah anggota koperasi, dan usaha koperasi menurut jenis koperasi di tiap-tiap Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.	Dari Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi dan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Anggota Usaha Koperasi Menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
373	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pertumbuhan Jumlah UMKM di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Pertumbuhan UMKM	UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pertumbuhan UMKM dalam Kabupaten Muba meningkat dari	Data yang didapat jumlah perkembangan UMKM yang meningkat dari tahun ke tahun	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Pertumbuhan Jumlah UMKM di Kabupaten Musi	1

					tahun 2019 s.d 2022	dari hasil pendapatan setiap tahun oleh petugas pengumpulan data ke kelapangan.					Banyuasin?	
374	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Koperasi Berbadan Hukum Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Koperasi yang berbadan hukum	Jumlah Koperasi yang sudah memiliki pengesahan badan Hukum di tiap-tiap Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin	Dari Hasil Pengesahan Badan Hukum Koperasi	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Koperasi Berbadan Hukum Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin ?	1
375	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Data UMKM yang mendapatkan bantuan	-	UMKM yang mendapatkan bantuan	UMKM yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah, baik dari Pemerintah Pusat/Daerah berupa dana BLT dan BPUM serta bantuan hibah berupa barang. Jumlah UMKM 14.814, Jumlah penerimaan Bantuan 310 Orang.	Yang Mendapatkan bantuan dari daftar penerima pada Bank yang menyalurkannya	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Data UMKM yang mendapatkan bantuan?	1
376	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Koperasi Aktif Menurut Kecamatan	Jumlah koperasi yang aktif adalah koperasi yang masih aktif dan setiap tahun melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAP) serta menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan di tiap-tiap Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin	Dari hasil Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi dan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin?	1

377	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Jumlah Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi (Air Limbah) yang Layak di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Persentase Jumlah Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi (Air Limbah) yang Layak	Sinitasi adalah upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan Kesehatan melalui pembangunan sinitasi.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sinitasi.	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Persentase Jumlah Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi (Air Limbah) yang Layak?	1
378	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyediaan Jamban dan Tangki Septik Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Sarana dan Prasarana Penyediaan Jamban dan Tangki Septik Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Sinitasi adalah upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan Kesehatan melalui pembangunan sinitasi.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sinitasi.	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Sarana dan Prasarana Penyediaan Jamban dan Tangki Septik Menurut Kecamatan?	1
379	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni (RLH) di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni (RLH)	Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, serta pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Persentase Jumlah Rumah Layak Huni?	1

					kehatan penghuni.							
380	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani di Kabupaten Musi Banyuasin	Perumahan Kumah adalah Perumahan yang mengalami penurunan Kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Permukiman Kumah adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.	Peraturan Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Raakyat Rpublik Indonesia Nomor 14/Prt/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Tehadap Perumahan Kumah dan Permukiman Kumah	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
381	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Layak Huni (RLH) Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Jumlah Rumah Layak Huni (RLH) Menurut Kecamatan	Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, serta pembinaan keluarga, cerminan harkat dan mertabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumah dan Kawasan Permukin	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Rumah Layak Huni (RLH) Menurut Kecamatan?	1

382	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Data Perumahan Kab Musi Banyuasin	-	Data Perumahan Kabupaten Musi Banyuasin	Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, serta pembinaan keluarga, cerminan harkat dan mertabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumah dan Kawasan Permukin	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Perumahan di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
383	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Akses Sanitasi Kabupaten Musi Banyuasin	-	Akses Sanitasi Kabupaten Musi Banyuasin	Sinitasi adalah upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan Kesehatan melalui pembangunan sinitasi.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sinitasi.	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Rumah Tangga dan Akses Sinitasi Menurut Kecamatan?	1
384	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Pengurangan Kawasan Kumuh	-	Pengurangan Kawasan Kumuh	Perumahan Kumah adalah Perumahan yang mengalami penurunan Kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Permukiman Kumah adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan,	Peraturan Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Raakyat Rpublik Indonesia Nomor 14/Prt/M/2018 Tentang Pencegahan	Tahunan	Decimal	-	-	Berapa Luas Kawasan Kumah yang tertangani?	1

					tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.	dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumah dan Permukiman Kumah						
385	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Jumlah KK yang Terlayani Air Bersih	-	Persentase Jumlah KK yang Terlayani air Bersih	Air Buku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Buku adalah air yang berasal dari sumber air permukiman, air tanah, air hujan, dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang memulai proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 122 tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Persentase Jumlah KK Yang Terlayani Air Bersih?	1
386	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga yang Terlayani Air Bersih Menurut Kecamatan	-	Jumlah Kepala Keluarga yang Terlayani Air Bersih Menurut Kecamatan	Air Buku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Buku adalah air yang berasal dari sumber air permukiman, air tanah, air hujan, dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum. Air Minum adalah Air	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 122 tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Kepala Keluarga yang Terlayani Air Bersih Menurut Kecamatan?	1

					Minim Rumah Tangga yang memulai proses pengelolaan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum.							
387	Kepolisian Resort	Jumlah Laka Lintas	-	Laka Lintas	Laka lintas adalah Suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda	Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 ayat 1	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Laka Lintas ?	1
388	Kepolisian Resort	Jumlah Tindak pidana menurut Jenis Kejahatan	-	Tindak Pidana	Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana	Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Tindak pidana menurut Jenis Kejahatan ?	1
389	Kepolisian Resort	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	-	Pelanggaran Lalu Lintas	pelanggaran lalu lintas bisa adalah pelanggaran atas aturan yang berlaku di lalu lintas, khususnya jalan raya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas?	1
390	Kepolisian Resort	Jumlah Tindak Pidana	-	Tindak Pidana	Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana	Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Tindak Pidana ?	1
391	Kepolisian Resort	Jumlah Perkara dan Terdakwa Perkara Pidana	-	Perkara dan Terdakwa	Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian.	Pasal 1 butir 15 KUHP	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Perkara dan Terdakwa Perkara Pidana (termasuk	1

		(termasuk pelanggaran Lalu Lintas) di Pengadilan Negeri			Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.						pelanggaran Lalu Lintas) di Pengadilan Negeri ?	
392	Departemen Kementerian Agama Sekayu	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA)	Sekolah, Murid dan Guru Madrasah Aliyah (MA) dibawah naungan Depatemen Agama Kota sekayu	Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah	Tahunan		-	-	Berapa Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
393	Departemen Kementerian Agama Sekayu	Jumlah Siswa/Peserta Didik Madrasah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Kecamatan	-	Siswa/Peserta Didik Madrasah Berdasarkan Jenjang Pendidikan	Siswa/Peserta Didik Madrasah Berdasarkan Jenjang Pendidikand dibawah naungan Departemen Agama. Madrasah adalah suatu pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan Agam Islam yang mencakup Raudhatul Alhfal, Madrahsah Ibtidaiyah, Madrahsah Tasanawiyah, Madrahsah Aliyah dan Madrahsah Aliyah	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja suatu pendidikan dasar dan menengah	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Siswa/Peserta Didik Madrasah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Kecamatan ?	1

					Kejujuran.							
394	Departemen Kementerian Agama Sekayu	Jumlah Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Kecamatan	-	Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan	Guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar memimbing mengarahkan, melatih, menilai, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada RA, MI, MTS, MA, MAK	Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Pemerintahan Menteri Agama No 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraa n Pendidikan Madrasah	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Kecamatan?	1
395	Departemen Kementerian Agama Sekayu	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru RA/TK Islam Berdasarkan Kecamatan	-	Sekolah, Murid dan Guru RA/TK Islam	Sekolah, Murid dan Guru RA/TK Islam dibawah naungan Depatemen Agama Kota sekayu	Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Pemerintahan Menteri Agama No 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraa n Pendidikan Madrasah	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Sekolah, Murid dan Guru RA/TK Islam Berdasarkan Kecamatan?	1
396	Departemen Kementerian Agama Sekayu	Jumlah Guru Madrasah berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan	-	Guru Madrasah berdasarkan Jenis Kelamin	Guru madrasah berdasarkan jenis kelamin Laki-Laki dan Perempuan dibawah naungan Depatemen Agama Kota sekayu	Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Guru Madrasah berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan?	1

						Pemerintahan Menteri Agama No 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah						
397	Departemen Kementerian Agama Sekayu	Jumlah Siswa/Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan	-	Siswa/Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin	Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, Jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.	Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Siswa/Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan?	1
398	Departemen Kementerian Agama Sekayu	Jumlah Jamaah Haji per Kecamatan	-	Jamaah Haji	Jamaah haji terdiri dari jamaah haji reguler dan jamaah haji khusus. Jamaah haji reguler adalah jamaah haji yang menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh menteri. Dan Jamaah haji Khusus adalah jamaah haji yang menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Jamaah Haji per Kecamatan ?	1
399	Departemen Kementerian	Jumlah Tempat	-	Tempat	Rumah ibadat adalah bangunan yang	Peraturan Berdasarkan	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Tempat	1

	Agama Sekayu	Peribadatan Berdasarkan Kecamatan		Peribadatan	memeiliki ciri-ciri tertenti yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.	Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.					Peribadatan Berdasarkan Kecamatan ?	
400	Departemen Kementerian Agama Sekayu	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Raudatul Athfal (RA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Sekolah, Guru, dan Murid Raudatul Athfal (RA) di Bawah Kementerian Agama	Sekolah, Murid dan Guru Raudatul Athfal (RA) dibawah nauangan Depatemen Agama Kota sekayu	Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Raudatul Athfal (RA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin?	1

401	Departemen Kementerian Agama Sekayu	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementerian Agama	Sekolah, Murid dan Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) dibawah nauangan Depatemen Agama Kota sekayu	Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
402	Departemen Kementerian Agama Sekayu	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	-	Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementerian Agama	Sekolah, Murid dan Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) dibawah nauangan Depatemen Agama Kota sekayu	Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
403	Departemen Kementerian Agama Sekayu	Realisasi NR Kantor dan Nikah Kantor	-	Nikah Rujuk (NR) Luar Kantor dan Nikah Kantor	Nikah Rujuk (NR) Luar Kantor dan Nikah Kantor yang dilakukan di Depatemen Agama Kota sekayu	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Data Realisasi Nikah Rujuk (NR) Luar Kantor dan Nikah Kantor di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
404	Departemen Kementerian Agama	Daftar Pondok Pesantren di Kabupaten	-	Pondok Pesantren	Tempat pendidikan yang meyenggarakan kegiatan pembelajaran	PMA No 30 Tahun 2020 Tentang	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Data Pondok Pesantren di	1

	Sekayu	Musi Banyuasin			agama islam bagi santri, yang diasuh oleh kiai yang tinggal atau mukim bersama-sama dalam satu lokasi.	Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (diundangkan pada 3 Desember 2020), PMA No 31 tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren (Diundangkan pada 30 November 2020), dan PMA No 32 tahun 2020 tentang Ma'had Aly (diundangkan pada 3 Desember 2020)					Kabupaten Musi Banyuasin?	
405	PT. Muba Electric Power	Jumlah Pelanggan Per Kecamatan	-	Pelanggan Listrik	Pelanggan Listrik adalah seseorang atau lembaga yang menggunakan (memakai) jasa listrik yang digunakan sehari-hari menurut kebutuhannya dan sudah terikat saling membutuhkan antara Produsen dan pelanggan	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik Yang Dikelola Dengan Mekanisme Sistem Listrik Curah PLN Yang Disediakan Oleh Perusahaan Daerah PT.	Tahunan	Integer	-	-		1

						Muba Electric Power						
406	PDAM	Jumlah Pelanggan dan Air Yang Disalurkan Menurut Pelanggan		Data nama pelanggan, alamat dan tanggal menjadi pelanggan	Jumlah pelanggan aktif yang menerima air bersih berdasarkan DRD	Permenkes No.492 tahun 2020 dan Perda Perumda Air Minun Tirta Randik No. 15 tahun 2021	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Pelanggan dan Air Yang Disalurkan Menurut Pelanggan?	1
407	PDAM	Jumlah Pelanggan Menurut Kelompok Non Niaga		Data Pelanggan Domestik Non Niaga	Jumlah pelanggan konsumsi domesti diniaga	Permenkes No.492 tahun 2020 dan Perda Perumda Air Minun Tirta Randik No. 15 tahun 2022	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah Pelanggan Menurut Kelompok Pelanggan Non Niaga?	1
408	PDAM	Jumlah Air Bersih		Jumlah air yang disalurkan	Jumlah air yang disalurkan kepada seluruh golongan pelanggan	Permenkes No.492 tahun 2020 dan Perda Perumda Air Minun Tirta Randik No. 15 tahun 2023	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah air bersih yang disalurkan menurut golongan pelanggan?	1
409	PDAM	Jumlah Pelanggan, Air yang disalurkan dan nilai menurut pelanggan di Kabupaten Musi Banyuasin		Jumlah pelanggan berdasarkan air yang disalurkan	Jumlah pelanggan dan jumlah pemakaian serta jumlah tagihan yang harus di bayar	Permenkes No.492 tahun 2020 dan Perda Perumda Air Minun Tirta Randik No. 15 tahun 2024	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah pelanggan dan air yang disalurkan menurut kelompok pelanggan di Kabupaten Musi Banyuasin?	1
410	PDAM	Jumlah Pelanggan dan Air Yang Disalurkan menurut		Jumlah pelanggan berdasrkan Kecamatan	Jumlah Pelanggan di Kecamatan sesuai unit pengolahan distribusi air	Permenkes No.492 tahun 2020 dan Perda Perumda Air Minun Tirta	Tahunan	Integer	-	-	Berapakah jumlah pelanggan dan air yang disalurkan	1

		Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin				Randik No. 15 tahun 2025					menurut kelompok pelanggan dalam Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin?	
411	PDAM	Jumlah Pe;anggan Air Yang di Salurkan dan Nilai Menurut Bulan di Kabupaten Musi Bnayuasin		Jumlah pelanggan berdasarkan bulan tagihan	jumlah tagihan pelanggan yang ditagih berdasrkan DRD setiap bulan	Permenkes No.492 tahun 2020 dan Perda Perumda Air Minun Tirta Randik No. 15 tahun 2026	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah pelanggan, air yang disalurkan dan nilai yang ditagih berdasarkan DRD setiap bulan dalam Kabupaten Musi Banyuasin?	1
412	PDAM	Jumlah pendapatan dan biaya produksi PDAM Kabupaten Musi Banyuasin		Biaya Oprasional	Jumlah biaya oprasional dan penadapatan yang belum ditagih	Permenkes No.492 tahun 2020 dan Perda Perumda Air Minun Tirta Randik No. 15 tahun 2027	Tahunan	Integer	-	-	Berapa Jumlah pendapatan dan biaya produksi dalam Kabupaten Musi Banyuasin?	1
413	PDAM	Data Jumlah Desa yang telah terjangkau layanan PDAM dalam Kabupaten Musi Banyuasin		Wilayah Pelayanan	Jumlah desa yang terlayani berdasarkan pengelohan yang ada di Kecamatan	Permenkes No.492 tahun 2020 dan Perda Perumda Air Minun Tirta Randik No. 15 tahun 2028	Tahunan	Integer	-	-	Berapa jumlah desa yang dilayani dalam Kabupaten Musi Banyuasin?	1

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau  
mengandalkan sebagian atau seluruh isi buku untuk tujuan komersial tanpa ijin tertulis dari  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin



[satudata.mubakab.go.id](http://satudata.mubakab.go.id)



[bidangstatistik.dinkominfomuba](https://www.instagram.com/bidangstatistik.dinkominfomuba)